

**PENGARUH FAKTOR POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL TERHADAP
KEJAHATAN *HUMAN TRAFFICKING* DI INDIA
PADA TAHUN 2013-2016**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Konsentrasi
International Security and Peace



Oleh:

WIDYA UTARI OKTAVIANI

155120407111027

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH FAKTOR POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL TERHADAP
KEJAHATAN *HUMAN TRAFFICKING* DI INDIA
PADA TAHUN 2013-2016**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

WIDYA UTARI OKTAVIANI

NIM. 155120407111027

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama ,

Pembimbing Pendamping,

Arief Setiawan, S.IP., MPS

NIP. 198403182009011008

Yusli Effendi S.IP., MA

NIP. 197804232009121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

NIP. 197802202010121001

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH FAKTOR POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL TERHADAP KEJAHATAN *HUMAN TRAFFICKING* DI INDIA PADA TAHUN 2013-2016

SKRIPSI

Disusun Oleh :

WIDYA UTARI OKTAVIANI

NIM. 155120407111027

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian sarjana Pada tanggal 1 Juli 2019

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih, S.IP., M.Si

NIK. 2011028412302001

Adhi Cahya F.S.Hub.Int., MS

NIK. 2018079106151001

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2

Arief Setiawan, S.IP., MPS

NIP. 198403182009011008

Yusli Effendi S.IP., MA

NIP. 197804232009121001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo.S.E..M.Si., Ak.

NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Widya Utari Oktaviani

NIM : 155120407111027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
“PENGARUH FAKTOR POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL TERHADAP
KEJAHATAN *HUMAN TRAFFICKING* DI INDIA PADA TAHUN 2013-2016”
adalah sebenar-benarnya karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya,
dalam skripsi tersebut diberi catatan kaki dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang
saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 18 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Widya Utari Oktaviani

NIM. 155120407111027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia beserta limpahan nikmat yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi kewajiban dari universitas dan fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Brawijaya serta sebagai syarat untuk lulus. Selama proses pengerjaan skripsi, penulis mendapat banyak pembelajaran mulai dari cara mengumpulkan data, memilah data, menganalisis suatu fenomena, dan penulis juga mendapat pengetahuan baru yang berguna bagi penulis.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis mendapat bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan inspirasi yang tak terhingga bagi penulis. Terima kasih karena selalu percaya dan mendoakan penulis dimana pun dan kapan pun.
2. Pak Arief Setiawan, S.IP., MPS dan Pak Yusli Effendi S.IP., MA. Selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih telah membimbing penulis serta memberikan banyak saran terkait isu maupun teknik penulisan dalam skripsi ini.
3. Bu Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih, S.IP., M.Si dan Pak Adhi Cahya F, S.Hub.Int, MS selaku dosen penguji yang juga banyak

memberikan masukan kepada penulis untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

4. Teman-teman penulis, diantaranya: Vitri Putri Kumalasari, Fiska Suci Utami, Faradila Fajrin, dan Husnatul Izzati Lutvia yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal hingga akhir. Teman-teman seperbimbingan penulis yaitu Lauren, Mega, dan Kenilla yang telah saling menguatkan dan menyemangati satu sama lain. Dan teman-teman HI lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas masukan yang diberikan, selalu bersedia menjadi tempat *sharing* bagi penulis serta dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal perkuliahan, skripsi, maupun hal lainnya.
5. Terima kasih kepada Eden, The Script, The 1975, Oasis, dan Bon Iver yang musik-musiknya menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Demikian beberapa ucapan terima kasih saya kepada pihak-pihak yang telah membantu serta berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian serupa penstudi hubungan internasional dan dapat membantu memunculkan karya lainnya yang mampu melegkapi kekurangan dari skripsi ini.

Malang, 18 Juni 2019

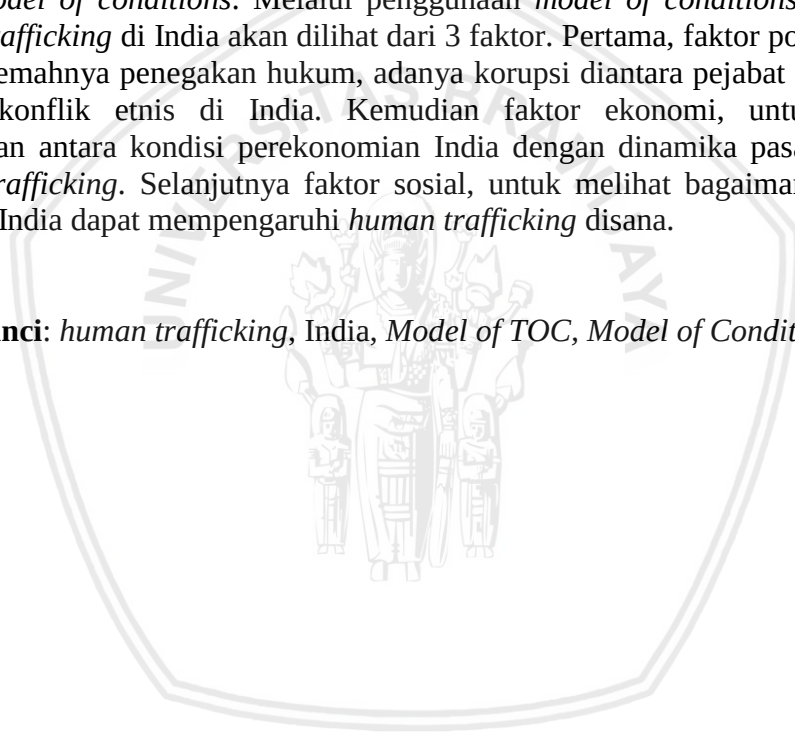
Widya Utari Oktaviani

**PENGARUH FAKTOR POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL TERHADAP
KEJAHATAN *HUMAN TRAFFICKING* DI INDIA
PADA TAHUN 2013-2016**

ABSTRAK

Human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang terjadi di banyak negara. India merupakan salah satu negara dengan kasus *human trafficking* yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyebab kejahatan *human trafficking* dilihat melalui faktor politik, ekonomi, dan sosial di India. Penelitian ini menggunakan salah satu model dari *model of transnational organized crime* milik Roy Godson dan Phil Williams yakni *model of conditions*. Melalui penggunaan *model of conditions*, kejahatan *human trafficking* di India akan dilihat dari 3 faktor. Pertama, faktor politik terkait dengan lemahnya penegakan hukum, adanya korupsi diantara pejabat publik, dan adanya konflik etnis di India. Kemudian faktor ekonomi, untuk melihat keterkaitan antara kondisi perekonomian India dengan dinamika pasar terhadap *human trafficking*. Selanjutnya faktor sosial, untuk melihat bagaimana keadaan sosial di India dapat mempengaruhi *human trafficking* disana.

Kata Kunci: *human trafficking*, India, *Model of TOC*, *Model of Conditions*

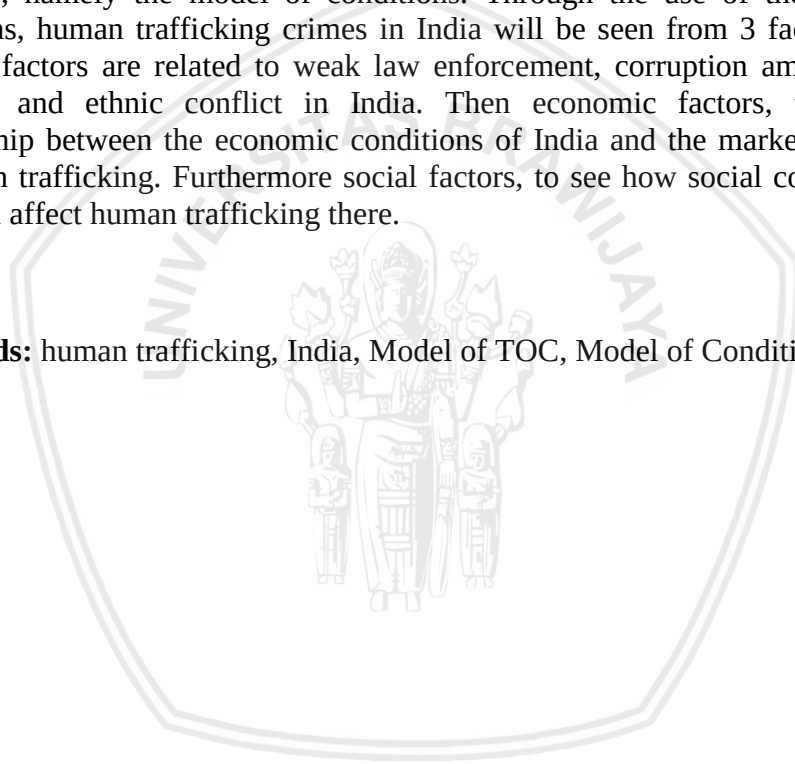


**THE EFFECT OF POLITICAL, ECONOMIC, AND SOCIAL FACTORS
ON HUMAN TRAFFICKING CRIME IN INDIA
IN 2013-2016**

ABSTRACT

Human trafficking is one form of transnational organized crime that occurs in many countries. India is one of the countries with a high case of human trafficking. This study aims to discuss the causes of human trafficking crime seen through political, economic and social factors in India. This study uses one model of the model of transnational organized crime owned by Roy Godson and Phil Williams, namely the model of conditions. Through the use of the model of conditions, human trafficking crimes in India will be seen from 3 factors. First, political factors are related to weak law enforcement, corruption among public officials, and ethnic conflict in India. Then economic factors, to see the relationship between the economic conditions of India and the market dynamics of human trafficking. Furthermore social factors, to see how social conditions in India can affect human trafficking there.

Keywords: human trafficking, India, Model of TOC, Model of Conditions



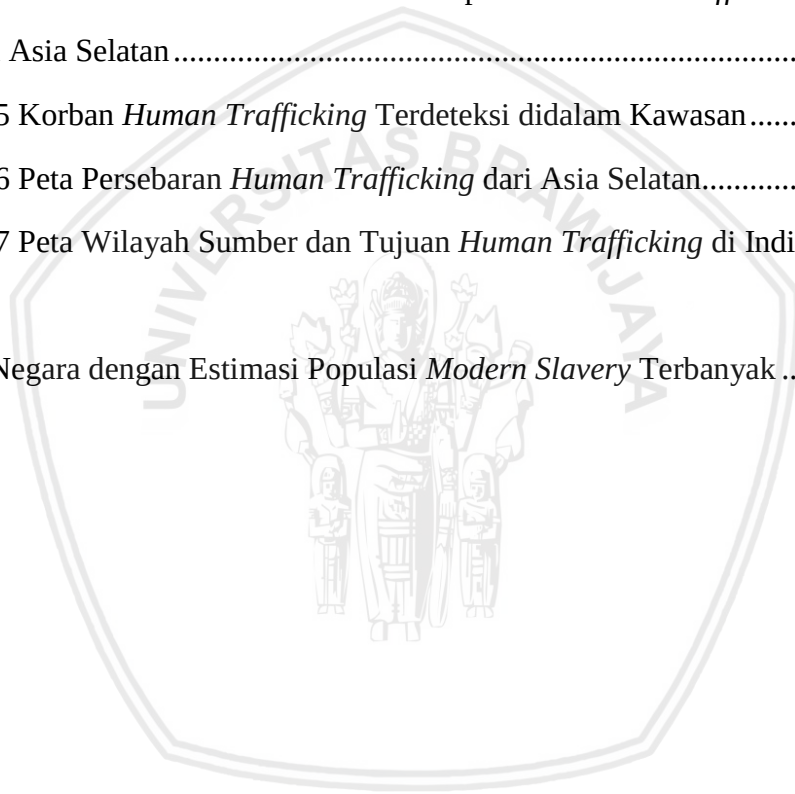
DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Manfaat.....	5
1.4.1. Manfaat Akademik	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
BAB II	6
KERANGKA PEMIKIRAN.....	6
2.1. Studi Terdahulu	6
2.2. Kerangka Teoretik	12
2.2.1. <i>Model of Transnational Organized Crime</i>	12
2.2.2. <i>Human Trafficking</i>	22
2.3. Definisi Konseptual	23
2.3.1. <i>Model of Conditions</i>	23
2.3.1.1. Political Models	23
2.3.1.2. Economic Models	24
2.3.1.3. Social Models.....	25

2.3.2. <i>Human Trafficking</i>	25
2.4. Definisi Operasionalisasi.....	26
2.5. Tabel Operasionalisasi	28
2.6. Alur Pemikiran	31
2.7. Hipotesis.....	32
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Ruang Lingkup	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data	34
3.4. Teknik Analisis Data	35
3.5. Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV	38
GAMBARAN UMUM <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	38
DI KAWASAN ASIA SELATAN DAN INDIA	38
4.1. <i>Human Trafficking</i> Sebagai <i>Transnational Organized Crime</i>	38
4.2. <i>Human Trafficking</i> di Kawasan Asia Selatan.....	45
4.3. <i>Human Trafficking</i> di India	55
BAB V	61
ANALISIS PENGARUH FAKTOR POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL TERHADAP KEJAHATAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI INDIA.....	61
5.1. Pengaruh Keadaan Politik dan Korupsi Terhadap <i>Human Trafficking</i> di India.....	62
5.2. Keterkaitan antara Kondisi Perekonomian India dengan Dinamika Pasar Terhadap <i>Human Trafficking</i>	76
5.3. Kondisi Sosial serta Jaringan TOC dalam <i>Human Trafficking</i> di India.....	90
BAB VI.....	98
KESIMPULAN DAN SARAN	98
6.1. Kesimpulan.....	98
6.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1 Jenis-Jenis Eksploitasi dalam <i>Human Trafficking</i>	43
Gambar 2 Korban <i>Human Trafficking</i> Terdeteksi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur	44
Gambar 3 Keuntungan <i>Forced Labour</i> Setiap Kawasan	46
Gambar 4 Korban Terdeteksi Sesuai Jenis Eksploitasi <i>Human Trafficking</i> di Kawasan Asia Selatan	48
Gambar 5 Korban <i>Human Trafficking</i> Terdeteksi didalam Kawasan.....	49
Gambar 6 Peta Persebaran <i>Human Trafficking</i> dari Asia Selatan.....	54
Gambar 7 Peta Wilayah Sumber dan Tujuan <i>Human Trafficking</i> di India	81
Tabel 1 Negara dengan Estimasi Populasi <i>Modern Slavery</i> Terbanyak	56



DAFTAR SINGKATAN

AASU	<i>All Assam Students Union</i>
ACHR	<i>Asian Human Rights Commission</i>
CPI	<i>Corruption Perception Index</i>
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i>
DHS	<i>Department of Health Survey</i>
ECPAT	<i>End Child Prostitution and Trafficking</i>
ESCAP	<i>Economic and Social Commission for Asia and Pasific</i>
ETA	<i>Electronic Travel Authorisation</i>
GMS	<i>Greater Mekong Subregion</i>
ILO	<i>International Labor Organization</i>
IPC	<i>Indian Penal Code</i>
ITPA	<i>The Immoral Trafficking (Prevention) Act</i>
NCRB	<i>National Crime Records Bureau</i>
POCSO	<i>Protection of Children from Sexual Offences Act</i>
PRI	<i>Partido Revolucionario Institucional</i>
SAARC	<i>South Asian Association for Regional Cooperation</i>
SSB	<i>Sashastra Seema Bal</i>
TIP	<i>Trafficking in Person</i>
TOC	<i>Transnational Organized Crime</i>
TVPA	<i>Trafficking Victims Protection Act's</i>
UNICEF	<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UNTOC	<i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan Transnasional atau dikenal dengan nama lain *transnational organized crime* (TOC) adalah kejahatan yang dilakukan bersama-sama secara lintas batas negara. Kata transnasional sendiri dalam kejahatan transnasional berarti bahwa kejahatan transnasional ini dilakukan tidak hanya disatu negara saja, melainkan juga di beberapa negara. Salah satu kejahatan transnasional yang menjadi perhatian dunia internasional adalah isu perdagangan manusia atau *human trafficking*. Isu ini bukan merupakan isu yang baru bahkan, isu perdagangan manusia sendiri sudah ada sejak lama dan semakin mengkhawatirkan karena mencakup hampir seluruh kawasan.

Berdasarkan laporan *Trafficking in Person* (TIP) tahunan yang dikeluarkan oleh *U.S. Government*, terdapat tingkatan-tingkatan untuk menilai usaha suatu negara dalam mengatasi *human trafficking*. Terdapat 3 tingkatan yaitu: Tier 1 merujuk pada negara-negara yang patuh pada standar minimum *Trafficking Victims Protection Act's* (TVPA) serta memiliki standar tinggi untuk mengatasi *human trafficking*; Tier 2 merujuk pada negara-negara yang belum sepenuhnya mematuhi standar TVPA tapi berusaha untuk memenuhi standar tersebut; dan Tier 3 mengacu pada negara-negara yang memiliki standar dan usaha sangat kecil dalam menangani *human trafficking*. Diantara kawasan-kawasan lain, ternyata negara-negara di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara dan Asia Selatan rata-

rata masuk kedalam kategori Tier 2 dan Tier 2 *watchlist*, bahkan ada negara seperti Myanmar dan Thailand yang masuk dalam kategori Tier 3.¹

Salah satu negara di Kawasan Asia-Pasifik yang memiliki tingkat perdagangan manusia tinggi adalah India dimana India menjadi negara sumber dan tujuan kejahatan *human trafficking*. Pada tahun 2009 hingga tahun 2010, India memasuki tingkatan Tier 2 *watchlist* yang berarti bahwa pemerintahan India tidak sepenuhnya patuh dengan standar minimum TVPA tetapi berupaya untuk memenuhi standar tersebut.² Pada tahun berikutnya, peringkat India naik menjadi tier 2 yang stabil hingga tahun 2016. Meski peringkat India stabil dari tahun 2011 hingga tahun 2016, namun bukan berarti India telah berhasil menangani *human trafficking* yang ada. Justru isu perdagangan manusia di India terus terjadi.

Berdasarkan *Index on Global Slavery* tahun 2013, India memiliki jumlah korban perbudakan modern terbanyak yakni sejumlah 14 juta orang diikuti oleh negara China dan Pakistan di urutan kedua dengan total 3 juta korban dan ketiga dengan total 2 juta korban.³ Pada tahun 2016, *Global Slavery Index* kembali mengeluarkan data korban perbudakan dari 46 juta orang yang diperbudak di seluruh dunia, 18 juta diantaranya tinggal di India. Angka korban ini meningkat daripada tahun 2014. Biasanya yang menjadi korban perbudakan merupakan

¹ European Court of Auditors, "Special Report: EU Support to Fight Human Trafficking in South/South East Asia", hlm. 30, diakses dari https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_9/SR_HUMAN_TRAFFICKING_EN.pdf pada 10 Februari 2019

² U.S. Department of State, "Trafficking in Person Report June 2013", diakses dari <https://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf> pada 10 Februari 2019

³ BBC, "New Global Index Exposes 'Modern Slavery' Worldwide", diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-24560937> pada 2 April 2019

orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak memiliki kewaspadaan serta pengetahuan mengenai hal-hal seperti itu.

Faktor yang mempengaruhi kejahatan *human trafficking* di India tidak terlepas dari faktor-faktor seperti politik, kondisi sosial, maupun keadaan perekonomian masyarakat India sendiri. India masih menjadi negara dengan tingkat perekonomian yang rendah. Berdasarkan laporan dari *Global Slavery Index* 2016, terdapat 270 juta masyarakat di India yang tinggal dibawah garis kemiskinan.⁴ Terutama yang tinggal di daerah marginal dimana mereka juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, sektor pariwisata di India juga turut mempengaruhi adanya *human trafficking*. Selain itu, meningkatnya kunjungan turis ke India juga dapat menjadi salah satu faktor terkait *human trafficking* di India.

Pada tahun 2015, Menteri Dalam Negeri India mengimplementasikan kebijakan *Electronic Travel Authorisation* (ETA) yakni kebijakan yang memungkinkan turis untuk datang dan menetap di India selama 30 hari tanpa perlu mengurus visa ke diplomatik India. Melalui kebijakan ini, turis dapat berkunjung ke India dan memperoleh visa pada saat kedatangan.⁵ Adanya kebijakan tersebut meningkatkan kunjungan turis ke India dari 14,083 pada Desember 2014 menjadi 115,677 pada Maret 2016. Total kedatangan turis ke

⁴ Global Slavery Index, "Global Slavery Index 2016", diakses dari <http://un-act.org/publication/view/the-global-slavery-index-2016/> pada 19 Februari 2019

⁵ NDTV, "Government Changes Name of Visa on Arrival Scheme to e-Tourist Visa" diakses dari <https://www.ndtv.com/india-news/government-changes-name-of-visa-on-arrival-scheme-to-e-tourist-visa-754929> pada 2 April 2019

India meningkat dari 1.61 persen pada 2014 menjadi 14.16 persen pada 2016.⁶ Sedangkan, dari segi sosial, dilihat dari masih adanya permintaan terhadap buruh murah untuk dipekerjakan di industri-industri di India dan korbannya merupakan orang-orang yang tinggal di daerah marjinal.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa isu perdagangan manusia di India masih perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi *human trafficking* yang ada. Masih terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kejahatan *human trafficking* di India terutama faktor-faktor internal seperti politik, ekonomi, dan sosial. Kejahatan *human trafficking* di India menjadi urgensi dari penelitian ini karena penulis ingin mencari tahu korelasi faktor-faktor tersebut terhadap kejahatan *human trafficking* di India. Padahal pemerintah India telah melakukan upaya untuk mengatasi *human trafficking* yang membuat India dari tahun 2011 sampai dengan 2016 tergolong Tier 2 dalam laporan TIP. Penulis juga berpendapat apabila tidak segera ditangani, kejahatan ini dapat mengancam keamanan negara India sendiri, bahkan dapat mengancam stabilitas kawasan.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa faktor politik, ekonomi, dan sosial dapat mempengaruhi *human trafficking* di India tahun 2013-2016?

⁶ Natasha Agarwal, "India's Liberalised (Yet Restricted) Visa Policy", *RF Issue Brief*, No. 152, 2016, hlm. 4.

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk menjelaskan maraknya kejahatan transnasional khususnya *human trafficking* di India; dan
2. Untuk menjelaskan pengaruh faktor politik, ekonomi, dan sosial terhadap kejahatan *human trafficking* yang terjadi di India pada rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Akademik

1. Mengetahui penyebab adanya kejahatan *human trafficking* di India; dan
2. Menambah hasana mengenai *transnational organized crime* khususnya *human trafficking* dalam studi hubungan internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengkaji serta membangun alur pemikiran dalam ilmu hubungan internasional serta diharapkan agar penelitian ini dapat berkontribusi untuk penelitian serupa yang terkait kejahatan *transnational organized crime human trafficking*.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini, berisi mengenai beberapa hal yang akan penulis jelaskan diantaranya; studi terdahulu, kerangka teoretik, definisi konseptual, operasionalisasi model, alur pemikiran, dan hipotesis. Dalam pembahasan studi terdahulu, penulis akan menjelaskan mengenai studi terdahulu sebagai referensi. Lalu terdapat kerangka teoretik yang berisikan penjabaran penulis mengenai *model of transnational organized crime*. Selanjutnya terdapat definisi konseptual yang menjelaskan mengenai *model of conditions*. Keduanya merupakan fenomena terkait dalam penelitian penulis. Kemudian penulis operasionalisasikan model yang penulis pilih. Selanjutnya terdapat tabel operasionalisasi beserta hipotesis yang berisi tentang asumsi awal penulis dari permasalahan yang penulis analisis menggunakan model yang penulis pilih. Kemudian terdapat alur pemikiran yang menjelaskan mengenai urutan berpikir penulis.

2.1. Studi Terdahulu

Studi terdahulu pertama yang digunakan penulis adalah jurnal berjudul “*Human Trafficking in India: An Analysis*” yang ditulis oleh Vimal Vidushy. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2016 oleh *International Journal of Applied Research*. Dalam jurnal ini, membahas mengenai definisi dari *human trafficking*, kemudian menjelaskan tentang penyebab dan bentuk-bentuk dari *human trafficking* di India. Selain itu, dalam jurnal tersebut juga menjelaskan mengenai

upaya-upaya pencegahan terhadap *human trafficking* meliputi: pengawasan perbatasan, membentuk program maupun kebijakan yang mampu menaikkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai *human trafficking* sendiri, dan memperkuat hukum yang ada di suatu negara.

Dalam jurnal tersebut, penyebab dari *human trafficking* di India bisa berasal dari ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, kekerasan gender, serta adanya tingginya tingkat korupsi. Berdasarkan laporan dari *Walk Free Foundation* tahun 2014, India merupakan rumah bagi 14 juta korban *human trafficking* yang terlibat dalam *sex trafficking*, *bonded labour*, *child labour*, *domestic servitude*, dan *forced marriage*. Hal ini diperkuat dari *India's 2008 Integrated Plan of Action to Prevent and Combat Human Trafficking* yang menyatakan jika skala masalah *human trafficking* di India sangat besar.⁷ *Human trafficking* di India tidak terlepas dari negara tetangga seperti Nepal dan Bangladesh yang bermigrasi ke India untuk mendapat pekerjaan namun justru menjadi korban *trafficking*. Penelitian yang dilakukan oleh *Economic and Social Commission for Asia and Pasific* (ESCAP) menunjukkan jika eksploitasi anak-anak paling banyak di Kawasan Asia Selatan meliputi negara India, Nepal, dan Bangladesh. Anak-anak tersebut dijual untuk *forced marriage* dan prostitusi.⁸

Persamaan studi terdahulu pertama ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang diteliti. Studi terdahulu pertama yang penulis gunakan dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai kejahatan *human trafficking*.

⁷ Vimal Vidushy, "Human Trafficking in India: An Analysis", *International Journal of Applied Research*, Vol.2, No.6, 2016, hlm. 168.

⁸ Vidushy, "Human Trafficking in India: An Analysis", hlm. 169.

Persamaan lainnya adalah negara yang menjadi objek penelitian yang juga menggunakan India untuk diteliti. Meskipun, terdapat persamaan permasalahan yang diteliti serta negara yang menjadi objek penelitian, tapi terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan studi terdahulu. Perbedaannya terletak pada alat untuk membantu menjelaskan fenomena *human trafficking* di India. Dalam jurnal tersebut, Vimal lebih menggunakan konsep *push and pull factors*.

Push factors yang dimaksud meliputi: keadaan ekonomi masyarakat yang buruk, tingkat kemiskinan tinggi, kurangnya pendidikan, kurangnya keahlian dan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja, minimnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kejahatan *human trafficking*, adanya kekerasan yang menjadi budaya di masyarakat. Sedangkan, *pull factors* meliputi: adanya permintaan untuk perempuan India bekerja di tempat militer, permintaan prostitusi, uang yang didapat dengan cepat, dan dijanjikan mendapat pekerjaan oleh *traffickers*.⁹ Berbeda dengan konsep tersebut, penulis menggunakan konsep *model of Transnational Organized Crime* yang ditulis oleh Phil Williams dan Roy Godson. Studi terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Vimal ini berkontribusi membantu penulis untuk dapat menjelaskan lebih jauh mengenai penyebab *human trafficking* di India dilihat dari berbagai faktor yang ada.

Selanjutnya terdapat studi terdahulu kedua yang digunakan penulis berjudul “*Anti-trafficking Regional Cooperation in Southeast Asia and the Global Linkages from Geopolitical Perspective Borders and Anti-trafficking Strategies Between Burma, Laos PRD, and Thailand*” yang ditulis oleh Anne-Lise Sauterey.

⁹ Vidushy, “Human Trafficking in India: An Analysis”

Dalam tulisannya, Sauterey menjelaskan mengenai aktivitas ilegal yang dilakukan di daerah ‘Golden Triangle’ yang merupakan area utama kejahatan transnasional seperti *drug trafficking* dan *human trafficking* di Kawasan Asia Tenggara. Kondisi politik dan sosio ekonomi yang kurang stabil serta kurangnya pengawasan perbatasan di daerah ‘Golden Triangle’ membuat daerah tersebut rentan terhadap kejahatan transnasional.

Terdapat tiga bagian yang dibahas dalam tulisan Sauterey. Bagian pertama, menganalisis adanya dualitas di daerah ‘Golden Triangle’. Dualitas yang dimaksud yaitu di satu sisi, negara yang menjadi bagian dari ‘Golden Triangle’ seperti Burma, Laos, dan Thailand telah menerapkan kerjasama *anti-trafficking*. Tetapi, di sisi lain kurangnya pengawasan dan kontrol di daerah perbatasan membuat kelompok kejahatan transnasional dapat masuk dan melancarkan aksi kejahatannya sehingga kerjasama tersebut menjadi kurang efektif.¹⁰ Bagian kedua, menganalisis mengenai perkembangan hubungan antar negara untuk meningkatkan efisiensi dari strategi *anti-trafficking* di kawasan ‘Golden Triangle’.¹¹ Bagian ketiga, menganalisis mengenai cara untuk melawan bukan hanya kejahatan *drug trafficking* atau *human trafficking*, melainkan semua bentuk kejahatan transnasional di *Greater Mekong Subregion* (GMS) dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan global.¹²

¹⁰ Anne-Lise Sauterey, “Anti-trafficking Regional Cooperation in Southeast Asia and the Global Linkages from Geopolitical Perspective Borders and Anti-trafficking Strategies Between Burma, Laos PRD, and Thailand”, *Discussion Paper*, 2008, hlm. 5.

¹¹ Sauterey, “Anti-trafficking Regional Cooperation”, hlm. 15.

¹² Sauterey, “Anti-trafficking Regional Cooperation”, hlm. 20.

Di dalam bagian ketiga tulisannya, Sauterey menggunakan model of TOC milik Phil Williams dan Roy Godson untuk menganalisis situasi di area perbatasan antara Burma, Laos, dan Thailand. Kerangka pertama dalam *model of TOC* yakni *model of conditions* dengan faktor politik, ekonomi, dan sosial. Dalam faktor politik, keadaan *weak states* sesuai dengan karakteristik geopolitik dari Negara Laos yang memiliki legitimasi rendah. Sedangkan, faktor ekonomi terlebih *market dynamics* menggambarkan kondisi Negara Thailand yang menarik kelompok kejahatan transnasional untuk beroperasi disana. Kemudian, faktor sosial menggambarkan kondisi di area perbatasan Burma, Laos, dan Thailand yang rentan ditembus oleh aktivitas ilegal.¹³

Karakteristik kedua dalam *model of TOC* yaitu *model of operations* yang di dalamnya, menjelaskan mengenai bagaimana kelompok kejahatan transnasional beroperasi dari negara *home base* atau negara asal yang ditandai dengan pemerintahan yang lemah, tidak stabilnya perekonomian, dan adanya pergolakan sosial di dalam negara tersebut. Kondisi ini terdapat di Negara Burma dan Laos. Sedangkan, untuk negara Thailand sendiri merupakan negara yang dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan transnasional untuk memindahkan muatan ilegal menuju negara lain sebagai negara tujuan kelompok kejahatan transnasional.¹⁴

Persamaan studi terdahulu kedua ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan model of TOC milik Phil Williams dan Roy Godson untuk menganalisis fenomena kejahatan transnasional. Sedangkan, perbedaan antara

¹³ Sauterey, "Anti-trafficking Regional Cooperation", hlm. 23.

¹⁴ Sauterey, "Anti-trafficking Regional Cooperation", hlm. 24.

studi terdahulu kedua ini dengan penelitian penulis terletak pada negara yang dijadikan objek penelitian. Penulis memilih negara India sebagai objek penelitian untuk melihat kejahatan transnasional khususnya *human trafficking* di negara tersebut. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam tulisannya Sauterey memilih menggunakan dua model dalam model of TOC yakni *model of conditions* dan *model of operations* untuk menganalisis fenomena. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis hanya memilih salah satu model dalam *model of TOC*. Penulis hanya menggunakan *model of conditions* untuk menganalisis *human trafficking* di India.

Kegunaan dari studi terdahulu dalam penelitian ini adalah untuk membantu penulis dalam membangun jembatan antara topik terkait¹⁵ yang mana dalam hal ini yaitu kejahatan transnasional dan *human trafficking*. Dalam studi terdahulu yang digunakan penulis, studi terdahulu pertama memberikan penjelasan mengenai faktor *push and pull* dalam *human trafficking* yang nantinya dapat dikaitkan dengan pembahasan. Kemudian studi terdahulu kedua membahas mengenai kejahatan transnasional *drug trafficking* menggunakan *model of TOC* yang nantinya juga model tersebut digunakan penulis dalam menganalisis isu *human trafficking*.

¹⁵ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fourth Edition*, (Los Angeles: SAGE Publications, 2014).

2.2. Kerangka Teoretik

2.2.1. *Model of Transnational Organized Crime*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *model of transnational organized crime* untuk menjelaskan fenomena *human trafficking* di India. Dalam tulisannya yang berjudul *Anticipating Organized and Transnational Crime*, Phil Williams dan Roy Godson menjelaskan terdapat dua kerangka besar dalam *model of TOC* yaitu *model of conditions* dan *model of operations*. Kerangka pertama adalah *model of conditions* yang menjelaskan mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi perluasan kejahatan transnasional. Di dalamnya meliputi tiga faktor yaitu: *political models*, *economic models*, dan *social models*. Dalam *political models* dijelaskan bahwa keadaan domestik suatu negara termasuk institusi politik di dalamnya dapat berpengaruh pada munculnya serta meningkatnya kejahatan transnasional.¹⁶ Kemudian di dalam *political models*, terdapat beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan transnasional di suatu negara seperti keadaan negara yang lemah (*weak states*).¹⁷

Keadaan negara lemah mengacu pada negara yang memiliki tingkat pelembagaan aturan hukum serta legitimasi yang rendah. Legitimasi rendah muncul ketika negara tidak dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya.¹⁸ Seperti yang terjadi di negara Kolombia pada tahun 1990-an yang mana kondisi politik pada saat itu menunjukkan rendahnya tingkat legitimasi

¹⁶ Phil Williams dan Roy Godson, "Anticipating Organized and Transnational Crime", *Law & Social Change*, 2002, hlm.315.

¹⁷ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 315.

¹⁸ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 321.

karena penggunaan kekerasan dalam sistem pemerintahannya. Saat itu, pejabat pemerintah membangun relasi dengan kelompok *drug trafficking*. Keuntungan yang diperoleh melalui adanya relasi tersebut adalah pemerintah mendapat dukungan finansial untuk merealisasikan program kerja yang dimiliki. Sedangkan, keuntungan yang diperoleh kelompok kejahatan yakni memiliki akses untuk mempengaruhi penegakan hukum yang ada.¹⁹

Selanjutnya yaitu *strong regimes become weak* mengacu pada negara dengan sistem otoriter atau negara yang memiliki rezim kuat juga dapat menjadi *incubator* untuk kejahatan transnasional. Terlebih negara yang dikuasai oleh satu partai saja menjadikan kejahatan transnasional dapat berkembang dengan cepat. Meskipun tidak semua negara dengan sistem pemerintahan otoriter dikuasai *one rulling party*. Namun, di negara dengan sistem otoriter yang pemerintahannya dikuasai oleh *one rulling party* membuat kurang adanya *checks and balance* dalam pemerintahan.²⁰ Sistem *one rulling party* dalam pemerintahan justru merupakan wadah bagi munculnya korupsi seperti di Meksiko. Privatisasi sistem peradilan memungkinkan kelompok kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal mereka tanpa khawatir tertangkap dan mendapat hukuman. Hal ini dikarenakan kelompok kejahatan di Meksiko diberi perlindungan oleh elite politik asalkan aksi mereka juga menguntungkan para elite tersebut.²¹

¹⁹ Roy Godson, "Political-Criminal Nexus", *Trends in Transnational Organized Crime*, Vol. 4, Issue 3, 1997, hlm.5.

²⁰ Robert Klitgaard, "International Cooperation Against Corruption", *Finance & Development*, Vol. 35, No.1, 1998, hlm. 3-7.

²¹ Roy Godson, "Political-Criminal Nexus", hlm. 5-7.

Selanjutnya negara yang mengalami masa transisi baik secara politik maupun secara ekonomi juga dapat mempengaruhi aktivitas kejahatan transnasional. Hal ini dikarenakan belum stabilnya perekonomian negara sehingga kelompok kejahatan transnasional dapat masuk dan meluaskan kejahatannya. Kemudian kondisi lain yang dapat mempengaruhi munculnya kelompok kejahatan transnasional adalah adanya konflik etnis dalam suatu negara atau *weak states characterized by ethnic conflict or terrorist activity*.²² Munculnya konflik etnis disuatu negara dapat disebabkan oleh krisis dalam negara tersebut, sejarah yang kurang baik antar etnis yang berkonflik, adanya rasa takut, serta adanya kebencian.²³ Konflik etnis dalam suatu negara dapat mengarah pada disintegrasi negara serta memungkinkan meluasnya tindak kejahatan. Tidak stabilnya pemerintahan juga akan disertai dengan terguncangnya sistem peradilan. Kondisi yang kacau ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Kondisi terakhir dalam *political models* adalah *democratic states with high levels of legitimacy, transparency, rule of law*. Kondisi ini merujuk pada negara yang memiliki legitimasi tinggi, sistem hukum yang kuat, dan memiliki transparansi hukum. Adanya kondisi tersebut disuatu negara, bukan berarti negara tersebut bebas dari kejahatan transnasional. Hanya saja kejahatan transnasional

²² Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 321.

²³ Hilal Wani, "Transforming Ethnic Divide: Comparative Analysis of India and Nigeria", *American International Journal of Contemporary Research*, Vol.6, No. 5, 2016, hlm. 48.

akan sulit untuk berkembang karena kelompok kejahatan transnasional tidak mudah untuk bekerja sama dengan pejabat pemerintah.²⁴

Kemudian dalam *economic models* menjelaskan jika munculnya kejahatan transnational karena adanya dinamika permintaan pasar (*market dynamics*) dan *enterprise model* yang melihat bagaimana kelompok kejahatan transnasional akan mencari strategi untuk dapat memaksimalkan keuntungan dari kejahatan yang mereka lakukan. Pada *market dynamics*, melihat TOC dari *supply* dan *demand* baik dalam pasar gelap global maupun lokal.²⁵ Pasar gelap merujuk pada tempat maupun situasi pertukaran barang dan jasa yang produksi, pemasaran, maupun konsumsinya dilarang oleh negara karena barang dan jasa tersebut merupakan sesuatu yang ilegal.²⁶ Aktivitas yang terjadi dipasar gelap meliputi: perdagangan obat terlarang dan eksploitasi seksual, memperjualbelikan hewan maupun tanaman yang dilindungi pemerintah, komoditas yang memiliki pajak berbeda-beda di setiap negara seperti rokok, dan barang-barang curian.²⁷ Dalam kasus *human trafficking*, permintaan paling banyak muncul di industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja murah.

Selain itu, bentuk lain dari *human trafficking* yang paling banyak adalah eksploitasi seksual. Meski kelompok kriminal merupakan pemain kunci dalam pasar gelap, namun terdapat partisipan lain yang juga turut terlibat. Dalam *human trafficking* meliputi: kelompok kriminal yang memfasilitasi serta mempekerjakan

²⁴ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 321.

²⁵ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 322.

²⁶ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 322.

²⁷ Phil Williams, "Crime, Illicit Market, and Money Laundering", diakses dari https://www.researchgate.net/publication/237597217_Crime_Illicit_Markets_and_Money_Launde ring pada 16 Maret 2019

korban; selain itu terdapat *brokers* dan agensi yang melakukan perekrutan; aktor lain yang membantu dalam memalsukan dokumen; dan pejabat korup yang mengeksploitasi korban *trafficking*.²⁸ Selanjutnya dalam *economic models* terdapat *enterprise model* yang menjelaskan bahwa kelompok kejahatan transnasional akan bertindak sama halnya dengan perusahaan yang menjual barang legal. Seperti mencari cara agar dapat memaksimalkan keuntungan serta meminimalisir pajak.

Biasanya untuk melindungi aset mereka, kelompok kriminal akan menembus bisnis legal atau bisnis yang berlisensi. Tujuannya selain untuk sebagai kedok juga dapat digunakan sebagai sarana legitimasi.²⁹ Barang ilegal bukan satu-satunya komoditas yang dapat di perjualbelikan. Dalam beberapa kasus, barang yang menjadi komoditas perdagangan ilegal justru berasal dari barang legal seperti rokok. Namun, karena adanya perbedaan kebijakan pajak di negara satu dengan negara lain membuat kelompok kejahatan memperdagangkan secara ilegal barang tersebut dengan cara menyelundupkan melalui perbatasan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh warga Amerika-India yang menyelundupkan rokok di perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada.³⁰

Selain *political* dan *economic models* terdapat pula *social models* yang berbeda dengan kedua model sebelumnya. Model ini lebih melihat faktor budaya dalam kejahatan transnasional seperti struktur kejahatan yang dibangun dari

²⁸ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 324.

²⁹ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 327.

³⁰ Williams, "Crime, Illicit Market", hlm. 111.

mekanisme ikatan dan kepercayaan terhadap satu sama lain.³¹ Dalam *social models* terdapat *cultural model* yang melihat bahwasannya hubungan kekeluargaan dalam struktur kelompok kejahatan merupakan hal penting sebagai fondasi dasar kelompok tersebut.³² Tak jarang suatu kelompok kejahatan transnasional mempertimbangkan faktor kedekatan secara kekeluargaan ketika merekrut anggotanya. Hal ini dilakukan karena jika memiliki budaya serta bahasa yang sama akan mempermudah komunikasi dalam kelompok. Alasan lainnya yakni dengan adanya persamaan budaya dan bahasa membuat kelompok kejahatan sulit ditembus oleh orang luar.³³

Kemudian terdapat pula *the ethnic network model* yang mengacu pada diaspora sebuah etnis. Diaspora ini bisanya dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan transnasional untuk merekrut anggota terlebih yang berstatus sebagai imigran karena akan lebih mudah untuk berpindah lintas batas negara.³⁴ Alasan lainnya karena imigran biasanya teralienasi di masyarakat yang baru serta memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat mereka mudah untuk diajak bergabung. Contohnya adalah *criminal gangs* atau disebut dengan tongs yang terdiri dari diaspora etnis Cina yang tinggal di Amerika. Pada tahun 1978, Tongs ini dikenal sebagai penyedia opium juga terlibat dalam *human trafficking*

³¹ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 328.

³² Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 328.

³³ Williams, "Crime, Illicit Market", hlm. 110.

³⁴ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 334.

menuju Amerika. Pemerintah Amerika menganggap tongs sebagai kelompok kejahatan terorganisasi karena terlibat dalam kejahatan transnasional.³⁵

Selanjutnya, ada *the social network model* yang menekankan pada *patron-client relation*. Yakni hubungan yang terjalin antara kelompok kejahatan dengan pejabat pemerintah.³⁶ Kelompok kejahatan tersebut ingin mendapat perlindungan dari pemerintah agar kejahatannya dapat tertutupi. Sebagai gantinya, mereka akan memberikan dukungan politik serta finansial yang diperlukan.³⁷ Hubungan *political-criminal nexus* seperti ini terjadi antara *Partido Revolucionario Institucional* (PRI) yaitu partai penguasa di Meksiko tahun 1929 dengan *Mexican Drug Traffickers*. Kelompok kejahatan tersebut menjadi penyokong dana untuk memperkaya para elit. Keuntungan yang diperoleh kelompok kejahatan adalah impunitas atau bebas dari tuntutan hukum.³⁸ Selain itu, *social network model* juga berorientasi pada fleksibilitas dan kemampuan untuk bergerak secara lintas batas.³⁹ Keuntungan beroperasi dalam suatu jaringan adalah adanya transfer informasi yang cepat, dapat meluaskan aktivitas kriminal dan mudah merespon adanya peluang dalam pasar gelap.⁴⁰

Kerangka kedua dari *model of TOC* adalah *model of operation*. Model ini digunakan untuk menjelaskan kelompok kejahatan transnasional dalam melakukan aksinya. Di bawah kerangka *model of operation* terdapat dua model

³⁵ Ko-Lin Chin dan Roy Godson, "Organized Crime and the Political-Criminal Nexus in China", *Trends in Organized Crime*, Vol. 9, No. 3, 2006, hlm. 21.

³⁶ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 333.

³⁷ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 333.

³⁸ Pimentel, "The Nexus of Organized Crime", hlm. 9-14.

³⁹ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 336.

⁴⁰ Vy Le, "Organised Crime Typologies: Structure, Activities and Conditions, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol.1, 2012, hlm. 121.

yaitu: *strategic or risk management model* dan *hybrid or composite models*. *Strategic or risk management model* melihat bagaimana strategi yang digunakan oleh kelompok kejahatan transnasional dalam melakukan aktivitas kriminalnya. Strategi yang dimaksud bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, melainkan juga untuk meminimalkan resiko penangkapan.⁴¹ Strategi yang dibentuk bisa berupa pemisahan organisasi.⁴² Dalam struktur kelompok kejahatan biasanya anggota yang direkrut tidak mengetahui secara detail mengenai pemimpin mereka sehingga ketika salah satu anggota tertangkap maka, anggota tersebut tidak dapat memberitahukan mengenai hierarki kelompok secara lengkap karena terbatasnya informasi yang dimiliki.

Terdapat tiga tindakan yang dapat dimasukkan dalam *strategic or risk management model* yakni; pertama, tindakan *initiatives* yang dirancang untuk membentuk lingkungan tempat organisasi kejahatan beroperasi seaman mungkin sehingga dapat meminimalkan resiko kecurigaan dari pihak berwajib. Lingkungan aman yang dimaksud merupakan tempat hasil kejahatan disembunyikan yang biasanya relatif aman dari perampasan dan penyitaan. Kedua, tindakan *defensive* yang merujuk pada upaya pertahanan oleh kelompok kejahatan agar dapat mengendalikan resiko yang dimiliki. Ketiga, langkah-langkah (*measures*) yang dirancang untuk memastikan bahwa kelompok kejahatan memiliki ketahanan sebagai kelompok meski di dalam lingkungan yang tidak menguntungkan.⁴³

⁴¹ Ernesto U. Savona, "Harmonising Policies for Reducing The Transnational Organised Crime Risk Transcrime", *Working Paper*, No. 2, 1995.

⁴² Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 336.

⁴³ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 336-337.

Model kedua dalam *model of operations* yaitu *hybrid or composite models* yang didalamnya dibagi menjadi dua bagian yaitu *transnational organized crime* dan *transsiphment model*. Pertama yaitu *transnational organized crime* mengkombinasikan faktor politik, ekonomi, sosial, serta strategi yang digunakan untuk beroperasi di negara asal. Dalam model ini terdapat tiga karakteristik meliputi: kesempatan, motivasi, dan sumber daya.

Karakteristik pertama yakni kesempatan. Pada level global, kemunculan ‘*global village*’ yang mengacu pada kemajuan sistem keuangan, sistem pasar bebas, serta kemudahan akses informasi, komunikasi dan transportasi membuka peluang munculnya kelompok kejahatan transnasional.⁴⁴ Adanya *global village* dapat dikaitkan dengan globalisasi yang membantu perkembangan transfer barang dan jasa antar negara dengan mudah. Semakin terintegrasinya ekonomi dunia, memungkinkan *human trafficking* untuk tumbuh pesat.⁴⁵ Sedangkan, pada level nasional, keadaan negara yang lemah baik pemerintahan maupun lembaga hukumnya membuat kelompok kejahatan transnasional dapat berkembang di negara tersebut.⁴⁶

Kemudian karakteristik kedua yakni motivasi. Munculnya kelompok kejahatan transnasional tidak terlepas dari adanya *demand* dalam dinamika pasar yang membuat kelompok tersebut menyuplai *illicit products* dalam jumlah besar. Motivasi lainnya berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas

⁴⁴ Williams dan Godson, “Anticipating Organized”, hlm. 340.

⁴⁵ Devin Brewer, “Globalization and Human Trafficking”, diakses dari <https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.pdf> pada 8 Maret 2019

⁴⁶ Williams dan Godson, “Anticipating Organized”, hlm. 340.

ilegal tersebut.⁴⁷ Selain insentif, motivasi lainnya yang dapat memunculkan kelompok kejahatan transnasional adalah adanya tekanan seperti kemiskinan. Di India, tingginya angka korban *bonded labour* tidak terlepas dari kemiskinan di daerah-daerah marjinal. Sehingga membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut rentan terlibat dalam kerja paksa di industri-industri di India.⁴⁸

Bentuk tekanan lainnya adalah ketidakstabilan ekonomi di suatu negara membuat industri yang memproduksi barang legal akhirnya beralih menjadi produsen barang ilegal. Hal ini juga dapat menjadi motivasi adanya kelompok kejahatan transnasional.⁴⁹ Karakteristik ketiga adalah sumber daya berupa kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh kelompok kejahatan transnasional agar dapat menjalankan aksinya. Pada level global, *ethnic network* merupakan sumber daya yang penting bagi kelompok kejahatan transnasional. Sedangkan, pada level nasional pengaruh budaya seperti masyarakat yang terbiasa dengan lingkungan korup maupun penggunaan kekerasan dapat mempengaruhi kelompok kejahatan transnasional.⁵⁰

Model kedua dalam *hybrid or composite model* adalah *transshipment model* mengacu pada perilaku kelompok kejahatan transnasional memilih negara yang dapat dengan mudah dijadikan tempat transit untuk mencapai negara tujuan kejahatan tersebut akan dilakukan.⁵¹ Menurut Richard Friman negara berpotensi menjadi negara transit karena negara tersebut menyediakan kemudahan akses bagi

⁴⁷ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 340.

⁴⁸ Majeed A. Rahman, "Human Trafficking in the Era of Globalization: The Case of Trafficking in the Global Market Economy", *Transcience Journal*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 59-60.

⁴⁹ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 341.

⁵⁰ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 341.

⁵¹ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 347.

kelompok yang terlibat kejahatan transnasional menuju negara tujuan.⁵² Biasanya negara yang dijadikan sebagai tempat transit memiliki tingkat kontrol perbatasan yang rendah sehingga dapat mudah dimasuki oleh kelompok tersebut.

2.2.2. *Human Trafficking*

Human Trafficking atau perdagangan manusia menjadi bentuk kejahatan terorganisir terbesar ketiga setelah *arms* dan *drugs trafficking*.⁵³ *Human trafficking* dijelaskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Article 3 (a)*, yaitu perekrutan, pengiriman, penyimpanan, dan penerimaan manusia dengan cara pemaksaan dan ancaman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima bayaran agar mencapai kesepakatan untuk dapat menguasai manusia lain dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut.⁵⁴ Pada dasarnya, *human trafficking* berarti memperjualbelikan manusia sebagai komoditas untuk dieksploitasi ditempat tujuan.

Adanya *human trafficking* dipengaruhi oleh *push* dan *pull factors*. *Push factors* atau faktor pendorong munculnya *human trafficking* dipengaruhi oleh kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kejahatan *human trafficking*, adanya kekerasan yang menjadi budaya di masyarakat.⁵⁵ Sedangkan, *pull factors* atau faktor penarik korban *trafficking* biasanya karena diberikan janji-janji oleh para *traffickers*

⁵² Richard Friman, "Just Passing Through: Transit States and The Dynamics of Illicit Transshipment", *Transnational Organized Crime Journal*, Vol.1, No.1, 1995, hlm.65-83.

⁵³ UNODC, *Human Trafficking*, diakses dari <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html> pada 23 Juli 2019

⁵⁴ UNODC, *Human Trafficking*.

⁵⁵ Vimal Vidushy, "Human Trafficking in India".

seperti janji mendapat pekerjaan atau janji akan mendapatkan banyak uang. Selain itu, tingginya permintaan akan *sex trafficking* di tempat-tempat pariwisata dan permintaan terhadap buruh murah di industri-industri di India juga turut menjadi faktor penarik banyaknya korban *human trafficking*.⁵⁶

2.3. Definisi Konseptual

2.3.1. *Model of Conditions*

Model of conditions merupakan kerangka pertama dalam *model of transnational organized crime* milik Williams dan Godson. Model tersebut menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta mempengaruhi perluasan kejahatan transnasional. Faktor-faktor yang dimaksud terdiri atas *political models*, *economic models*, dan *social models*. Masing-masing faktor memiliki beberapa parameter lagi didalamnya.

2.3.1.1. *Political Models*

Telah dijelaskan sebelumnya jika di dalam *model of conditions* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kejahatan transnasional. Faktor pertama yaitu *political models* yang didalamnya terdapat 4 parameter meliputi *weak states*, *strong regimes become weak*, *weak states characterized by ethnic conflict or terrorist activity*, dan *democratic states with high levels of legitimacy*. Keadaan negara lemah mengacu pada negara yang

⁵⁶ Vimal Vidushy, "Human Trafficking in India".

tingkat pengaturan hukum serta legitimasinya rendah ditambah dengan keadaan korupsi di negara tersebut.

Selanjutnya *strong regimes become weak* mengacu pada negara yang memiliki rezim kuat yang dapat menjadi tempat untuk kejahatan transnasional muncul dan berkembang. Selanjutnya *weak states characterized by ethic conflict or terrorist activity* merupakan kondisi negara yang rentan terhadap etnis konflik maupun teroris juga dapat menjadi wadah bagi kejahatan transnasional. Dan *democratic states with high levels of legitimacy* yakni negara dengan legitimasi tinggi serta transparansi hukum belum tentu dapat terhindar dari adanya kejahatan transnasional.

2.3.1.2. Economic Models

Kemudian faktor kedua dalam *model of conditions* adalah *economic models*. Terdapat dua parameter dalam *economic models* dalam melihat kejahatan transnasional yakni melalui dinamika pasar atau *market dynamics* dan *enterprise model*. Dinamika pasar merujuk pada adanya *supply* dan *demand* dalam pasar gelap terkait kejahatan transnasional. Sedangkan, *enterprise model* lebih melihat kejahatan transnasional dari sisi bisnis daripada sisi kriminalnya. Sehingga aktor dari kejahatan transnasional dinilai sebagai aktor yang rasional karena kejahatan yang dilakukan dilihat dari segi bisnis yang berorientasi pada keuntungan.

2.3.1.3. *Social Models*

Faktor ketiga dalam *model of conditions* adalah *social models* yang memiliki tiga parameter didalamnya meliputi *cultural model*, *the ethnic network model*, dan *the social network model*. *Cultural model* melihat bahwasanya kekeluargaan dan kepercayaan merupakan fondasi penting bagi kelompok kejahatan transnasional. Sedangkan, *ethnic network model* mengacu pada diaspora sebuah etnis yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan transnasional untuk merekrut anggota. Terakhir adalah *social network model* yang melihat adanya korelasi antara kelompok kejahatan transnasional dengan pejabat pemerintah yang korup.

2.3.2. *Human Trafficking*

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya *human trafficking* merupakan kejahatan transnasional yang muncul karena adanya *push* dan *pull factors* yang mempengaruhi. *Push factors* yang dimaksud seperti keadaan ekonomi masyarakat yang buruk, tingkat kemiskinan tinggi, serta kurangnya pendidikan terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran. Sedangkan, untuk *pull factors* meliputi dijanjikan mendapat pekerjaan oleh *traffickers*, dijanjikan mendapat uang dengan cepat, adanya permintaan prostitusi terutama di daerah-daerah pariwisata, dan adanya permintaan terhadap buruh murah bagi industri-industri di negara tempat human trafficking tersebut berada.

2.4. Definisi Operasionalisasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam *model of transnational organized crime* terdapat dua kerangka besar yaitu *model of conditions* dan *model of operation*. Namun, dari kedua kerangka tersebut, penulis memilih salah satu model yakni *model of conditions* untuk digunakan dalam penelitian ini. Penulis memilih hanya menggunakan *model of conditions* karena terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah India untuk melawan *human trafficking*, penulis ingin melihat bagaimana faktor-faktor internal seperti politik, ekonomi dan sosial di India dapat mempengaruhi *human trafficking* di India.

Model of conditions dalam model of TOC dapat dioperasionalkan dengan melihat bagaimana keadaan negara India jika dilihat dari keadaan politik, ekonomi dan sosial. Melalui *political models*, penulis akan mengoperasionalkan faktor-faktor dalam *political models* dengan melihat pada kondisi politik di India. Keadaan negara yang lemah (*weak states*) karena rendahnya legitimasi serta kurangnya penegakan hukum juga tingkat korupsi yang tinggi membuat India masih rentan terhadap *human trafficking*. Selain itu, penulis juga akan melihat apakah sistem pemerintahan di India dikuasai oleh satu partai tertentu atau *one ruling party*.

Serta penulis juga akan melihat apakah ada konflik etnis di India yang membuat kejahatan transnasional berkembang disana. Melalui *political models* ini, penulis juga akan melihat upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah India untuk melawan *human trafficking*. Penulis akan menganalisis bagaimana

penegakan hukum di India terkait *human trafficking*. Selain itu, penulis juga menganalisis tingkat korupsi di India, apakah ada kaitannya dengan *human trafficking* disana.

Selanjutnya, melalui *economic models* penulis ingin melihat bagaimana kondisi kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah khususnya pada wanita dan anak-anak menyebabkan mereka menjadi korban *trafficking*. Mereka yang menjadi korban *trafficking* ini dikirim baik ke luar maupun di dalam negeri. Melalui model ini, penulis ingin menganalisis adanya dinamika permintaan pasar atau *market dynamics* dari *human trafficking* itu sendiri di India. Adanya permintaan dari industri pertanian maupun industri lain yang membutuhkan tenaga kerja murah di India, membuat kelompok kejahatan transnasional ingin memenuhi permintaan tersebut. Biasanya para korban berhasil dibujuk oleh para *traffickers* dengan janji akan diberi pekerjaan. Selain itu, *sexual exploitation* juga menjadi bentuk *human trafficking* yang banyak terjadi di India khususnya di sektor pariwisata.

Jika dilihat dari *social models*, penulis akan menganalisis faktor-faktor dalam *social models* yang ada dengan kondisi sosial di India yang mempengaruhi *human trafficking* disana. Kondisi sosial tersebut dilihat dari ada tidaknya budaya tidak taat hukum seperti budaya melakukan suap kepada pihak berwenang untuk menutupi kejahatan yang dilakukan. Selain itu, apakah ada kelompok imigran yang turut berperan terlibat dalam jaringan *human trafficking* di India sehingga menyebabkan munculan berkembangnya isu tersebut. Terlebih di India yang menjadi korban *trafficking* bukan hanya dari masyarakat lokal yang tinggal di

daerah marginal, melainkan juga berasal dari negara tetangga seperti Bangladesh dan Nepal. Beberapa dari mereka datang ke India dengan alasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik namun justru menjadi korban *trafficking*.

Selain, itu penulis juga melihat bagaimana *push factors* seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta *pull factors* seperti permintaan akan *sex trafficking* dan permintaan buruh murah di industri-industri di India berdampak pada muncul serta berkembangnya *human trafficking* di India. Penulis juga melihat pendekatan yang digunakan oleh *traffickers* seperti memberikan janji akan mendapat pekerjaan atau janji akan mendapatkan uang juga berpengaruh pada penjangkaran korban *trafficking* oleh para *traffickers*.

2.5. Tabel Operasionalisasi

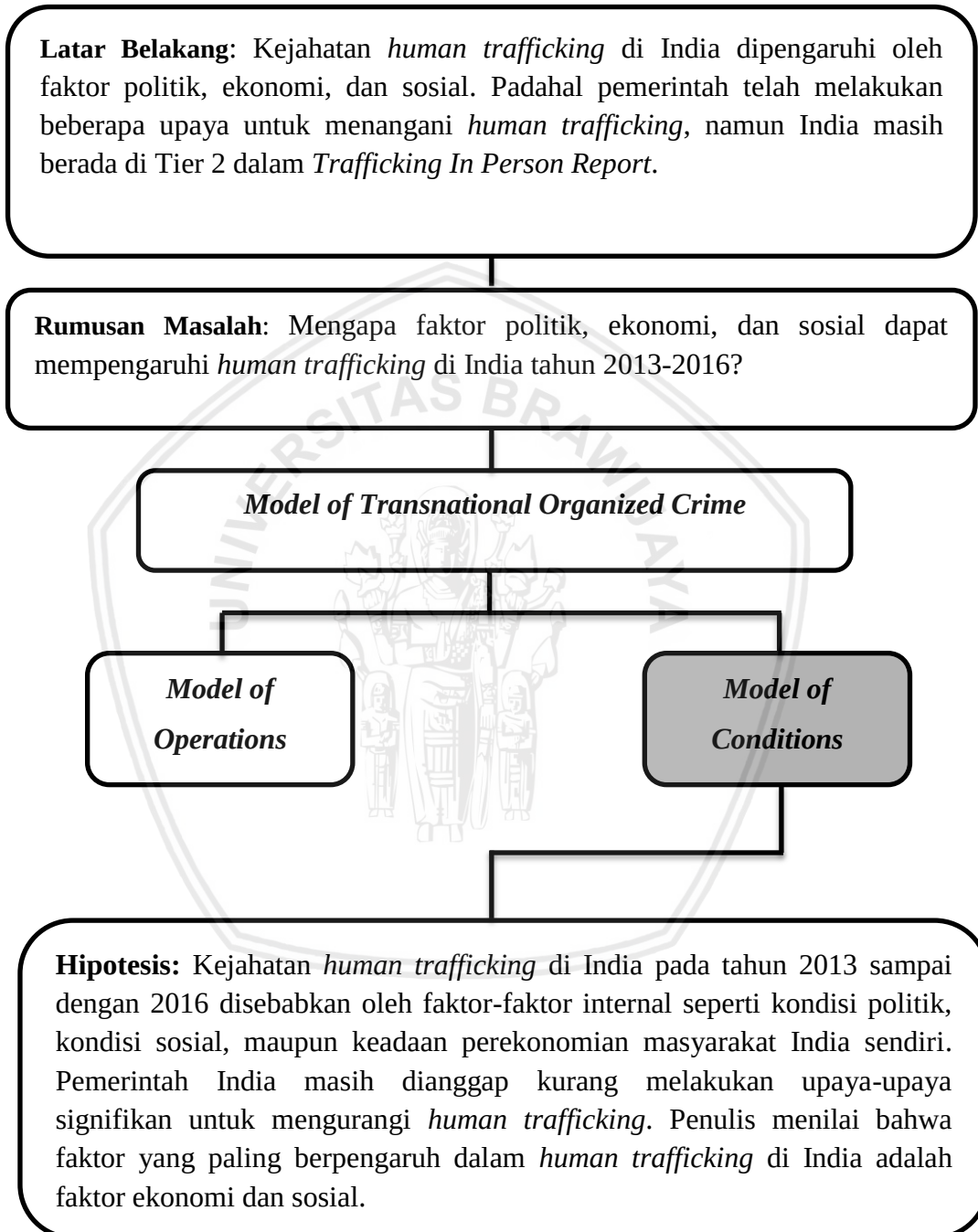
Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Model of Conditions</i>	<i>Political Models</i>	<i>Weak States</i>	Melihat bagaimana tingkat pelembagaan hukum di India terkait <i>human trafficking</i> serta ada atau tidaknya praktik korupsi yang berpengaruh pada <i>human trafficking</i> disana
		<i>Strong Regimes Becomes Weak</i>	Ada atau tidaknya <i>one rulling party</i> dalam sistem pemerintahan India yang dapat berpengaruh terhadap <i>human trafficking</i> disana
		<i>Weak States Characterized by Ethic Conflict or Terrorist Activity</i>	Ada atau tidaknya konflik etnis di India yang dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan transnasional untuk menjangkarkan korban <i>trafficking</i>
		<i>Democratic States With High Levels of</i>	Melihat apakah India merupakan negara dengan

	<i>Economic Models</i>	<i>Legitimacy</i>	transparansi hukum dan memiliki legitimasi yang tinggi
		<i>Market Dynamics</i>	Ada atau tidaknya dinamika pasar meliputi <i>supply</i> dan <i>demand</i> terkait <i>human trafficking</i> di India
		<i>Enterprise Model</i>	Melihat bagaimana kelompok kejahatan transnasional melihat <i>human trafficking</i> di India sebagai bisnis daripada kejahatan
	<i>Social Models</i>	<i>Cultural Model</i>	Ada atau tidaknya keterlibatan anggota keluarga korban dengan praktik <i>human trafficking</i> di India
		<i>Ethnic Network Model</i>	Ada atau tidaknya keterlibatan etnis lain dalam <i>human trafficking</i> di India
		<i>Social Network Model</i>	Ada atau tidaknya hubungan antara pejabat pemerintah yang korup dengan kelompok kejahatan transnasional seperti tindak penyuapan yang dilakukan kepada pihak berwenang untuk menutupi kejahatan yang dilakukan
<i>Human Trafficking</i>	<i>Push Factors</i>	<i>Poverty</i>	Melihat bagaimana kondisi kemiskinan di India menjadi faktor pendorong adanya <i>human trafficking</i> di India
		<i>Lack of Education</i>	Melihat bagaimana kondisi masyarakat terutama di daerah pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dengan mudah dapat dijadikan target <i>trafficking</i> oleh para <i>traffickers</i>
	<i>Pull Factors</i>	<i>False Promises</i>	Ada atau tidaknya janji-janji palsu yang diberikan oleh <i>trafficker</i> seperti janji mendapat pekerjaan atau janji mendapatkan uang kepada korban <i>trafficking</i>
		<i>Demand Sex Trafficking</i>	Ada atau tidaknya permintaan terhadap <i>sex trafficking</i> di

			India
		<i>Demand Forced Labour</i>	Ada atau tidaknya permintaan terhadap pekerja murah dari industri-industri di India yang membuat <i>traffickers</i> berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut



2.6. Alur Pemikiran



2.7. Hipotesis

Peringkat India stabil berada di Tier 2 dalam *Trafficking in Person Report* dari tahun 2010 hingga 2016. Meski pemerintah India telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi *human trafficking*, tetapi kasus *human trafficking* di India masih tergolong tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *human trafficking* di India adalah politik, ekonomi, dan sosial. Penulis menilai bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi yakni adanya *supply* dan *demand* dalam *human trafficking* dan faktor sosial seperti adanya hubungan antara keluarga korban *trafficking* dengan *traffickers*, pengaruh diaspora etnis lain, dan adanya keterkaitan antara pejabat publik yang korup dengan *traffickers*. Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut berkaitan dekat dengan kehidupan masyarakat India dan berpengaruh pada *human trafficking* di India.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi mengenai beberapa hal yang penulis akan jelaskan diantaranya; jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Dalam jenis penelitian, penulis akan menjelaskan termasuk kedalam jenis penelitian apa yang penulis lakukan. Kemudian terdapat ruang lingkup yang memberikan batasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data yang menjelaskan cara penulis mendapatkan data untuk penelitian. Kemudian terdapat teknik analisis data yang menjelaskan metode apa yang digunakan penulis dalam melakukan analisis data dalam penelitian dan terdapat pula sistematika penulisan.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif berarti penulis menjelaskan jawaban atas rumusan masalah yang dimiliki penulis.⁵⁷ Penelitian penulis ini menggunakan data kualitatif yaitu kumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen dan bersifat *non-numeric*.⁵⁸

⁵⁷ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 308.

⁵⁸ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations* (London: SAGE Publications, 2015).

3.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian memberikan batasan mengenai objek yang diteliti oleh penulis sehingga membantu penulis untuk tetap fokus dan tidak terjadi perluasan isu. Pada penelitian ini, objek yang dibahas oleh penulis mengenai kejahatan perdagangan manusia di India pada tahun 2013-2016. Tahun 2013 hingga 2016 dipilih penulis karena pada rentang tahun tersebut terdapat dinamika faktor politik, ekonomi, dan sosial seperti amandemen IPC terkait *human trafficking* dan terdapat implementasi terkait bebas visa.

Dalam penelitian ini, penulis melihat pada sisi kejahatan *human trafficking* di India. Penulis menganalisis fenomena tersebut menggunakan salah satu model dalam *model of transnational organized crime* yaitu *model of conditions* yang melihat pada faktor politik, ekonomi dan sosial. Sehingga dalam penelitian ini, hanya model tersebut yang digunakan penulis untuk menganalisis kasus *human trafficking* di India.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan *document-based research* yaitu strategi mengumpulkan data dari dokumen seperti: perjanjian, pernyataan resmi pemerintah suatu negara, laporan yang dikeluarkan oleh organisasi tertentu, dan lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan *internet-based research* yakni data yang diperoleh

dari internet seperti jurnal *online* dan berita-berita *online*.⁵⁹ Tentunya sumber *online* yang digunakan oleh penulis berasal dari sumber yang terpercaya. Sumber lain yang digunakan yaitu buku-buku untuk mendukung penelitian penulis. Penulis juga menggunakan data visual berupa gambar maupun tabel statistik yang dapat menunjang penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dengan metode *discourse analysis*. Metode *discourse analysis* ini digunakan untuk membatasi pemilihan bacaan agar data yang diperoleh dari bacaan sesuai dengan penelitian.⁶⁰ Penulis memilih teknik analisis data tersebut karena penulis melakukan interpretasi terhadap data yang penulis pilih. Data berupa dokumen resmi dari pemerintah, laporan dari suatu organisasi, maupun berita online yang penulis dapatkan kemudian penulis olah dalam penelitian ini.

3.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, berisikan mengenai latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian ini. Penulis menjelaskan *human trafficking* secara

⁵⁹ Lamont, *Research Methods in International Relations*.

⁶⁰ Iver B. Neumann, *Discourse Analysis* dalam Audie Klotz and Deepa Prakash, *Qualitative Methods in International Relation: A Pluralist Guide* (New York: Palgrave MacMillan, 2008), hlm. 62-63.

global terlebih dahulu kemudian lebih khusus nya merujuk pada satu negara yakni India. Selain itu, dalam bab ini, penulis juga terdapat rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang sebelumnya serta terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB II Kerangka Pemikiran

Pada bab ini, berisi mengenai kerangka pemikiran penulis dimulai dari studi terdahulu selanjutnya penjelasan mengenai model yang digunakan penulis untuk menganalisis kasus. Kemudian, terdapat definisi konseptual mengenai *model of conditions* dan *human trafficking*. Setelahnya terdapat definisi operasionalisasi beserta tabel operasionalisasi. Selain itu pada bab ini, penulis juga mencantumkan hipotesis serta alur pemikiran penulis.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, berisi tentang metode serta jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dan sistematika penulisan.

Bab IV Gambaran Umum

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran mengenai isu atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis menggambarkan mengenai bagaimana *human trafficking* yang merupakan aktivitas ilegal

sebagai salah satu bentuk *transnational organized crime* yang mengancam keamanan kawasan serta negara tempat terjadinya kejahatan tersebut dilakukan. Penulis menjelaskan *human trafficking* di Kawasan Asia Selatan terlebih dahulu kemudian menjelaskan *human trafficking* di India.

Bab V Analisis Kejahatan *Human Trafficking* di India dengan Model of TOC

Pada bab ini, berisi mengenai penjelasan yang diberikan penulis mengenai analisis kejahatan *human trafficking* di India menggunakan model yang ditawarkan oleh Phil Williams dan Roy Godson yaitu *model of Transnational Orgaized Crime*. Namun, penulis hanya menggunakan *model of condition* dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh faktor politik, ekonomi, dan sosial terhadap *human trafficking* di India.

Bab VI Kesimpulan

Pada bab ini, berisi mengenai kesimpulan atau hasil yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Kesimpulan ini akan menunjukkan apakah hipotesis yang dimiliki penulis di awal sesuai dengan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, bab ini juga berisikan rekomendasi saran serta kritik untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM *HUMAN TRAFFICKING*

DI KAWASAN ASIA SELATAN DAN INDIA

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai aktivitas *human trafficking* sebagai salah satu bentuk dari kejahatan transnasional. Penulis terlebih dahulu secara singkat menjelaskan fenomena *human trafficking* yang merupakan bagian dari *transnational organized crime*. Kemudian penulis menjelaskan *human trafficking* pada lingkup kawasan Asia Selatan. Negara-negara di kawasan Asia Selatan dikenal sebagai tempat sumber dari kejahatan *human trafficking* baik yang ada di dalam negeri maupun dikirim ke luar negeri. Banyak dari *korban trafficking* yang berada di negara lain merupakan orang-orang yang berasal dari negara-negara di Kawasan Asia Selatan. Kemudian penulis akan menjelaskan *human trafficking* secara spesifik di India. Sebagai salah satu negara yang berada di Kawasan Asia Selatan, India juga termasuk negara dengan kasus *human trafficking* yang tinggi.

4.1. *Human Trafficking Sebagai Transnational Organized Crime*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu organisasi dunia yang bergerak untuk mengatasi kejahatan transnasional. PBB membentuk *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau disebut juga Konvensi Palermo pada tahun 2000 yang merupakan perjanjian multilateral untuk melawan TOC. Kemudian Konvensi ini menjadi kerangka legal

untuk menangani TOC dibawah naungan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC).⁶¹ Dalam Konvensi Palermo menjelaskan jika yang dimaksud dengan kelompok kejahatan terorganisasi adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih. Mereka bertindak secara bersama-sama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan serius untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya.⁶²

Konvensi Palermo juga menjelaskan sebuah kejahatan bersifat transnasional jika memenuhi kriteria berikut: pertama, dilakukan di lebih dari satu negara; kedua, dilakukan di satu negara namun perencanaan, persiapan, dan pengawasannya dilakukan di negara lain; ketiga, kejahatan dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kejahatan tertentu yang terlibat aksi kriminal di lebih dari satu negara; keempat, kejahatan dilakukan di satu negara tapi memiliki dampak bagi negara lain.⁶³ *Human trafficking* termasuk dalam TOC karena kejahatan dilakukan secara lintas batas yang mana tidak hanya terjadi di satu negara. Korban dari *human trafficking* bisa berasal dari satu negara kemudian diperdagangkan ke negara lain oleh para *traffickers*. Selain itu, *human trafficking* juga kejahatan yang berorientasi pada keuntungan.⁶⁴

⁶¹ UNODC, "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto", diakses dari <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf> pada 8 Mei 2019

⁶² Bruce A. Forster, "Human Trafficking: A Transnational Organized Criminal Activity", *American International Journal of Contemporary Research*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 1.

⁶³ Forster, "Human Trafficking: A Transnational Organized".

⁶⁴ UNITAR, "Human Trafficking and the Role of Local Governments", diakses dari https://www.unitar.org/dcp/sites/unitar.org.dcp/files/uploads/newcoverhuman_trafficking_final.compressed.compressed.pdf pada 23 Mei 2019

Human trafficking sering dikaitkan dengan *people smuggling* padahal keduanya merupakan kejahatan yang berbeda. Kerangka hukum keduanya juga berbeda. Kejahatan *human trafficking* diatur dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Sedangkan, *people smuggling* diatur dalam *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*.⁶⁵ Berdasarkan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*, definisi dari *people smuggling* adalah masuknya seseorang secara ilegal ke suatu negara yang mana seseorang itu bukanlah warga negara maupun penduduk tetap di negara tersebut.⁶⁶

Perbedaan antara *human trafficking* dan *people smuggling* diantaranya ialah; dalam *human trafficking*, terdapat penggunaan paksaan serta tidak ada persetujuan (*consent*) yang diberikan korban. Sedangkan, dalam *people smuggling* tidak melibatkan paksaan karena orang yang terlibat penyelundupan bersifat sukarela atau sadar dengan aksi yang mereka lakukan. Selain itu, *human trafficking* adalah kejahatan terhadap negara karena dalam *human trafficking* melibatkan korupsi, penghindaran pajak, penyuapan pejabat publik dan pemalsuan dokumen. Selain itu, *human trafficking* juga kejahatan terhadap individu karena tujuan eksploitasi kepada korban.⁶⁷ Sedangkan, *people smuggling* merupakan kejahatan terhadap negara karena telah memasuki teritorial negara tersebut secara ilegal. Perbedaan lainnya yakni *human trafficking* tidak hanya terjadi secara lintas

⁶⁵ UNODC, "Trafficking in Persons and Migrants Smuggling", diakses dari <https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/trafico-de-pessoas/index.html> pada 23 Mei 2019

⁶⁶ UNITAR, "Human Trafficking and the Role of Local Governments", hlm. 13.

⁶⁷ Jacquelyn Meshelemiah dan Siddhartha Sarkar, "A Comparative Study of Child Trafficking in India and the United States", *Journal of Trafficking, Organized Crime, and Security*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 128.

batas, namun juga secara domestik. Sedangkan, *people smuggling* bersifat transnasional.⁶⁸

Human trafficking dilihat oleh kelompok kejahatan transnasional sebagai jenis kriminal menguntungkan dan kurang berisiko daripada jenis kejahatan lainnya. Adanya permintaan yang tinggi di seluruh dunia, tidak hanya untuk perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan, melainkan juga laki-laki sebagai pekerja seks maupun buruh murah.⁶⁹ *Human trafficking* menjadi kejahatan transnasional terbesar kedua setelah *drug trafficking*. Negara yang awalnya menjadi sumber *human trafficking* dapat berubah menjadi negara tujuan. Biasanya korban *trafficking* berasal dari negara miskin yang dijual menuju negara kaya dengan alasan utama yang berkaitan dengan ekonomi.⁷⁰

Adanya globalisasi memfasilitasi perpindahan korban *trafficking* menuju tempat tujuan yang jauh dari negara asal mereka. Seperti korban *trafficking* dari negara Asia yang dijual menuju negara di kawasan Eropa atau Timur Tengah, atau korban yang berasal dari Nigeria paling banyak dikirim menuju Italia. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi memberikan kemudahan bagi kelompok kejahatan transnasional untuk memenuhi permintaan terhadap *human trafficking*.⁷¹ Selain itu, *human trafficking* tidak hanya terjadi secara lintas

⁶⁸ UNODC, "Trafficking in Persons and Migrants Smuggling"

⁶⁹ Francis T. Miko, *International Human Trafficking* dalam Kimberley L. Thachuk, *Transnational Threats: Smuggling and Trafficking in Arms, Drugs, and Human Life* (London: Praeger Security Internasional, 2007), hlm. 39.

⁷⁰ John T. Picarelli, *Transnational Organized Crime* dalam Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction* (New York: Routledge, 2008), hlm. 458.

⁷¹ Louise Shelley, *International Trafficking: An Important Component of Transnational Crime* dalam Shiro Okubo dan Louise Shelley, *Human Security, Transnational Crime, and Human Trafficking* (New York: Routledge, 2011), hlm 137-138.

batas namun juga di dalam batas negara.⁷² Hal ini menjadikan *human trafficking* bukan hanya ancaman bagi keamanan global namun juga negara.

Kejahatan transnasional *human trafficking* diatur dalam *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Protokol ini disebut juga dengan *Trafficking in Persons Protocol* (TPP) yang di dalamnya menjelaskan mengenai definisi dari *human trafficking* serta bentuk-bentuk dari *human trafficking*.⁷³ Jenis-jenis dari *human trafficking* sendiri meliputi: perdagangan manusia untuk dikerjakan paksa (*trafficking for forced labour*), perbudakan rumah tangga (*domestic servitude*), eksploitasi seksual (*trafficking for sexual exploitation*), perdagangan anak-anak untuk dieksploitasi secara seksual (*trafficking for children exploitation*), pernikahan paksa (*forced marriage*), dan penjualan organ tubuh (*trafficking organs*).⁷⁴ Dari berbagai jenis *human trafficking* tersebut, jenis yang paling banyak terjadi adalah *sex trafficking* kemudian *forced labour*.⁷⁵

⁷² Picarelli, *Transnational Organized Crime*, hlm. 458.

⁷³ Forster, "Human Trafficking: A Transnational Organized".

⁷⁴ UNODC, "Human Trafficking", diakses dari <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html> pada 11 Mei 2019

⁷⁵ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2016".

Gambar 1 Jenis-Jenis Eksploitasi dalam *Human Trafficking*

■ FIG. 19 Share of forms of exploitation among detected trafficking victims*, 2016 (or most recent)



Sumber: *Global Report on Trafficking in Persons* UNODC tahun 2016

Secara global, perempuan menjadi korban *human trafficking* paling banyak khususnya wanita dewasa dan remaja perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Umumnya baik wanita dewasa maupun remaja perempuan diperdagangkan untuk di eksploitasi secara seksual.⁷⁶ Tingginya *demand* dalam *sex trafficking* menyebabkan perempuan paling banyak menjadi korban. Selain itu, masih adanya patriarki atau gagasan yang melihat perempuan lebih rendah daripada laki-laki menyebabkan perempuan lebih rentan sehingga mudah untuk dieksploitasi.⁷⁷ Berdasarkan laporan dari UNODC dalam *Global Report on Trafficking in Persons* tahun 2016, sebanyak 49% korban *trafficking* yang terdeteksi adalah wanita kemudian sebanyak 21% adalah laki-laki. Sedangkan,

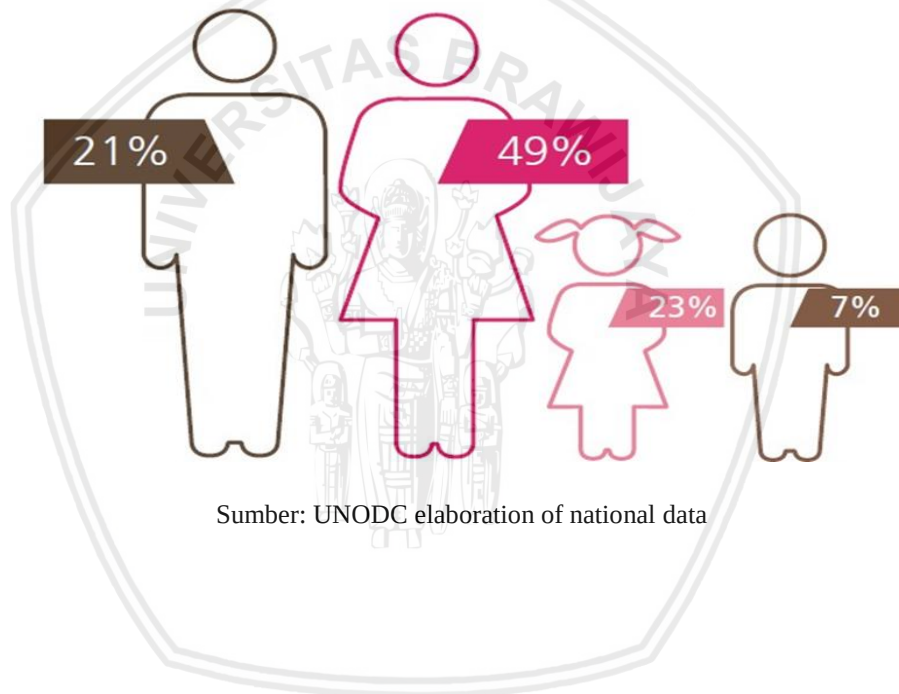
⁷⁶ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2016".

⁷⁷ Edna Eerz, "Women as Victims and Survivors in the Context of Transnational Human Trafficking for Commercial Sex Exploitation", *International Review of Penal Law Journal*, Vol. 81, No. 3, 2010, hlm. 552.

untuk anak-anak sebanyak 23% korban *trafficking* adalah perempuan dan sebanyak 7% adalah laki-laki.⁷⁸

Gambar 2 Korban *Human Trafficking* yang Terdeteksi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Shares of detected victims of trafficking in persons globally, by age group and sex, 2016 (or most recent)



⁷⁸ UNODC, “Global Report on Trafficking in Persons 2016”.

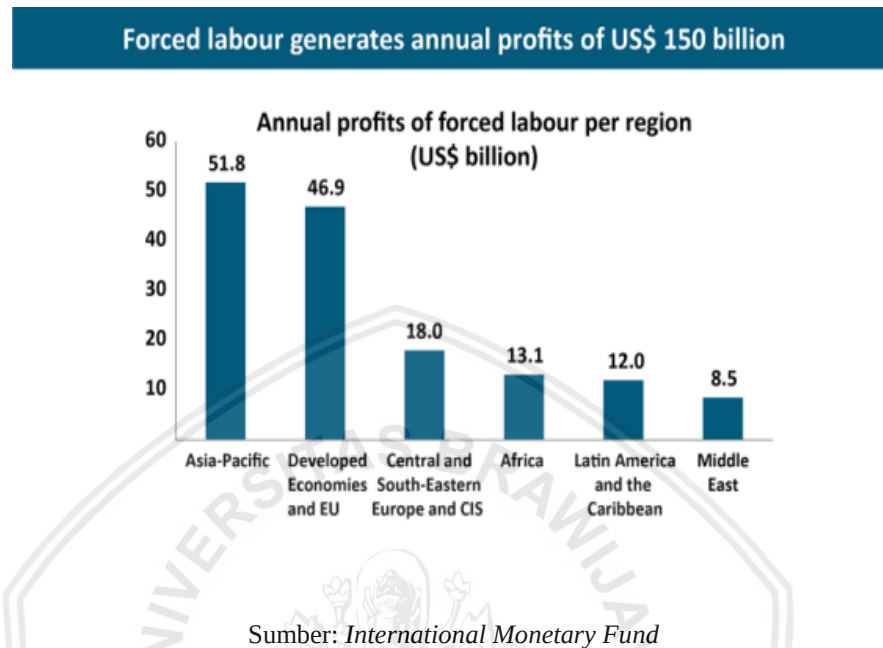
4.2. *Human Trafficking* di Kawasan Asia Selatan

Kejahatan transnasional merupakan permasalahan global yang menjalar ke berbagai kawasan. Bagi negara-negara berkembang di Kawasan Asia, masalah seperti korupsi, pemerintahan yang tidak stabil, sistem peradilan yang lemah, dan semakin canggihnya teknologi yang digunakan untuk kegiatan kriminal membuat kejahatan transnasional terus ada.⁷⁹ Fenomena human trafficking yang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional juga semakin menjalar ke berbagai kawasan. Berdasarkan laporan dari *International Labour Organization* tahun 2015 Kawasan Asia-Pasifik menjadi kawasan paling menguntungkan mengenai kasus *human trafficking* terutama *forced labour*.⁸⁰ Asia-Pasifik menjadi wilayah dengan pendapatan kerja paksa terbesar sekitar \$51,8 miliar per tahun, peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh kawasan Eropa, peringkat keempat ditempati oleh kawasan Afrika, selanjutnya ditempati oleh kawasan Amerika Latin dan Timur Tengah menjadi kawasan terakhir seperti pada gambar tabel berikut.

⁷⁹ Richard H. Ward dan Daniel J. Mabrey, *Transnational Organized Crime in Asia and Middle East* dalam Jay S. Albanese dan Philip L. Reichel, *Transnational Organized Crime: An Overview from Six Continents* (California: SAGE Publications, 2013), hlm. 117.

⁸⁰ ILO, "Statistics on Forced Labour, Modern Slavery and Human Trafficking", diakses dari <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/policy-areas/statistics/lang--en/index.htm> pada 8 Mei 2019

Gambar 3 Keuntungan *Forced Labour* Setiap Kawasan



Salah satu Kawasan di Asia dengan kasus *human trafficking* yang terbilang tinggi adalah Kawasan Asia Selatan yang terdiri dari beberapa negara yaitu: India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Maladewa, dan Bhutan. Negara-negara tersebut memiliki angka *trafficking* yang tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lain. Setiap tahun diperkirakan terdapat 1-2 juta orang yang di menjadi korban *trafficking* yang mana sejumlah 225.000 diantaranya berasal dari negara-negara Kawasan Asia Selatan.⁸¹

Bentuk *human trafficking* yang paling umum terjadi di Kawasan Asia Selatan adalah *sexual exploitation* dan *forced labour* atau kerja paksa. *Sexual exploitation* mencakup perekrutan, penyediaan seseorang untuk tujuan seks komersial yang mana orang yang terlibat untuk melakukan tindakan tersebut

⁸¹ S. Huda, "Sex Trafficking in South Asia", *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, Vol. 94, Issue 3, 2006, hlm. 374-375.

belum mencapai usia 18 tahun. Orang yang mejadi korban dari *sexual exploitation* biasanya mendapat paksaan, kekerasan, serta ditipu oleh para *traffickers*.⁸² Umumnya para remaja perempuan, wanita dewasa, bahkan anak-anak menjadi korban dari *sexual exploitation* baik di dalam maupun di luar negeri.

Sedangkan, *forced labour* merujuk pada perekrutan, penyediaan seseorang untuk dimanfaatkan tenaga kerjanya, serta adanya paksaan untuk tunduk kepada orang yang mempekerjakan.⁸³ Selain itu, dalam kerja paksa juga terdapat penggunaan kekerasan fisik. Biasanya korban paling banyak *forced labour* adalah para pria yang dipekerjakan lebih dari 15 jam sehari di industri-industri yang ada.⁸⁴ Salah satu bentuk *forced labour* yang banyak terjadi di Kawasan Asia Selatan adalah *bonded labour* yang merupakan perbudakan jangka panjang karena pekerja yang bersangkutan harus melakukan kerja paksa untuk melunasi hutang kepada majikannya. *Bonded labour* yang terjadi bisanya dipengaruhi oleh budaya yang merupakan hasil dari hubungan antar kelas, sejarah kolonial, dan faktor kemiskinan yang terus-menerus di negara-negara di Asia Selatan seperti misalnya di India.⁸⁵

⁸² Chanchal Kumar, "Human Trafficking in the South Asian Region: SAARC's Response and Initiatives", *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 16.

⁸³ Kumar, "Human Trafficking in South Asian Region", hlm. 16.

⁸⁴ MD R. Rahaman, "Human Trafficking in South Asia (Special Preferences on Bangladesh, India, and Nepal): A Human Rights Perspective", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 20, Issues 3, 2015, hlm. 2.

⁸⁵ Devin Finn, "Bonded Labor in India", diakses dari <https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/slavery/india.pdf> pada 30 April 2019

Gambar 4 Korban Terdeteksi Sesuai Jenis Eksploitasi *Human*

***Trafficking* di Asia Selatan**



Sumber: UNODC elaboration of National Data

Kawasan Asia Selatan bukan hanya menjadi sumber, melainkan juga menjadi tempat tujuan untuk *human trafficking*. Berdasarkan laporan dari UNODC tahun 2014, sebanyak 96% korban *trafficking* di wilayah ini diperdagangkan lintas batas antar negara tetangga.⁸⁶ *Trafficking* antar negara tetangga seperti ini dapat terjadi karena kurangnya kontrol perbatasan sehingga dapat dimanfaatkan oleh para *traffickers*.⁸⁷ Misalnya, *trafficking* paling umum adalah *sex trafficking* yang melibatkan perempuan dari Bangladesh dan Nepal ke *brothel* yang ada di India.⁸⁸ Perempuan Nepal tidak hanya dijual untuk *sex trafficking* tetapi juga untuk kerja paksa dan *domestic servants*. Setiap tahun

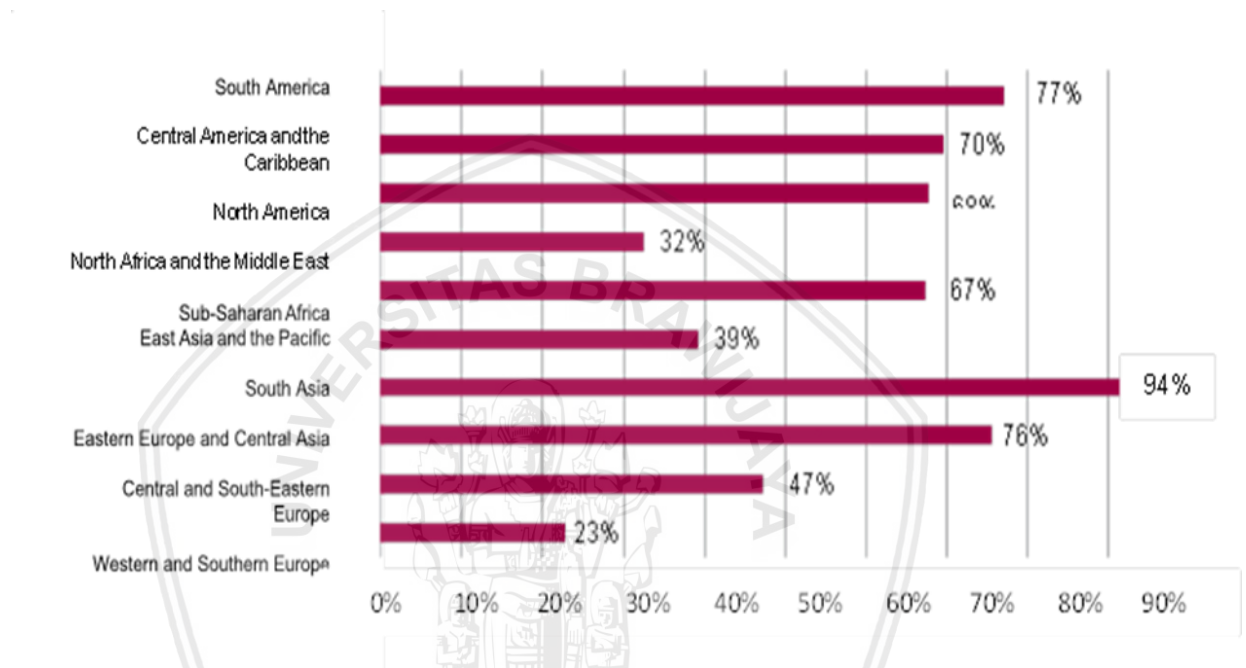
⁸⁶ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons", hlm, 80.

⁸⁷ Authority of the Speaker of the House of Commons Canada, "A Global Fight: Supporting Efforts to Address Sex Trafficking in South Asia", diakses dari <http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FAAE/Reports/RP9668824/faaerp15/faaerp15-e.pdf> pada 26 April 2019

⁸⁸ House of Commons Canada, "A Global Fight".

terdapat 5000 hingga 7000 perempuan Nepal berusia antara 9 sampai 10 tahun yang diperdagangkan ke distrik *red light* di India.⁸⁹

Gambar 5 Korban *Human Trafficking* Terdeteksi didalam Kawasan



Sumber: UNODC elaboration national data

Bangladesh menjadi negara transit dan negara pengirim anak-anak dan perempuan dewasa berdasarkan laporan TIP tahun 2015.⁹⁰ Mereka tidak hanya dikirim menuju India, melainkan juga ke Pakistan. Sebanyak 200,000 anak-anak perempuan Bangladesh dipekerjakan di *brothel-brothel* (lokasi prostitusi) yang ada di Pakistan.⁹¹ Ibukota Bangladesh yakni Dhaka menjadi tempat asal korban

⁸⁹ Kumar, "Human Trafficking in the South Asian Region", hlm. 18.

⁹⁰ Refworld, "2015 Trafficking in Person Report: Bangladesh", diakses dari <https://www.refworld.org/docid/55b73c1531.html> pada 17 Juni 2019

⁹¹ Karen C. Tumlin, "Trafficking in Children in Asia; A Regional Overview", diakses dari http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_7_en.pdf pada 29 April 2019

trafficking paling banyak. Alasannya karena banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan berpindah menuju Dhaka untuk mendapat kehidupan lebih baik. Sehingga membuat populasinya lebih padat dibanding wilayah lainnya.⁹² Banyaknya orang yang bermigrasi menuju Dhaka ini dimanfaatkan oleh para *traffickers* untuk menjaring korban di tempat-tempat seperti stasiun kereta api dan terminal bus di seluruh Dhaka.⁹³ Selain Dhaka, terdapat wilayah lain yang menjadi tempat *trafficking* seperti Jessore, Bagerhat, Chapai Nawabganj, Rangpur, Barisal, Chittagong, Comilla, dan Dinajpur.⁹⁴

Serupa dengan Bangladesh, Nepal juga menjadi negara sumber *human trafficking*. Perempuan Nepal banyak yang menjadi target perdagangan baik di negaranya sendiri maupun yang dikirim ke India dan ke negara-negara di Timur Tengah. Selain kerja paksa, perempuan Nepal menjadi korban dari *domestic servants*, pekerja pabrik, pengemis, dan pekerja tambang.⁹⁵ Sejak tahun 2013, jumlah orang yang diperdagangkan dari Nepal menuju India meningkat menjadi 500% di tahun 2017. Para korban ini dijual ke *brothel-brothel* yang ada di India seperti di Delhi, Mumbai, dan Kolkata.⁹⁶ Selain itu, sejumlah 200,000 perempuan Nepali yang bekerja di prostitusi India yang mana 400,000 diantaranya berusia dibawah 16 tahun.⁹⁷ Korban *trafficking* dari Nepal yang diperdagangkan menuju

⁹² Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS), "Human Trafficking: A Security Concern for Bangladesh", diakses dari <https://www.files.ethz.ch/isn/164375/Issue%209.pdf> pada 30 April 2019

⁹³ MD R. Rahaman, "Human Trafficking in South Asia", hlm. 3

⁹⁴ BIPSS, "Human Trafficking: A Security Concern for Bangladesh".

⁹⁵ Kumar, "Human Trafficking in South Asian Region", hlm. 19.

⁹⁶ Joseph Florino, "Human Trafficking in South Asia", diakses dari <http://www.southasiaathudson.org/blog/2018/4/3/slavery-in-south-asia> pada 30 April 2019

⁹⁷ Tumlin, "Trafficking in Children in Asia".

India biasanya ditipu oleh *traffickers* dengan dijanjikan akan mendapat pekerjaan maupun dijanjikan untuk dinikahi.⁹⁸

Sedangkan negara Pakistan serupa dengan India yakni merupakan negara tujuan dari *human trafficking* yang berasal dari Bangladesh, Afghanistan, Iran, Burma, Nepal, dan Asia Tengah. Sebanyak 40,000 Perempuan Bangladesh terlibat prostitusi di Pakistan.⁹⁹ Selain prostitusi, bentuk *human trafficking* paling umum di negara ini adalah *bonded labour* yakni bentuk dari kerja paksa yang mana korbannya direkrut untuk melunasi hutang yang dimiliki. Sehingga korban kerja paksa terikat dengan orang yang mempekerjakan dalam rentang waktu tertentu. Korban *bonded labour* biasanya bekerja di bidang pertanian, pembuatan batu bata, bidang industri seperti pertambangan, pembuatan karpet, dan industri perikanan. Daerah di Pakistan dengan *bonded labour* paling banyak terdapat di Provinsi Sindh, Punjab, Balochistan, dan Provinsi Khyber Pakhtunkhwa.¹⁰⁰

Negara di Asia Selatan lainnya yang menjadi negara sumber *human trafficking* adalah Sri Lanka. Jenis *trafficking* yang paling banyak ditemui adalah *child labour* yang mana 70% anak-anak berusia antara 15 sampai 19 tahun sudah bekerja di Sri Lanka. Pekerjaan yang dilakukan seperti *commercial sex*, mengemis dan bekerja di industri pertanian serta perikanan. Anak-anak yang menjadi korban kerja paksa berasal dari daerah miskin seperti Sinhalese dan Tamil.¹⁰¹ Mereka dijanjikan akan mendapat pendidikan yang layak namun, justru di pekerjaan

⁹⁸ Huda, "Sex Trafficking in South Asia", hlm. 377.

⁹⁹ Profulla C. Sarker dan Pranab K. Panday, "Trafficking in Women and Children in Bangladesh: A National Issue in Global Perspective", *Asian Journal of Social Policy*, Vol. 2, No. 2, 2006.

¹⁰⁰ Kumar, "Human Trafficking in South Asian Region", hlm. 19

¹⁰¹ Tumlin, "Trafficking in Children in Asia."

secara paksa. Sri Lanka juga dikenal dengan prostitusi anak-anaknya terutama yang berjenis kelamin laki-laki yang biasa disebut dengan ‘beach boys’. Diperkirakan jumlah anak laki-laki yang bekerja sebagai prostitusi antara 200 sampai 30,000.¹⁰²

Child trafficking juga banyak terjadi di Afghanistan. Tidak seperti negara lainnya yang mana korban dari *child trafficking* paling banyak terjadi pada perempuan. Di Afghanistan justru yang berpotensi menjadi target *trafficking* adalah anak laki-laki. Para korban ini dieksploitasi baik secara seksual ataupun dimanfaatkan tenaganya untuk terlibat dalam *forced labour*. Bahkan ada yang direkrut untuk bergabung ke dalam kelompok militer.¹⁰³ Anak laki-laki yang berusia sekitar 13 tahun paling banyak diperdagangkan untuk *sexual exploitation* dan 50% kasus yang ada di Afghanistan menjadikan anak-anak tersebut sebagai *sexual entertainment* atau disebut dengan *bacha bazi*.¹⁰⁴ Sedangkan, anak-anak yang berusia 14-18 tahun diperdagangkan untuk *forced labour* serta ada yang direkrut oleh kelompok militer untuk menjadi pelaku bom bunuh diri.¹⁰⁵

Kemudian terdapat negara Maladewa yang merupakan negara tujuan untuk pekerja migran yang berasal dari Bangladesh. Berdasar *Trafficking in Persons Report* tahun 2010, diperkirakan terdapat 110,000 pekerja migran di Maladewa yang mana 35,000 diantaranya merupakan korban *trafficking*. Beberapa wanita

¹⁰² Tumlin, “Trafficking in Children in Asia.”

¹⁰³ Jane E. Thorson, “Forgotten No More Male Child Trafficking in Afghanistan”, diakses dari <https://hagarinternational.org/wp-content/uploads/2018/04/Hagar-Research-Forgotten-No-More-Male-Child-Trafficking-in-Afghanistan.pdf> pada 29 April 2019

¹⁰⁴ Thorson, “Forgotten No More Male Child Trafficking”.

¹⁰⁵ Kumar, “Human Trafficking in South Asian Region”, hlm. 20.

asal Sri Lanka, Thailand, India, Cina, Filipina, bahkan wanita asal negara Eropa Timur direkrut oleh *traffickers* dalam prostitusi di Male, ibukota Maladewa.¹⁰⁶ Pelaku perdagangan manusia ini terbagi menjadi tiga kelompok: pertama, keluarga yang menjadikan pekerja rumah tangga sebagai pekerja paksa; kedua, agen ketenagakerjaan yang membawa pekerja migran berketerampilan rendah ke Maladewa yang mana mereka telah membayar sejumlah uang namun, justru ditipu, dan ketiga, majikan yang menjadikan migran menjadi pekerja paksa.¹⁰⁷

Selain antar negara dalam satu kawasan, korban *trafficking* juga diperdagangkan menuju luar kawasan Asia Selatan. Laporan *Global Report Trafficking in Persons* tahun 2014 yang dikeluarkan oleh UNODC, menunjukkan sebanyak 18% korban *trafficking* yang berasal dari Asia Selatan dijual menuju Afrika Utara dan Timur Tengah. Selanjutnya, sebanyak 7% korban *trafficking* dijual menuju wilayah Amerika Utara dan sekitarnya. Selain itu, korban *trafficking* juga dijual ke kawasan Eropa Barat dan Eropa Tengah.¹⁰⁸ Misalnya seperti anak-anak laki-laki dari Bangladesh juga menjadi korban *trafficking* di negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Qatar yang dipekerjakan sebagai pengemis maupun sebagai joki unta.¹⁰⁹

¹⁰⁶ U.S. Department of State, "Trafficking in Persons Report 2010", diakses dari <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/142760.htm> pada 29 April 2019

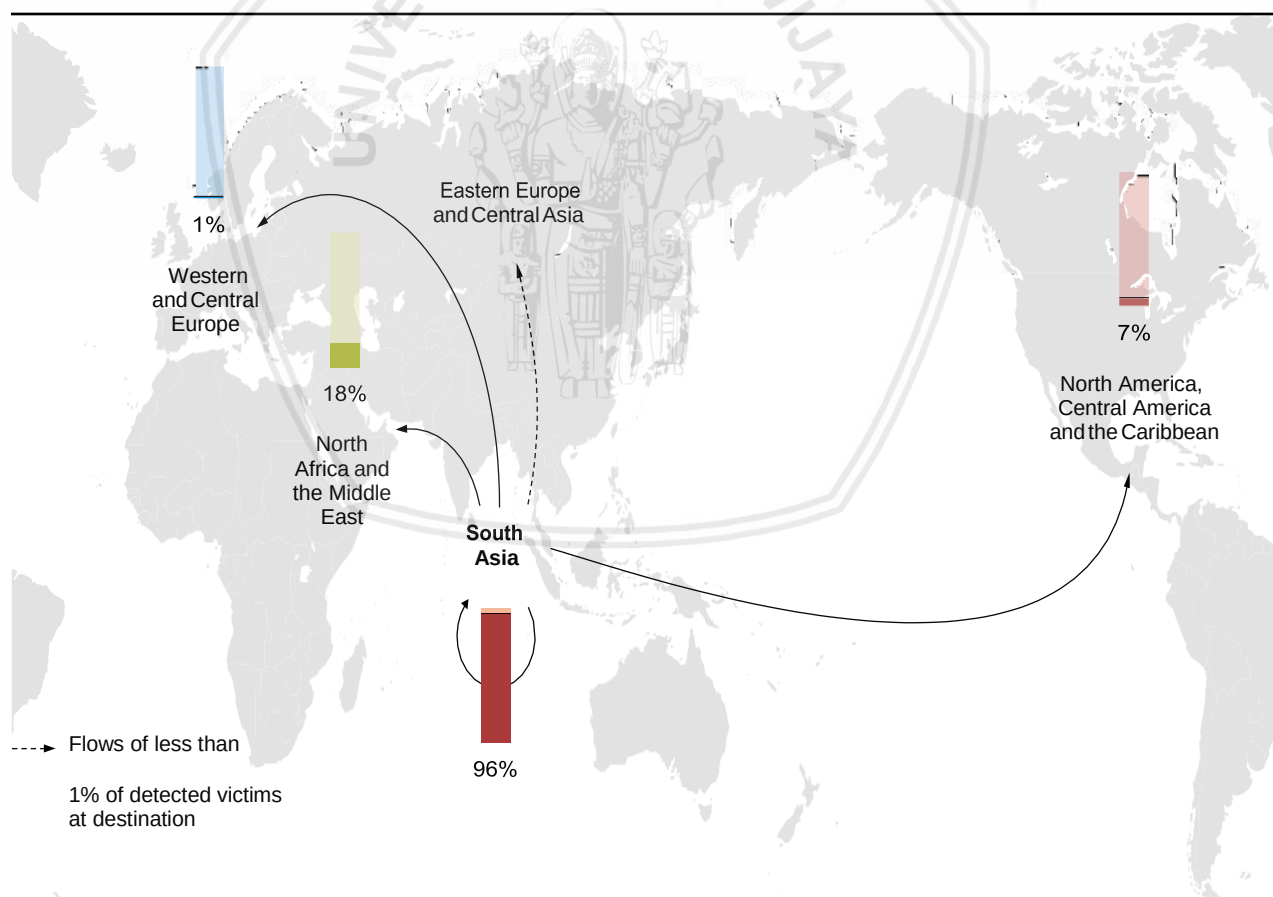
¹⁰⁷ U.S. Department of State, "Trafficking in Persons Report 2010".

¹⁰⁸ U.S. Department of State, "Trafficking in Persons Report 2010".

¹⁰⁹ Huda, "Sex Trafficking in South Asia", hlm. 377.

Gambar 6 Peta Persebaran *Human Trafficking* dari Asia Selatan

MAP 18: Destinations of trafficking victims originating in South Asia, proportion of the total number of detected victims at destinations, 2010-2012



Sumber: UNODC *Global Report on Trafficking in Person* 2014

4.3. *Human Trafficking* di India

India merupakan salah satu negara destinasi dari *human trafficking* yang berasal dari kawasan maupun dari negara-negara luar kawasan. Negara-negara seperti Nepal, Bangladesh, dan Pakistan merupakan negara pengirim *human trafficking* menuju India. Hal ini membuat India menjadi negara di Kawasan Asia Selatan yang masyarakatnya hidup dalam kondisi *modern slavery* paling tinggi. *Modern slavery* merujuk pada kondisi kerja yang bertentangan dengan martabat manusia. *Modern slavery* merupakan bentuk perbudakan baru yang berbeda dengan praktik perbudakan tradisional.¹¹⁰ Perbudakan tradisional mengacu pada eksploitasi tenaga kerja yang mana seseorang mengontrol orang lain dan tidak memberikan bayaran sama sekali pada seseorang yang diperbudak.

Sedangkan, pengertian dari *modern slavery* sebenarnya hampir sama dengan perbudakan yang memaksa seseorang bekerja diluar kehendak mereka namun dalam *modern slavery*, orang yang terlibat dibayar atas pekerjaan mereka walaupun dengan jumlah yang sangat minim daripada bayaran seharusnya. *Modern slavery* memiliki bermacam-macam bentuk seperti salah satunya yaitu *forced labour*.¹¹¹ Berdasarkan ILO *Forced Labour Convention* tahun 1930, *forced labour* meliputi pekerjaan atau layanan yang dilakukan seseorang secara tidak suka rela karena orang tersebut berada dibawah ancaman.¹¹² Berdasarkan laporan dari *Global Slavery Index* tahun 2014 yang dikeluarkan oleh organisasi *Walk Free*

¹¹⁰ Mark Tutton, "What is Modern Slavery", diakses dari <https://edition.cnn.com/2019/03/13/world/what-is-modern-slavery/index.html> pada 8 Juli 2019

¹¹¹ Mark Tutton, "What is Modern Slavery".

¹¹² ILO, "What is Forced Labour, Modern Slavery, and Human Trafficking, diakses dari <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm> pada 8 Juli 2019

Foundation India menempati posisi pertama negara dengan estimasi populasi dalam *modern slavery* terbanyak mencapai 14 juta jiwa. Kemudian negara berikutnya adalah Cina dengan angka kurang lebih 3 juta jiwa.¹¹³

Dalam laporan tersebut, negar-negara Asia mendominasi peringkat sepuluh besar. India bukan satu-satunya negara di Asia Selatan yang masyarakatnya sebagian besar hidup dalam *modern slavery*. Selain India, negara dari Asia Selatan lainnya adalah Pakistan yang menempati urutan ketiga dengan 2 juta populasi yang hidup dalam *modern slavery*. Selanjutnya terdapat Bangladesh yang berada di urutan kesembilan yang mana terdapat 680 ribu orang yang hidup dalam *modern slavery*.¹¹⁴

Tabel 1 Negara dengan Estimasi Populasi dalam *Modern Slavery* Terbanyak

Rank	Country	Population
1	India	14,285,700
2	China	3,241,400
3	Pakistan	2,058,200
4	Uzbekistan	1,201,400
5	Russia	1,049,700
6	Nigeria	834,200
7	Dem. Republic of Congo	762,900
8	Indonesia	714,100
9	Bangladesh	680,900
10	Thailand	475,300

Sumber: *Global Slavery Index* 2014 dalam *The Wall Street Journal*

¹¹³ Wall Street Journal, "India Worst Slave Country, Says Global Slavery Index", diakses dari <https://blogs.wsj.com/indiarealtime/2014/11/20/indonesia-8th-worst-slave-country-says-report/> pada 29 April 2019

¹¹⁴ Wall Street Journal, "India Worst Slave Country".

Pada tahun 2016, *Global Slavery Index* melaporkan terdapat 18 juta orang di India yang hidup dalam *modern slavery*.¹¹⁵ Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Meningkatnya jumlah orang yang menjadi korban *modern slavery* termasuk *human trafficking* di India juga dapat dilihat dari laporan yang dikeluarkan oleh *National Crime Records Bureau* (NCRB). Pada tahun 2013, terdapat 3,940 kasus *human trafficking* yang dilaporkan di seluruh India.¹¹⁶ Kemudian pada tahun 2016, jumlah kasus *human trafficking* yang dilaporkan menjadi 8,132 dan di tahun yang sama terdapat 15,379 orang yang dijual oleh para *traffickers*.

Pada tahun 2016, NCRB juga melaporkan bahwa terdapat 23,117 korban yang diselamatkan dari *trafficking*. Angka korban yang diselamatkan lebih besar daripada jumlah orang yang dijual karena jumlah korban yang diselamatkan tersebut mencakup korban yang dijual dari tahun sebelumnya¹¹⁷ yang pada tahun 2015 terdapat 8,281 korban yang dijual.¹¹⁸ Sebanyak 10,509 korban yang telah diselamatkan mengatakan jika tujuannya dijual adalah untuk menjadi pekerja paksa. Sedangkan, 4,980 korban mengatakan jika mereka dijual untuk dieksploitasi secara seksual dengan bergabung dalam prostitusi.¹¹⁹

¹¹⁵ Global Slavery Index, "India", diakses dari

<https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/india/> pada 29 April 2019

¹¹⁶ National Crime Records Bureau, "Crime in India 2015 Statistics", Ministry of Foreign Affairs, hlm. 103, diakses dari <http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2015/chapters/Chapter%206A-15.11.16.pdf> pada 29 April 2019

¹¹⁷ Global Slavery Index, "India".

¹¹⁸ U.S. Department of State, "2017 Trafficking in Person Report India", diakses dari <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271205.htm> pada 29 April 2019

¹¹⁹ National Crime Records Bureau (NCRB), "Crime in India 2016 Statistics", Ministry of Home Affairs, hlm. 512-518, diakses dari <http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/NEWPDFs/Crime%20in%20India%20-%202016%20Complete%20PDF%20291117.pdf> pada 29 April 2019

Berdasarkan *Trafficking in Person Report* tahun 2013, India merupakan negara sumber, tujuan, dan transit bagi korban *forced labour* serta *sex trafficking*.¹²⁰ Pengertian dari negara sumber adalah negara asal atau negara penyedia para korban yang akan diperdagangkan. Sedangkan, negara tujuan berarti tempat para korban diperdagangkan dari negara asalnya.¹²¹ India menjadi negara tujuan *trafficking* dari negara-negara tetangga terutama berasal dari Nepal dan Bangladesh. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya kontrol di perbatasan antara India dengan kedua negara tersebut sehingga mudah dimanfaatkan oleh para *traffickers*.¹²²

Misalnya, Bangladesh yang berbatasan dengan 28 distrik yang ada di India yang mana terdapat 20 titik transit yang digunakan *traffickers* untuk memperjualbelikan orang dari distrik di Bangladesh menuju India. Salah satu transit poin yang digunakan *traffickers* adalah *Benapole boerder crossing* atau dikenal dengan *Southwest transit point* yang merupakan jalur darat paling mudah dilewati dari Bangladesh menuju India.¹²³ Organisasi *End Child Prostitution and Trafficking* (ECPAT) memperkirakan tiap tahun terdapat 5000 sampai 10,000 perempuan dari Bangladesh dan Nepal yang diperdagangkan ke India.¹²⁴

¹²⁰ U.S. Department of States, "2014 Trafficking in Person Report-India", diakses dari <https://www.refworld.org/docid/53aab9ec14.html> pada 29 April 2019

¹²¹ Sarah M. Hart, "Destinations: A Comparison of Sex Trafficking in India and the United States", *University of Colorado Law Review*, Vol. 83, 2012, hlm. 1150.

¹²² House of Commons Canada, "A Global Fight".

¹²³ BIPSS, "Human Trafficking: A Security Concern for Bangladesh".

¹²⁴ Dr. Arvind P. Bhanu dan Rajni K. Mishra, "Child Trafficking in India", *International Journal of Law*, Vol. 2, Issue. 1, 2016, hlm. 34.

Berdasarkan laporan TIP tahun 2011, 90% *trafficking* di India terjadi secara domestik dan hanya 10% *trafficking* yang terjadi secara lintas batas.¹²⁵ Bentuk *human trafficking* yang terjadi di India terbagi menjadi 3 bagian: pertama, *sexual exploitation*; kedua, eksploitasi tenaga atau *forced labour*; dan ketiga, eksploitasi dalam bentuk lainnya seperti penjualan organ tubuh.¹²⁶ Rata-rata korban perempuan dan anak-anak dipaksa bekerja dalam prostitusi di *brothel-brothel* yang ada. Terdapat setidaknya 1000-10,000 perempuan yang ditemukan di *brothel* di Kolkata.¹²⁷ Selain diperdagangkan sebagai pekerja seks, perempuan dan anak-anak juga dijual untuk menjadi penari di klub-klub, pekerja paksa sebagai pembantu rumah tangga, pekerja paksa di industri pertanian, memperjualbelikan organ tubuh, bahkan dipaksa untuk menjual obat-obat terlarang.¹²⁸

Mayoritas *trafficking* di India baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang dikirim ke luar negeri tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai pekerja seks. Sebanyak 60% yang menjadi pekerja seks berusia antara 12-16 tahun.¹²⁹ Perempuan baik dewasa maupun anak-anak diperdagangkan di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual di tempat-tempat pusat ziarah dan keagamaan serta di kota-kota yang menjadi daerah pariwisata.¹³⁰ Sebanyak 2,5% pekerja seks di India berasal dari Nepal dan sebanyak 2,7% lainnya merupakan orang Bangladesh. Daerah di India yang dianggap sebagai tempat yang paling banyak

¹²⁵ Refworld, "2011 Trafficking in Persons Report: India", diakses dari <https://www.refworld.org/docid/4e12ee7427.html> pada 17 Juni 2019

¹²⁶ Sanjoy Roy dan Chandan Chaman, "Human Rights and Trafficking in Women and Children in India", *Journal of Historical Archaeology and Anthropological Sciences*, Vol. 1, Issue. 5, 2017.

¹²⁷ Kumar, "Human Trafficking in South Asian Region", hlm. 18.

¹²⁸ Roy dan Chaman, "Human Rights and Trafficking in Women".

¹²⁹ Kumar, "Human Trafficking in South Asian Region", hlm.17.

¹³⁰ Kumar, "Human Trafficking in South Asian Region", hlm. 18.

memasok perempuan untuk pelacuran yaitu Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, dan Tamil Nadu.¹³¹ Daerah lain yang juga dikenal dengan *human trafficking* nya di India yaitu: Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Jharkhand, Orissa (Odisha), dan West Bengal.¹³²

Traffickers atau agen yang merekrut calon korban yang akan diperdagangkan bisa jadi adalah orang yang dikenal oleh korban seperti anggota keluarga, teman, tetangga, anggota komunitas, atau anggota gengs.¹³³ Komisi Hak Asasi Manusia Nasional India atau *National Human Rights Commission of India* mengungkapkan metode yang sering digunakan para *traffickers* untuk menjaring korban. Cara yang paling banyak dilakukan adalah dengan menawarkan pekerjaan kepada calon korban seperti menjadi pembantu rumah tangga, bekerja di pabrik, bekerja di dunia perfilman, bekerja di tempat-tempat ziarah, dan bekerja di tempat-tempat yang menjadi kawasan pariwisata. Selain itu, cara lainnya adalah dengan menawarkan akan mendapat sejumlah uang, menawarkan perjalanan gratis, menggunakan biro pernikahan untuk menipu calon korban dengan dijanjikan pernikahan, menawarkan tempat perlindungan untuk para perempuan yang melarikan diri dari rumah ataupun untuk anak-anak jalanan, bahkan ada yang menggunakan paksaan seperti penculikan dan lainnya.¹³⁴

¹³¹ Kumar, "Human Trafficking in South Asian Region"

¹³² Sadika Hameed, et. al., "Human Trafficking in India: Dynamics, Current Efforts, and Intervention Opportunities for the Asia Foundation", (PhD diss., University of Stanford, 2010).

¹³³ BIPSS, "Human Trafficking: A Security Concern for Bangladesh".

¹³⁴ Jaffer L. Najar, "Human Trafficking in India", diakses dari https://www.researchgate.net/publication/303276513_Human_Trafficking_in_India pada 30 April 2019

BAB V

ANALISIS PENGARUH FAKTOR POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL TERHADAP KEJAHATAN *HUMAN TRAFFICKING* DI INDIA

Dalam usaha menangani kejahatan transnasional yang ada, diperlukan informasi terkait kejahatan transnasional seperti aktor yang terlibat serta bagaimana dinamika kejahatan transnasional yang terjadi di dalam suatu negara. Selain penting untuk mengetahui informasi terkait aktivitas serta aktor dalam kejahatan transnasional, penting pula untuk menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya serta mempengaruhi dinamika kejahatan transnasional yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan transnasional dapat berasal dari dalam maupun dari luar negara tempat kejahatan tersebut terjadi. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan transnasional yakni *human trafficking* di India pada tahun 2013 hingga tahun 2016.

Untuk menjelaskan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kejahatan *human trafficking* di India, penulis akan menganalisis keadaan di India dengan menggunakan *model of transnational organized crime* milik Phil Williams dan Roy Godson. Dalam model tersebut, Williams dan Godson menjelaskan jika terdapat dua kerangka besar yang dapat digunakan untuk melihat kondisi serta strategi kelompok kejahatan transnasional untuk menjalankan aksinya. Dua kerangka tersebut yakni; *model of conditions* dan *model of operations*. Namun, penulis hanya memilih menggunakan salah satu model dari kedua model tersebut.

Penulis memilih hanya menggunakan *model of conditions* untuk menganalisis keadaan India yang mempengaruhi berkembangnya aktivitas *human trafficking* disana. Wiliams dan Godson berpendapat jika *model of conditions* dapat membantu mengantisipasi berkembangnya kejahatan transnasional.¹³⁵ Agar dapat mencapai hal tersebut, terdapat tiga faktor dalam *model of conditions* untuk membantu memahami kejahatan transnasional yaitu politik, ekonomi, dan sosial.

5.1. Pengaruh Keadaan Politik dan Korupsi Terhadap *Human Trafficking* di India

Faktor pertama dalam *model of TOC* milik Williams dan Godson adalah faktor politik yang di dalamnya terdapat beberapa karakteristik meliputi: *weak states*, *strong regimes becoming weak*, *states characterized by ethnic conflict or terrorist activity*, dan *strong democracies states with high levels of legitimacy, transparency, rule of law*. Pada bab II telah dijelaskan mengenai kondisi-kondisi seperti apa yang masuk dalam karakteristik-karakteristik tersebut. Secara garis besar, dalam model ini melihat bahwasannya negara dengan tingkat legitimasi serta penegakan hukum yang rendah dapat menjadi target dari kelompok kejahatan transnasional untuk melakukan aksinya.

Korupsi yang terjadi diantara pejabat pemerintah merupakan salah satu penyebab berkembangnya kejahatan transnasional. Terdapat kemungkinan jika pejabat publik dalam pemerintahan juga turut berperan dalam kejahatan transnasional yang terjadi di negaranya. Selain itu, adanya konflik etnis maupun

¹³⁵ Williams dan Godson,” *Anticipating Organized*”, hlm. 315.

aktivitas terorisme dalam suatu negara juga dapat memberikan peluang berkembangnya kejahatan transnasional.

Pemerintah India telah menunjukkan upaya-upaya untuk menangani *human trafficking* seperti meratifikasi *United Nations Convention on TOC* (UNTOC), dan *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.¹³⁶ Pemerintah India juga membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *trafficking*. Diantaranya yaitu: *Indian Penal Code* (IPC) tahun 1861; *The Child Marriage Restraint Act* tahun 1929; *The Immoral Trafficking (Prevention) Act* (ITPA) tahun 1956 yang mengatur mengenai pencegahan perdagangan untuk tujuan komersialisasi eksploitasi seksual; *The Juvenile Justice (Care and Protection Children) Act* tahun 2000¹³⁷; *Protection of Children from Sexual offences* (POCSO) Act tahun 2012 yang mengatur mengenai perlindungan anak-anak dari tindak kekerasan secara seksual dan eksploitasi; *Criminal Law Act* (Amandemen) tahun 2013 *Section 370* dan *370A* IPC yang berisikan langkah-langkah untuk melawan segala bentuk eksploitasi dalam *human trafficking*; dan *Bonded Labour System Abolition Act* (BLSA) yang melarang *forced labour* dalam bentuk apapun.¹³⁸

Namun, ITPA yang merupakan undang-undang dasar dalam *human trafficking*, memiliki beberapa kekurangan. Dalam *Section 3* undang-undang

¹³⁶ Ministry of External Affairs India, "Human Trafficking", diakses dari <https://www.mea.gov.in/index.htm> pada 23 Mei 2019

¹³⁷ Meshelemiah. Dan Sarkar, "A Comparative Study of Child Trafficking", hlm. 134.

¹³⁸ Ministry of External Affairs India, "Human Trafficking", diakses dari <https://www.mea.gov.in/human-trafficking.htm> pada 23 Mei 2019

tersebut yang mengatur mengenai pemberian hukuman bagi pelaku perdagangan manusia, lama hukuman yang diberikan hanyalah tiga tahun penjara.¹³⁹ Mengingat jika *human trafficking* termasuk kejahatan yang berat, lama hukuman tersebut dinilai tidak setimpal. Akhirnya, Parlemen India mengajukan rancangan amandemen *Indian Penal Code* pada tahun 2013. Dalam rancangan amandemen tersebut, ditambahkan *Section 370A* yang memberikan definisi lebih luas mengenai *trafficking* serta bentuk-bentuk dari eksploitasi. Selain itu, terdapat aturan mengenai hukuman bagi *traffickers* yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang ada di dalam ITPA.

Pelaku *human trafficking* dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka waktu paling sedikit 7 tahun dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun lamanya serta dapat dikenakan denda. Apabila pelaku perdagangan manusia diketahui memperdagangkan lebih dari satu orang, maka masa hukuman yang akan diterima lebih dari 10 tahun dan dapat diperpanjang menjadi seumur hidup. Serta dapat dikenakan denda.¹⁴⁰ Adanya amandemen undang-undang ini dianggap mampu memberikan efek jera bagi pelaku *human trafficking*. Meskipun demikian, berdasarkan laporan *Trafficking in Persons* tahun 2016, kasus *human trafficking* di India masih tergolong tinggi karena masih kurangnya investigasi yang dilakukan untuk menyelidiki *human trafficking*. Selain itu, masih kurangnya juga penuntutan, serta penjatuhan hukuman bagi pelaku *human trafficking*. Banyak kasus *human trafficking* yang tidak didaftarkan oleh pihak berwajib atau tidak

¹³⁹ Eira Mishra, "Combating Human Trafficking: A Legal Special Reference to India", *Journal of Sociology and Anthropology*, Vol.1, No. 4, 2013, hlm. 177.

¹⁴⁰ Mishra, "Combating Human Trafficking".

ditindaklanjuti setelah tahap pengaduan dari korban.¹⁴¹ Hal ini terkait masih ditemukan adanya keterlibatan petugas penegak hukum yang korup untuk melindungi tersangka pelaku *human trafficking* setelah mereka menerima suap maupun layanan seksual dari korban.¹⁴²

Salah satu hal yang mendasari masih tingginya kasus *human trafficking* di India adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bank Dunia mengartikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan yang diberikan untuk mendapat keuntungan pribadi. Jabatan yang diberikan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi ketika seorang pejabat menerima, meminta, atau memeras suap untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.¹⁴³ *Transparency International* menjelaskan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan baik pada sektor publik maupun sektor swasta.¹⁴⁴ Korupsi merupakan hal yang berbahaya karena melemahkan supremasi hukum dan dapat mengancam keamanan negara terlebih jika elite yang korup memfasilitasi adanya tindakan kriminal seperti perdagangan orang, senjata, dan obat-obatan terlarang.¹⁴⁵ Terdapat keterkaitan antara korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dengan *human trafficking*.¹⁴⁶

¹⁴¹ Refworld, "2016 Trafficking in Persons Report: India", diakses dari <https://www.refworld.org/docid/577f95f89.html> pada 23 Mei 2019

¹⁴² Refworld, "2016 Trafficking in Persons Report: India".

¹⁴³ M. Bashir Udin, "Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security", *International Journal of Social Work and Human Service Practice*, Vol. 2, No. 1, 2014.

¹⁴⁴ Udin, "Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption".

¹⁴⁵ Verite Organization, "Corruption & Labor Trafficking in Global Supply Chains", diakses dari <https://www.verite.org/wp-content/uploads/2016/11/WhitePaperCorruptionLaborTrafficking.pdf> pada 15 Maret 2019

¹⁴⁶ Udin, "Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption", hlm. 21.

Menurut *Transparency International*, korupsi ada disetiap tahap dalam *human trafficking*. Mulai dari transportasi hingga eksploitasi korban. Pada tahap transportasi, *traffickers* bekerjasama dengan pejabat negara untuk memalsukan dokumen korban serta bekerjasama dengan penjaga perbatasan sehingga korban dapat diperdagangkan lintas batas negara. Kemudian pada tahap eksploitasi, *traffickers* biasanya akan melakukan suap ke polisi maupun pejabat publik lain yang terkait untuk menghindari penangkapan.¹⁴⁷ Oleh karena itu, aktor dalam *human trafficking* bukan hanya melibatkan *traffickers* sebagai agen, melainkan juga pejabat korup yang menerima suap dari agen *trafficking* termasuk polisi yang justru terlibat dalam *trafficking* itu sendiri.¹⁴⁸

Transparency International membuat laporan untuk menilai tingkat korupsi negara-negara di dunia yang disebut dengan *Corruption Perception Index* (CPI). Suatu negara akan diberi nilai dengan rentang antara 0 sampai dengan 100. Nilai 100 mengindikasikan jika negara tersebut bebas dari korupsi sedangkan, nilai 0 mengacu pada negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Pada tahun 2013, India berada di peringkat 94 dari 176 negara dengan nilai 36 dari 100. Hal ini menunjukkan jika tingkat korupsi di India cukup tinggi.¹⁴⁹ Kemudian pada tahun 2014, nilai yang diperoleh India naik dua poin menjadi 38 yang kemudian tetap bertahan hingga tahun 2015.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Udin, "Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption"

¹⁴⁸ UNITAR, "Human Trafficking and the Role of Local Governments", hlm. 12.

¹⁴⁹ Transparency International, "Corruption Perception Index 2013", diakses dari <https://www.transparency.org/cpi2013/results> pada 23 Mei 2019

¹⁵⁰ Transparency International, "Corruption Perception Index 2014", diakses dari <https://www.transparency.org/cpi2014/results> pada 23 Mei 2019

Pada tahun 2016, nilai yang diperoleh India menjadi 40 poin.¹⁵¹ Meskipun India memperoleh kenaikan nilai dalam CPI namun, korupsi di India masih tergolong tinggi karena masih ditemukan penyuapan yang dilakukan kepada pihak berwenang oleh *traffickers*. Selain itu, berdasarkan laporan dari TIP tahun 2016, pemerintah India juga tidak menyediakan data komprehensif mengenai investigasi, penuntutan, ataupun hukuman terhadap pejabat yang terlibat dalam *human trafficking*.¹⁵² Hal ini menunjukkan jika tindakan untuk menegakkan hukum terutama bagi tersangka *human trafficking* masih rendah di India.

Keterlibatan pejabat pemerintah dan polisi kejahatan dalam *human trafficking* memang bukan sesuatu yang baru di India. Berdasarkan laporan dari *The Asian Human Rights Commission* (AHR) pada tahun 2013, sejumlah 28 polisi di wilayah Kerala ditangkap karena dituduh menjalankan kartel *human trafficking* di India. Kartel yang dijalankan oleh petugas polisi ini diketahui terkait dengan kartel kriminal internasional yang bertugas memasok perempuan dan anak-anak perempuan maupun laki-laki untuk diperdagangkan. Terdapat sekitar 300 korban yang telah diperdagangkan keluar India oleh kartel ini.¹⁵³

Petugas polisi yang terlibat dalam kartel *human trafficking* ini terdiri dari berbagai tingkatan. Mulai dari pengawas polisi, wakil pengawas, dan inspektur polisi. Banyak diantara petugas tersebut yang ditempatkan untuk bekerja di bandara internasional Kochi. Bandara tersebut merupakan tempat yang mana

¹⁵¹ Transparency International, "Corruption Perception Index 2016", diakses dari https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 pada 23 Mei 2019

¹⁵² Refworld, "2016 Trafficking in Person Report: India".

¹⁵³ Asian Human Rights Commission (AHR), "India: Police Officers run Human Trafficking Cartel", diakses dari <http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-036-2013/> pada 23 Mei 2019

polisi negara bagian biasanya menjalankan proses imigrasi di sebagian besar terminal. Sehingga dengan adanya petugas polisi yang terlibat dalam *human trafficking* memudahkan pengiriman korban keluar India.¹⁵⁴

Hal ini bukan pertama kalinya terdapat pelanggaran yang terjadi di bandara internasional tersebut. Sebelumnya terdapat kasus yang mana petugas polisi ditempatkan di bagian imigrasi bandara namun, justru mengizinkan orang untuk masuk dan keluar tanpa memasukkan catatan kedalam dokumen perjalanan mereka. Kasus tersebut kemudian segera ditutup tanpa ada investigasi lebih jauh. Setelah diselidiki ternyata Wakil Kepala Inspektur Polisi pada saat itu yaitu N.V.Somarajan termasuk bagian dari sindikat kriminal *human trafficking*.¹⁵⁵ pada Juli tahun 2013, juga terdapat penangkapan terhadap tiga petugas kepolisian Kerala karena memfasilitasi transportasi *human trafficking* dari India menuju Dubai.¹⁵⁶

Pada Mei tahun 2014, terdapat laporan penyelamatan empat orang anak dari tempat prostitusi di wilayah Puducherry yang melibatkan polisi setempat. *The National Commission for Protection of Child Rights* meminta pemerintah wilayah serta Pengadilan Tinggi Madras untuk melakukan investigasi terhadap para tersangka. Hasilnya yakni terdapat 8 petugas polisi Puducherry yang dipecat dari pekerjaannya dan didakwa karena telah melakukan pemerkosaan terhadap anak-

¹⁵⁴ AHRC, "India: Police Officers".

¹⁵⁵ AHRC, "India: Police Officers".

¹⁵⁶ Refworld, "2014 Trafficking in Person Report: India", diakses dari <https://www.refworld.org/docid/53aab9ec14.html> pada 23 Mei 2019

anak.¹⁵⁷ Berdasarkan laporan dalam *Trafficking in Persons*, beberapa petugas penegak hukum yang korup di India melindungi tersangka pelaku *human trafficking* dan pemilik rumah bordil dari penegakan hukum. Para pejabat korup tersebut menerima suap dari *traffickers* dan mendapat layanan seksual dari para korban.

Selain terlibat dalam kejahatan *human trafficking*, polisi di India juga dinilai kurang melindungi korban *trafficking*. Gadis-gadis yang melaporkan adanya *trafficking* serta korban yang diselamatkan dari prostitusi diperlakukan sebagai penjahat dan ditahan di rumah-rumah tahanan. Bahkan, mereka justru mengalami pelecehan seksual oleh polisi dan staff di rumah-rumah tahanan. Dalam beberapa kasus, pemilik *brothel* membayar suap kepada polisi yang bersangkutan untuk mengembalikan gadis-gadis tersebut ke *brothel*.¹⁵⁸

Pejabat pemerintah dan polisi yang korup serta terlibat dalam kejahatan *human trafficking* seharusnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan *Indian Penal Code (IPC) Section 370*, terdapat bagian yang mengatur keterlibatan pejabat pemerintah dalam *human trafficking*, dijelaskan jika pejabat pemerintah tersebut akan dijatuhi hukuman hingga seumur hidup. Bahkan dalam *Section 166A* dari IPC, disebutkan jika polisi terlambat memproses pengaduan korban *trafficking*, maka polisi tersebut akan dikenakan hukuman antara enam bulan hingga dua tahun penjara.¹⁵⁹ Namun, bertolak belakang dari aturan hukum yang ada, sejauh ini belum ada laporan dari pemerintah India

¹⁵⁷ Refworld, "2015 Trafficking in Person Report: India".

¹⁵⁸ Udin, "Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption", hlm. 24.

¹⁵⁹ Udin, "Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption".

sendiri mengenai investigasi, penuntutan, atau hukuman bagi pejabat pemerintah yang terlibat dalam kejahatan *human trafficking* di India.¹⁶⁰ Hal ini menunjukkan kurang tegasnya pemerintah India dalam menangani *human trafficking* terlebih yang melibatkan aparat kepolisian.

Selain masih ditemukannya korupsi diantara pejabat yang berwenang serta rendahnya tingkat pelemagaan hukum, faktor lain yang dapat mempengaruhi *human trafficking* di India adalah adanya konflik etnis. Adanya konflik etnis membuat keadaan negara kacau sehingga memberikan peluang bagi kelompok kejahatan transnasional untuk masuk dan melakukan pekerjaannya.¹⁶¹ India dikenal sebagai negara dengan bahasa, agama, dan etnis yang berbeda-beda. Sebagai negara multikultural, adanya perbedaan yang beragam dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Hal ini yang terjadi di Provinsi Assam, yang mana konflik antar etnis telah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Assam terletak di Timur Laut India dan berbatasan dengan Cina, Myanmar, Nepal, Bhutan, dan Bangladesh.¹⁶²

Di Provinsi Assam, kelompok etnis dibagi kedalam tiga kelompok yakni dilihat dari bahasa, agama, dan suku. Dilihat dari segi bahasa, terdapat empat bahasa mayoritas yang digunakan yaitu Assamese, Bengali Bodo, dan Hindi. Sedangkan, dari segi agama, Hindu merupakan agama mayoritas. Berdasarkan sensus tahun 2011, sejumlah 61,5% penduduk di Assam menganut agama Hindu,

¹⁶⁰ Refworld, "2016 Trafficking in Persons Report: India".

¹⁶¹ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 319.

¹⁶² Arpita Bhattacharyya, "Understanding the Historical Conflicts Behind Today's Violence in Assam", diakses dari <https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2012/08/29/35050/understanding-the-historical-conflicts-behind-todays-violence-in-assam/> pada 23 Mei 2019

kemudian sebanyak 34,22% merupakan muslim, dan 3,7% merupakan umat Kristiani.¹⁶³

Konflik bermula ketika terjadi peningkatan muslim di Assam yang merupakan imigran Muslim Bengali dari Bangladesh. Kedatangan imigran dari Bangladesh ke Assam pertama kali ketika India dan Pakistan berada dibawah kolonial Inggris. Imigran tersebut dijadikan sebagai buruh murah oleh pemerintah Inggris.¹⁶⁴ Sehingga sebelum tahun 1947, kedatangan imigran tersebut belum menjadi masalah bahkan ketika India dan Pakistan merdeka dari kolonial Inggris tahun 1947.¹⁶⁵ Namun, pada tahun 1971 terjadi perang saudara antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Alasannya karena Pakistan Timur ingin memerdekakan diri dari Pakistan Barat.¹⁶⁶ Selama perang berlangsung, India membantu perlawanan Pakistan Timur yang akhirnya menang dan berganti nama menjadi Bangladesh.

Selama perang, terdapat 10 juta orang Pakistan Timur termasuk Muslim Bengali yang melarikan diri ke Assam. Sejak tahun 1971, sejumlah besar imigran muslim Bangladesh memasuki perbatasan Indo-Bangladesh secara ilegal menuju Assam selain untuk melarikan diri dari konflik pada saat itu, alasan lainnya adalah faktor ekonomi.¹⁶⁷ Pertumbuhan populasi muslim di Assam menurut sensus yang

¹⁶³ Kasturi Bharadwaj, "Ethnicity in Assam: Understanding the Complexities of Ethnic Identities and Conflicts", *Indian Journal of Public Administration*, Vol. LXII, No. 3, 2016, hlm. 549.

¹⁶⁴ Hindu American Foundation (HAF), "The Indian State of Assam: Origins and Causes of Conflict", diakses dari <https://www.hafsite.org/media/pr/indian-state-assam-origins-and-causes-conflict> pada 23 Mei 2019

¹⁶⁵ Bhattacharyya, "Understanding the Historical Conflicts".

¹⁶⁶ Bhattacharyya, "Understanding the Historical Conflicts".

¹⁶⁷ HAF, "The Indian State of Assam".

diadakan tahun 1971 dan 1981 meningkat.¹⁶⁸ Mantan Gubernur Assam, Ajai Singh melaporkan hampir 6,000 orang Bangladesh memasuki Assam setiap hari.¹⁶⁹ Peningkatan jumlah imigran yang datang ke Assam sulit untuk dibedakan. Antara muslim Bengali yang sudah tinggal lebih dulu di Assam sebelum pemisahan India-Pakistan dengan mereka yang bermigrasi sebagai pengungsi akibat perang kemerdekaan Bangladesh, dan muslim Bengali yang pindah setelah perang.¹⁷⁰

Migrasi ini mempengaruhi demografi di Assam yang mana etnis beragama muslim populasinya menjadi 33% dari populasi Assam serta 11 distrik dari 27 distrik di Assam dihuni oleh etnis beragama muslim.¹⁷¹ Selain itu, imigran ilegal tersebut juga menggunakan lahan pertanian dan hutan sebagai mata pencaharian mereka.¹⁷² Selain mengubah demografi dan merasa lahannya diambil alih oleh imigran, pertumbuhan populasi muslim juga menimbulkan kekhawatiran akan dominasi budaya Bengali di Assam. Sehingga pada tahun 1979, muncul gerakan rakyat melawan imigrasi ilegal. Gerakan ini dipimpin oleh kelompok *All Assam Students Union* (AASU) yang meminta pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan imigran ilegal, serta mencegah datangnya imigran baru dari Bangladesh.¹⁷³

¹⁶⁸ Bharadwaj, "Ethnicity in Assam", hlm. 551.

¹⁶⁹ HAF, "The Indian State of Assam".

¹⁷⁰ Bhattacharyya, "Understanding the Historical Conflicts".

¹⁷¹ HAF, "The Indian State of Assam".

¹⁷² HAF, "The Indian State of Assam".

¹⁷³ Bharadwaj, "Ethnicity in Assam", hlm. 553.

Selain itu, AASU juga meminta agar semua imigran ilegal dihapus dari daftar pemilih dan menentang pemilihan umum tahun 1983. Namun, pemerintah India tidak menggubris permintaan AASU tersebut dan tetap melangsungkan pemilihan umum yang memicu kekerasan.¹⁷⁴ Akibat dari kekerasan yang terjadi, berdasarkan laporan dari pihak pemerintah terdapat 4000 korban yang meninggal. Sedangkan, berdasarkan laporan dari pihak lain, korban yang meninggal selama pemilu berlangsung mencapai 7000 orang.¹⁷⁵ Setelah dua tahun perundingan antara kelompok AASU dengan pemerintah, pada tahun 1985 terdapat penandatanganan *Assam Accord* yang mengatur mengenai ketentuan imigran dan mengakhiri gerakan Assam.¹⁷⁶

Namun, implementasi dari kesepakatan tersebut menjadi perdebatan antara suku Bodo dengan imigran muslim Bengal. Suku Bodo merasa terdapat beberapa hal dalam kesepakatan yang tidak menguntungkan mereka dan membuat mereka merasa terasingkan. Sehingga menimbulkan protes pada tahun 2003 dan memuncak pada tahun 2012.¹⁷⁷ Lemahnya upaya pemerintah dalam menangani konflik etnis yang terjadi membuat konflik yang ada mengalami eskalasi.

Pada Juli 2012, ketegangan meningkat antara etnis Bodo dengan imigran muslim di Kokrajhar yang mana diketahui empat orang menembak satu pria muslim dan melukai empat orang lainnya. Dua minggu kemudian terjadi pembunuhan yang dilakukan dua orang kepada pendiri *All Bodo Land Minority*

¹⁷⁴ Bhattacharyya, "Understanding the Historical Conflicts".

¹⁷⁵ Bhattacharyya, "Understanding the Historical Conflicts".

¹⁷⁶ Bhattacharyya, "Understanding the Historical Conflicts".

¹⁷⁷ Bharadwaj, "Ethnicity in Assam", hlm. 554.

Students Union dan salah satu anggota kelompok minoritas muslim *All Assam Minority Students Union*. Konfrontasi ini diikuti oleh kematian empat pemuda suku Bodo di daerah dominasi muslim di Kokrajhar. Pertempuran menyebar ke distrik Chirang dan Dhubri. Berdasar laporan *Asian Centre for Human Rights*, 77 orang tewas¹⁷⁸ dan membuat lebih dari 400.000 orang baik suku Bodo maupun muslim Bengali mengungsi ke kamp-kamp bantuan.¹⁷⁹ Dan 19,036 diantaranya anak-anak yang terpaksa hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.¹⁸⁰

Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh para *traffickers* yang menargetkan pengungsi di kamp-kamp bantuan sebagai korban. Wilayah Assam, Nagaland, dan Manipur menjadi sumber dari adanya *sex trafficking*.¹⁸¹ Dari tahun 2009 sampai dengan 2011, sebanyak 5,000 wanita diperdagangkan. Dari tahun 2007 sampai dengan 2009, terdapat 2,485 orang dewasa yang dilaporkan hilang. Sedangkan, untuk anak-anak yang hilang mencapai angka 1,734 anak.¹⁸² Kemudian di tahun 2012, terdapat 1,209 kasus penculikan anak perempuan yang didaftarkan dan membuat Assam menjadi salah satu dari delapan wilayah paling rentan di India untuk *child trafficking*.¹⁸³ Para *traffickers* memanfaatkan kondisi konflik yang ada untuk menjalankan aksinya. Mereka menggunakan rute-rute

¹⁷⁸ HAF, "The Indian State of Assam".

¹⁷⁹ Bhattacharyya, "Understanding the Historical Conflicts".

¹⁸⁰ Raju K. Narzary, "Impact of Conflict on Children in Assam and Manipur States of India", diakses dari https://www.redhandday.org/fileadmin/user_docs/Study_Impact_of_Conflict_on_Children_in_Assam_and_Manipur_States_of_India_NERSWN_tdh_final_E.pdf pada 23 Mei 2019

¹⁸¹ Sawmya Ray, "Vulnerability and Coercion: A Study of Sex Trafficking in Assam", *Sociological Bulletin*, Vol. 64, No. 3, 2015, hlm. 306.

¹⁸² Narzary, "Impact of Conflict on Children in Assam", hlm.30.

¹⁸³ Ray, "A Study of Sex Trafficking in Assam", hlm. 306.

melalui wilayah konflik untuk memindahkan korban *trafficking*. Cara ini dilakukan karena peluang mereka dicurigai dan ditangkap lebih sedikit.¹⁸⁴

Pemerintah India memang telah melakukan beberapa upaya untuk menangani *human trafficking* di negaranya. Seperti membuat peraturan mengenai *human trafficking*, melakukan amandemen terhadap ITPA, dan memberikan *shelter* atau tempat perlindungan bagi korban *trafficking*.¹⁸⁵ Namun, upaya-upaya tersebut dinilai masih kurang untuk dapat menangani *human trafficking*.¹⁸⁶ Lemahnya penegakan hukum di India dipengaruhi oleh korupsi yang dilakukan pejabat publik yang bekerjasama dengan pelaku perdagangan manusia. Pemerintah India juga dinilai kurang dalam memberikan laporan terkait investigasi maupun hukuman bagi pelaku *human trafficking*. Kemudian adanya konflik etnis yang menyebabkan banyak masyarakat India hidup di kamp-kamp pengungsian sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh para *traffickers* menjaring korbannya serta kurangnya kontrol perbatasan. Menunjukkan jika pemerintah belum sepenuhnya dapat mengatasi kejahatan *human trafficking*.

¹⁸⁴ Ray, "A Study of Sex Trafficking in Assam", hlm. 317.

¹⁸⁵ Ministry of External Affairs India, "Human Trafficking".

¹⁸⁶ Refworld, "2016 Trafficking in Persons Report: India".

5.2. Keterkaitan antara Kondisi Perekonomian India dengan Dinamika

Pasar Terhadap *Human Trafficking*

Adanya kejahatan *human trafficking* tidak bisa terlepas dari faktor ekonomi. Negara dengan perekonomian yang rendah, kurang terjaminnya kesejahteraan rakyat, dan tingkat kemiskinan yang tinggi dapat dimanfaatkan oleh *traffickers* untuk menjaring korban. Dalam *model of TOC*, Williams dan Godson melihat faktor ekonomi yang mendorong adanya *human trafficking* melalui dua bagian yakni *market model* dan *enterprise model*. Dinamika pasar, melihat bahwa kejahatan *human trafficking* dipengaruhi oleh *supply* dan *demand* di pasar gelap baik global maupun lokal. Sedangkan, untuk *enterprise model* lebih melihat jika kelompok kejahatan transansional akan bertindak seperti layaknya perusahaan yang menjual barang legal. Kelompok kejahatan transnasional lebih menekankan pada aspek bisnis daripada aspek kriminalnya.

India dikenal sebagai negara sumber bagi *human trafficking*.¹⁸⁷ Korban *trafficking* yang diperdagangkan baik dari maupun di dalam India sendiri tidak semuanya berasal dari India. Ada pula korban yang berasal dari negara tetangga seperti Bangladesh dan Nepal. Sebanyak 90% korban *sex trafficking* merupakan wanita berasal dari Nepal dan Bangladesh.¹⁸⁸ Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi India sebagai negara sumber *human trafficking* yaitu; adanya ketidaksetaraan struktural, ketidakstabilan ekonomi, tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pendidikan dan iliterasi yang rendah, dan kurangnya lapangan pekerjaan

¹⁸⁷ Global Slavery Index, "Global Slavery Index 2016".

¹⁸⁸ Mary R. Gilbertson, "Globalization and the Sex Trafficking Industry: Examination of Effects on Regional Value Chain Operations", (honor thesis, Saint John's University, 2015), hlm.70.

untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸⁹ Sedangkan, dari sisi *demand*, meningkatnya permintaan tenaga kerja murah di industri-industri di India, dan bertumbuhnya bisnis pariwisata, serta industri hiburan membuat *human trafficking* juga turut berkembang dengan cepat.¹⁹⁰

Proses *supply* dalam *human trafficking* dimulai dari akar permasalahan yakni tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga membuat masyarakat khususnya wanita dan anak-anak rentan terhadap *trafficking*. Kondisi rentan ini umumnya dikenal sebagai *push factors* karena menggambarkan faktor-faktor yang mendorong munculnya *human trafficking*.¹⁹¹ Terdapat beberapa hal dalam *push factors* diantaranya; kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan, budaya di masyarakat mengenai perempuan yang tidak boleh bekerja¹⁹², kurangnya pendidikan, kurangnya keahlian dan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja, dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kejahatan *human trafficking*.¹⁹³ Namun, dari semua penyebab yang ada, kemiskinan tetap menjadi penyebab paling dasar dalam *human trafficking*.

Sekitar 30% dari populasi India atau setidaknya 360 juta orang hidup dalam kemiskinan.¹⁹⁴ Hidup dalam kondisi yang miskin membuat seseorang menjadi rentan dan akan melakukan apapun untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Terlebih dengan kurangnya tingkat pendidikan membuat mereka sulit

¹⁸⁹ Vidushy, "Human Trafficking in India: An Analysis", hlm. 169.

¹⁹⁰ Vidushy, "Human Trafficking in India: An Analysis"

¹⁹¹ ILO, "The Demand Side of Human Trafficking in Asia: Empirical Findings", diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_73_en.pdf pada 10 Juni 2019

¹⁹² Bhanu dan Mishra, "Child trafficking in India".

¹⁹³ Vidushy, "Human Trafficking in India: An Analysis", hlm. 169.

¹⁹⁴ Gilbertson, "Globalization and the Sex Trafficking Industry".

untuk mendapat pekerjaan, maka akan mudah bagi para *traffickers* untuk menghasut mereka ke dalam *trafficking*.¹⁹⁵ Keadaan ekonomi yang rendah ini berdampak pada tingginya perdagangan anak khususnya perempuan oleh orang tua mereka untuk mendapatkan uang.¹⁹⁶ Umumnya, bentuk *trafficking* yang anak-anak tersebut alami adalah *labour trafficking* dan *forced marriage*.

Dalam *forced marriage*, para *traffickers* biasanya akan mendatangi keluarga yang miskin untuk menawar anak mereka. *Traffickers* akan memilih korban perempuan remaja yang tinggal di daerah pedesaan yang kondisi perekonomiannya kurang sejahtera. Kemudian *traffickers* juga akan memberikan sejumlah uang secara langsung sekitar Rs.1000-5000 sebagai mahar sehingga membuat para orangtua sulit untuk menolak tawaran tersebut. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Economic and Social Commission for Asia and Pacific* (ESCAP), menunjukkan ketika *traffickers* berhasil membujuk orangtua untuk menikahkan anaknya, anak tersebut akan dijual lagi oleh *traffickers* dalam prostitusi. Hal ini tidak hanya terjadi di India, melainkan juga di negara tetangga seperti Bangladesh dan Nepal.¹⁹⁷

Dalam *Indian Child Marriage Restraint Act* diatur mengenai usia minimum bagi perempuan untuk menikah yakni 18 tahun, sedangkan untuk pria yaitu 21 tahun. Namun, dari survei yang dilakukan oleh *Department of Health Survey* (DHS) sebanyak 33,8% perempuan India berusia antara 15 sampai 19

¹⁹⁵ Bhanu dan Mishra, "Child trafficking in India", hlm. 33.

¹⁹⁶ Saurojit Barua, "Human Trafficking in India", *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, Vol. 2, Issue. 3, 2018, hlm. 2453.

¹⁹⁷ Vidushy, "Human Trafficking in India: An Analysis", hlm. 169.

tahun telah menikah.¹⁹⁸ Berdasarkan laporan dari *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), sekitar 47% perempuan di India telah menikah sebelum mereka mencapai usia legal mereka.¹⁹⁹ Studi yang dilakukan oleh organisasi lokal di India yaitu Sakti Vahini menyebutkan jika *trafficking* untuk menikahkan anak-anak dibawah umur paling banyak terjadi di wilayah Punjab dan Haryana.²⁰⁰ Selain itu, wilayah lainnya adalah Uttar Pradesh yang mana terdapat 2,8 juta anak-anak berusia antara 10 sampai 19 tahun yang menjadi korban *forced marriage*. Anak-anak dan perempuan di Uttar Pradesh banyak yang terikat kontrak pernikahan dengan turis yang mengunjungi wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu.²⁰¹

Pemerintah India sebenarnya telah memiliki peraturan terkait dengan *forced marriage* yakni *Prohibition of Child Marriage Act* yang di implementasikan tahun 2006. Peraturan tersebut menjelaskan jika *forced marriage* terutama bagi anak-anak merupakan pelanggaran. Apabila diketahui melanggar, maka pelaku mendapat hukuman penjara selama 2 tahun atau denda sebesar USD 15.000. Pelaku disini mengacu pada siapapun yang dengan sadar melakukan, mengarahkan, ataupun menghasut terjadinya *child marriage*.²⁰²

¹⁹⁸ ECPAT, "Sex Trafficking of Children in India", diakses dari https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/Factsheet_India.pdf pada 10 Juni 2019

¹⁹⁹ Madhumita Pandey, "Sex Slavery in India: Unpacking Stories of Trafficking Victims", *Sociology Study*, Vol. 6, No. 10, 2016, hlm. 634.

²⁰⁰ ECPAT, "Sex Trafficking of Children in India".

²⁰¹ Global Slavery Index, "Global Slavery Index 2016", hlm. 117.

²⁰² The Center for Reproductive Rights, "Ending Impunity for Child Marriage in India: Normative and Implementation Gaps", diakses dari <https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/Ending-Impunity-for-Child-Marriage-India-WebUpdate-0218.pdf> pada 8 Juli 2019

Di India, wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi merupakan tempat asal korban *trafficking* paling banyak. Wilayah-wilayah tersebut meliputi; Orissa, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, dan West Bengal.²⁰³ Berdasarkan *Nations High Commissioner for Refugees* (NHCR), wilayah di India yang merupakan sumber korban *trafficking* berasal dari; Tamil Nadu, Kerala, Andhara Pradesh, Rajasthan, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, dan West Bengal. Ketidakstabilan ekonomi atau kemiskinan bukan satu-satunya alasan umum yang digunakan oleh *traffickers*. Cara lain yang digunakan *traffickers* untuk merekrut korbannya yakni: penculikan menggunakan obat bius, penipuan, dan *false marriage*.²⁰⁴

Sedangkan, *demand* atas *trafficking* berasal dari Goa, Pondicherry, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Bihar, Tamil Nadu, dan Andhra Pradesh. Kota-kota besar seperti Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Goa, dan Chennai menjadi tempat sumber, tujuan, serta *transit point human trafficking*.²⁰⁵ Selain itu, *human trafficking* merupakan bisnis yang sangat menguntungkan di India. Terdapat estimasi bahwa setidaknya satu juta wanita dewasa dan perempuan remaja di India bekerja di industri seks dengan keuntungan mencapai Rs. 400 miliar atau setara dengan \$9 miliar per tahun.²⁰⁶

²⁰³ Sadika Hameed, et. al., "Human Trafficking in India".

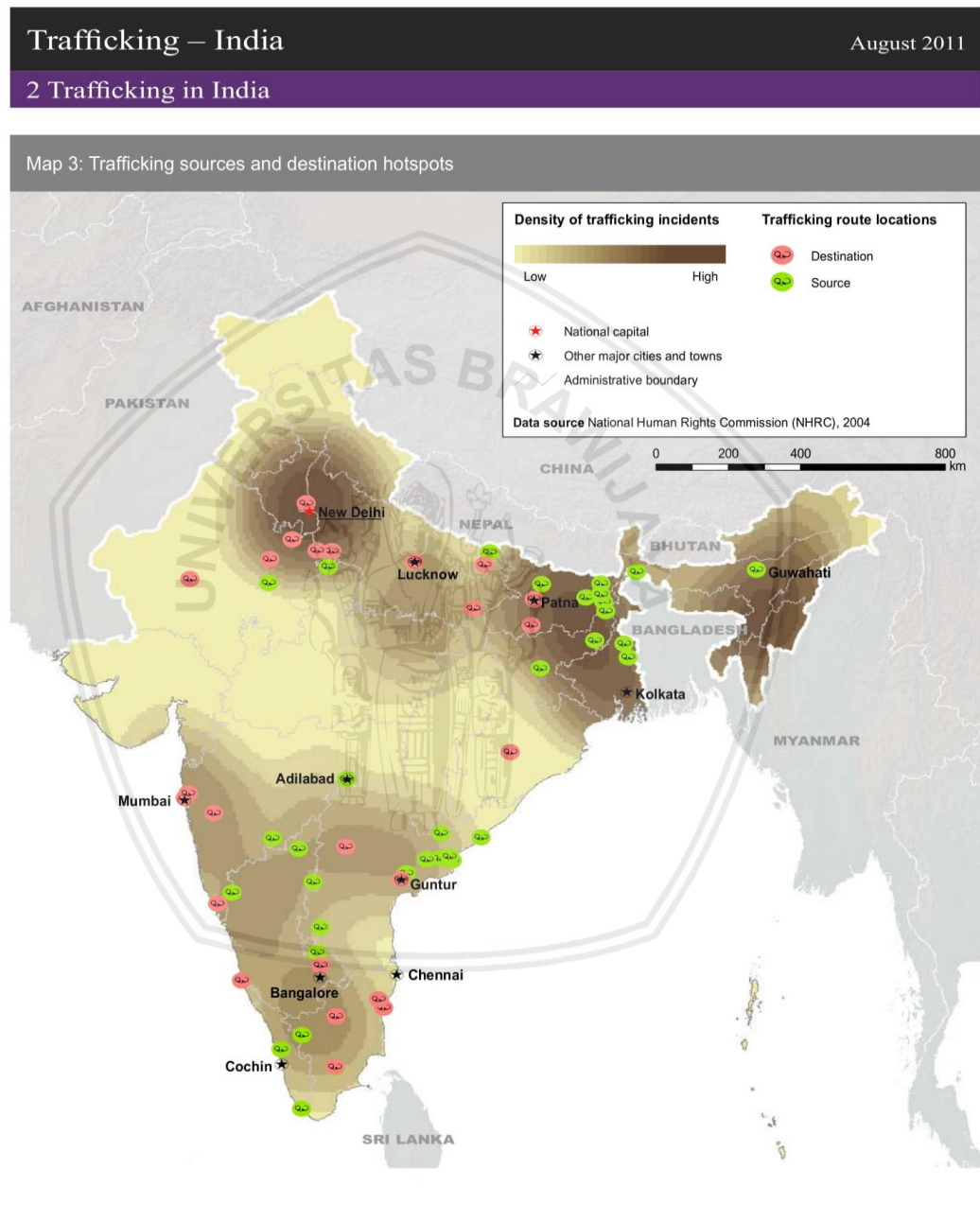
²⁰⁴ Gilbertson, "Globalization and the Sex Trafficking Industry", hlm. 72.

²⁰⁵ Alyson Warhust, et.al, "Trafficking: A Global Phenomenon with an Exploration of India Through Maps", diakses dari

https://portal.maplecroft.com/docs/hr_2011_q3_in_trafficking_report/ pada 10 Juni 2019

²⁰⁶ Hart, "Destinations: A Comparison of Sex Trafficking", hlm. 1166.

Gambar 7 Peta Wilayah Sumber dan Tujuan *Human Trafficking* di India



Sumber: *Maplecroft Report 2011*

Selain dari sisi *supply*, dalam dinamika pasar tentunya ada *demand* atau *pull factor* yang membuat korban terlibat dalam kejahatan tersebut. Terdapat tiga bentuk dari *demand* dalam *human trafficking*, meliputi; *employer demand* yaitu permintaan dari pemilik rumah bordil atau mucikari; *consumer demand* yaitu permintaan dari pengguna korban *trafficking*; dan permintaan dari pihak ketiga yang terlibat dalam proses *trafficking*.²⁰⁷ *Demand* dalam *human trafficking* terutama mengenai perpindahan korban *trafficking* jika terjadi di domestik suatu negara, maka korban berasal dari daerah pedesaan yang miskin menuju kota atau pusat industri. *Trafficking* yang terjadi secara lintas batas juga demikian yang mana korban berasal dari negara dengan ekonomi rendah menuju negara dengan perekonomian lebih tinggi.²⁰⁸

Jenis *human trafficking* yang memiliki *demand* tinggi adalah *sex trafficking*.²⁰⁹ *Sex trafficking* mengacu pada perekrutan seseorang dengan menggunakan paksaan, penipuan, atau kekerasan agar korban mau terlibat dalam seks komersial. *Sex trafficking* juga bisa diartikan sebagai aktivitas seksual yang dilakukan untuk mendapatkan uang, barang, atau lainnya yang mana aktivitas tersebut dipaksakan terhadap kehendak seseorang.²¹⁰ Korban *sex trafficking* biasanya *powerless* karena *traffickers* yang mengatur semuanya mulai dari berapa banyak aktivitas seksual yang dilakukan hingga mengontrol keuangan korban.²¹¹ *Sex trafficking*

²⁰⁷ ILO, "The Demand Side of Human Trafficking in Asia."

²⁰⁸ ILO, "The Demand Side of Human Trafficking in Asia."

²⁰⁹ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons", diakses dari https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf pada 17 Juni 2019

²¹⁰ Gilbertson, "Globalization and the Sex Trafficking Industry", hlm. 10.

²¹¹ Nita Belles, *Defining Sex Trafficking* dalam Lenore Walker, et al., *Handbook of Sex Trafficking: Feminist Transnational Perspectives* (Switzerland: Springer, 2018), hlm.4.

berbeda dengan *sex worker* atau pekerja seks. Perbedaannya terletak pada *consent* atau kehendak yang diberikan oleh yang melakukan layanan seksual. Dalam *sex trafficking*, korban dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual sedangkan, *sex workers* dilakukan oleh orang yang memang memiliki kehendak untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, korban *sex trafficking* biasanya berusia kurang dari 18 tahun. Sehingga *sex trafficking* dikategorikan sebagai tindakan ilegal untuk tujuan eksploitasi, sedangkan, *sex workers* umumnya berusia diatas 18 tahun.²¹²

Di India, *sex trafficking* memiliki macam-macam bentuk seperti *sex tourism*, prostitusi, pornografi, pedofil, dan *massage parlours* atau tempat pijat yang melibatkan aktivitas seks.²¹³ Permintaan atau *demand* dalam *sex trafficking* di India datang dari para pedofil serta orang-orang yang membayar untuk prostitusi.²¹⁴ Mengingat bahwa *trafficking* di India 90% terjadi di domestik maka, banyak pelanggan *trafficking* atau biasa disebut dengan *johns* merupakan orang-orang India sendiri. Pelanggan *trafficking* di India adalah para pria yang menginginkan perempuan berusia lebih muda. Alasannya karena perempuan yang lebih muda memiliki resiko menularkan penyakit yang lebih rendah daripada wanita dewasa.²¹⁵ Selain itu, pria di India memiliki standar kecantikan sosial untuk perempuan. Mereka berpendapat jika perempuan dengan kulit terang dianggap lebih menarik. Oleh karena itu, para *johns* di India lebih memilih wanita

²¹² Carolin et al., "Sex Trafficking in the Tourism Industry", *Journal of Tourism & Hospitality*, Vol. 4, Issue. 4, 2015, hlm, 2.

²¹³ Najar, "Human Trafficking in India".

²¹⁴ ECPAT, "Sex Trafficking of Children in India".

²¹⁵ Gilbertson, "Globalization and the Sex Trafficking Industry", hlm. 74.

di wilayah India Utara daripada India Selatan karena wanita disana memiliki kulit yang lebih terang.²¹⁶

Selain dari India sendiri, korban *sex trafficking* juga berasal dari luar India seperti Nepal dan Bangladesh.²¹⁷ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Human Rights Watch Asia*, kulit wanita Nepal yang lebih terang dibanding dengan kulit wanita India pada umumnya membuat tingginya permintaan terhadap mereka.²¹⁸ Hal ini juga menguntungkan bagi para *traffickers*. Biasanya para *traffickers* mendapatkan perempuan Nepal di daerah pedesaan yang miskin dan membayar mereka sejumlah Rs.200. Perempuan-perempuan tersebut kemudian dikirim dan dijual ke rumah bordil di India dengan harga sekitar Rs.15,000 sampai Rs.40,000. Sehingga, keuntungan yang diperoleh *traffickers* sejumlah Rs.39,000 untuk setiap perempuan Nepal yang berhasil dijual ke India.²¹⁹

Laki-laki di India rata-rata membayar sekitar Rs.100-500 untuk melakukan aktivitas seksual dengan korban *sex trafficking*. Hanya beberapa pria yang membayar lebih mahal untuk mendapat layanan seksual dengan pergi ke bordil atau rumah pelacuran dan klub-klub kelas atas di India.²²⁰ Permintaan yang tinggi terhadap perempuan dibawah umur untuk layanan seksual meningkatkan eksploitasi terhadap mereka. Terlebih lagi jika keadaan ekonomi yang miskin, kurangnya pendidikan, serta rendahnya pemahaman mengenai *human trafficking* semakin memudahkan *traffickers* untuk menipu korban ke dalam *trafficking*.

²¹⁶ Hart, "Destinations: A Comparison of Sex Trafficking", hlm. 1165.

²¹⁷ Refworld. "2011 Trafficking in Persons Report: India".

²¹⁸ Hart, "Destinations: A Comparison of Sex Trafficking".

²¹⁹ Hart, "Destinations: A Comparison of Sex Trafficking", hlm. 1166.

²²⁰ Hart, "Destinations: A Comparison of Sex Trafficking".

Perempuan dibawah umur menjadi target yang mudah bagi para *traffickers* karena sifat mereka yang masih polos biasanya mereka akan patuh pada *traffickers* maupun kepada pelanggan yang membayar mereka. Sifat patuh ini lebih didasari pada rasa takut yang membuat mereka tidak mengadukan kepada pihak berwenang jika mereka telah di eksploitasi.²²¹

Semakin berkembangnya sektor pariwisata turut mempengaruhi *human trafficking*. Adanya kebijakan *Electronic Travel Authorisation* (ETA) yang memudahkan turis untuk datang ke India tanpa mengurus visa meningkatkan kunjungan turis ke India. Semakin banyak destinasi wisata yang dikomersialisasi, semakin menguntungkan para *traffickers* untuk melakukan kejahatannya. Salah satu destinasi populer turis di India adalah Goa. Kegiatan pembangunan untuk mengembangkan pariwisata di Goa, meningkatkan permintaan terhadap pekerja murah. Selain itu, Goa merupakan tempat tujuan *child trafficking* untuk *sexual exploitation* maupun *child labour*. Anak-anak tersebut dipaksa bekerja oleh orangtua atau agensi yang menjual mereka agar mendapat uang dari para turis. Mereka dipekerjakan di pasar, mengangkut sayuan, menjadi tukang semir sepatu maupun sebagai tukang pijat di pantai-pantai.²²²

Jenis *trafficking* lainnya yang banyak terjadi di India adalah *child labour*.²²³ *Child labour* mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak yang karenanya mengganggu kemampuan mereka untuk bersekolah, serta bersifat

²²¹ Barua, "Human Trafficking in India", hlm. 2454.

²²² Armstrong Vaz, "India: Touris Fuels Trafficking of Humans", diakses dari <http://www.digitaljournal.com/article/263354> pada 10 Juni 2019

²²³ Refworld, "2013 Trafficking in Person Report: India", diakses dari <https://www.refworld.org/docid/51c2f3b7c.html> pada 17 Juni 2019

membahayakan secara mental, fisik, sosial, dan moral.²²⁴ Berdasarkan *International Labor Organization* (ILO) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), *child labour* yaitu: pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah usia kerja minimum, pekerjaan yang dilakukan cenderung membahayakan kesehatan dan keselamatan anak-anak tersebut, dan bentuk pekerjaan yang dapat merugikan anak-anak yang melakukannya seperti perbudakan, *human trafficking*, *forced labour*, *debt bondage*, dan aktivitas terlarang lainnya.²²⁵

Survei nasional India menunjukkan jika lebih dari 16 juta anak-anak berusia 8 sampai 14 tahun telah bekerja.²²⁶ Terutama anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan yang cenderung lebih memilih bekerja daripada bersekolah. *Child labour* di India terbagi dalam tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan sektor jasa. Pertanian menjadi sektor paling tinggi dalam *child labour*, sebanyak 56,4% anak-anak bekerja dalam sektor tersebut. Selanjutnya, diikuti oleh sektor industri yang mempekerjakan anak-anak sebanyak 33,1%, dan sektor jasa sebanyak 10,4%.²²⁷

Di sektor pertanian, anak-anak biasanya bekerja di produksi biji kapas hibrida yang terdapat di 6 wilayah meliputi: Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu,

²²⁴ Dr. G.L. Parvathamma, "Child labour in India: A Conceptual and Descriptive Study", *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vol. 4, Issue. 1, 2015, hlm. 23.

²²⁵ International Law and Policy Institute (LIPI), "Child Labour in Indian Cottonseed Sector", diakses dari <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jkwpsdr/article/download/285/160> pada 10 Juni 2019

²²⁶ Parvathamma, "Child labour in India", hlm. 25.

²²⁷ Bureau of International Labor Affairs U.S., "Findings on the Worst Forms of Child Labor", diakses dari <https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/reports/child-labor/findings/TDABook.pdf> pada 10 Juni 2019

Karnataka, Gujarat, dan Maharashtra.²²⁸ Selain kapas hibrida, *child labour* juga bekerja memproduksi benih sayuran, dan produksi tebu. Sedangkan, dalam sektor industri, anak-anak bekerja di produksi pakaian, kembang api, karpet tenun, rokok, batu bara, hingga menambang mika.²²⁹ Untuk sektor industri biasanya mencakup pekerjaan seperti bekerja berjualan makanan di jalanan, memperbaiki kendaraan, bekerja di bidang konstruksi, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, hingga memberikan layanan untuk seks komersil.²³⁰

Adanya *child labour* di India di pengaruhi oleh *supply* dan *demand*. Kemiskinan masih menjadi alasan utama yang melatarbelakangi *child labour*. Para orangtua umumnya meminta anak-anaknya untuk bekerja agar dapat menambah pemasukan keluarga. Diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh dari anak-anak yang bekerja berkisar menyumbang 25% sampai 40% pendapatan rumah tangga.²³¹ Selain itu, kurangnya fasilitas sekolah yang memadai menjadi alasan lain bagi anak-anak untuk memilih berkerja. Sedangkan, dari sisi *demand*, adanya *child labour* mampu mengurangi harga produksi karena anak-anak yang dipekerjakan biasanya dibayar murah.²³²

Kurangnya pembangunan infrastruktur untuk pendidikan terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan berdampak pada banyaknya anak-anak di India yang tidak bersekolah. Rendahnya tingkat iliterasi berpengaruh pada mudahnya mereka ditipu oleh *traffickers* dengan berbagai iming-iming yang

²²⁸ LIPI, "Child Labour in Indian Cottonseed Sector".

²²⁹ Bureau of International Labor Affairs U.S., "Findings on the Worst".

²³⁰ Parvathamma, "Child labour in India", hlm. 26.

²³¹ Parvathamma, "Child labour in India", hlm. 24.

²³² Parvathamma, "Child labour in India", hlm. 25.

diberikan. Kesulitan ekonomi menjadi alasan bagi anak-anak di India untuk lebih memilih bekerja di industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja murah. Padahal seharusnya mereka dapat memanfaatkan waktu mereka untuk hal-hal lain selain bekerja.

Human trafficking di India tidak hanya dipengaruhi oleh *supply* dan *demand* dari pasar gelap, melainkan juga dipengaruhi oleh pemikiran para *traffickers* yang menekankan pada aspek bisnis daripada kriminal. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, jika *human trafficking* merupakan kejahatan transnasional yang sangat menguntungkan. Hal ini yang membuat para *traffickers* mencari cara agar dapat memaksimalkan keuntungan dari *human trafficking*. Seperti *child labour* yang mempekerjakan anak-anak India di industri pertanian maupun industri baju dan lainnya dengan alasan mereka dapat dibayar murah. Sehingga *demand child labour* cukup tinggi di wilayah industrial di India karena pemilik pabrik tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk produksi jika mereka mempekerjakan anak-anak.

Selain itu, terdapat pula *bonded labour* atau *debt bondage* yakni bentuk eksploitasi yang di dasarkan pada hubungan antara pekerja dengan majikan.²³³ Atau bisa disebut dengan perbudakan. Menurut Kevin Bales, perbudakan didefinisikan sebagai hilangnya kehendak bebas orang yang diperbudak. Orang yang memperbudak memiliki kontrol dengan penggunaan ancaman atau

²³³ Finn, "Bonded Labor in India".

kekerasan untuk mengeksploitasi tenaga kerja orang yang diperbudak.²³⁴ Umumnya *bonded labour* di India terjadi karena masalah ekonomi yang menyebabkan seseorang terikat hutang. Kemudian seseorang tersebut akan membayar hutangnya dengan cara bekerja kepada orang yang memberi pinjaman dalam jangka waktu tidak tentu dan biasanya juga melibatkan tindak kekerasan.²³⁵ Meskipun awalnya seseorang terikat kontrak secara ekonomi namun, begitu terlibat dalam *bonded labour* terdapat hal-hal yang terjadi dimana itu tidak ada di dalam kontrak sebelumnya.²³⁶ Jangka waktunya juga tidak menentu karena hubungan seperti ini biasanya akan diteruskan ke sanak keluarga lainnya. *Bonded labour* ini terjadi bisa karena paksaan maupun karena budaya seperti hubungan antar kelas atau kasta di India dan kondisi kemiskinan.²³⁷

Salah satu wilayah di India yang terdapat praktik *Debt bondage* atau *bonded labour* yakni Maharashtra. Praktik *debt bondage* tersebut terjadi di industri-industri seperti bidang konstruksi, pertanian, pertambangan, dan pembuatan batu bata.²³⁸ Untuk mengatasi *bonded labour* ini, Mahkamah Agung membentuk sebuah komite yang bertugas mewaspadai sektor-sektor tempat *bonded labour* terjadi. Sektor-sektor tersebut meliputi; tempat pembakaran batu bata, pertambangan, sektor konstruksi, tempat menenun karpet, pertanian, dan tempat lainnya.²³⁹ Komite tersebut harus melakukan survei pada tingkat distrik dan sub-

²³⁴ Alexis A. Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Being* (London: Praeger, 2009), hlm. 28.

²³⁵ Ravi S. Srivastava, "Bonded Labour in India: Its Incidence and Pattern", *Working Paper* No. 43, 2005, hlm. 2.

²³⁶ Srivastava, "Bonded Labour in India".

²³⁷ Finn, "Bonded Labour in India".

²³⁸ Global Slavery Index, "Global Slavery Index 2016", hlm. 117

²³⁹ Global Slavery Index, "Global Slavery Index 2016", hlm. 117.

distrik setiap tiga tahun serta melaporkan temuan mereka kepada *National Human Rights Commission*.²⁴⁰ Namun, upaya yang dilakukan untuk mengatasi *bonded labour* ini kurang efektif karena diketahui terdapat hubungan antara *traffickers* dengan pemilik tempat pembakaran batu bata. Sehingga, memungkinkan *traffickers* tersebut terhindar dari tuntutan.²⁴¹

5.3. Kondisi Sosial serta Jaringan TOC dalam *Human Trafficking* di India

Selain faktor politik dan ekonomi, kejahatan transnasional juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Jika dalam *Political models* fokus pada kesempatan yang dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan transnasional dan bekerja sama dengan pejabat pemerintah yang korup. Kemudian *economic models* menekankan pada dinamika pasar. Namun, dalam *social models* fokus pada kondisi sosial dan budaya yang mendorong serta memfasilitasi adanya kejahatan transnasional. Dalam model of TOC, terdapat tiga bagian yaitu: *cultural model*, *ethnic network model*, dan *social network model*. Dijelaskan dalam *cultural model* bahwa kelompok kejahatan transnasional terbentuk atas dasar hubungan kekeluargaan. Sehingga terdapat sifat loyal yang bukan ditujukan kepada negara melainkan, pada kelompok etnis atau keluarganya.²⁴²

Kemudian dalam *ethnic network model* yang menjelaskan jika kelompok kejahatan transnasional dapat memanfaatkan diaspora sebuah etnis terlebih yang berstatus imigran. Imigran yang biasanya termarginalisasi di suatu negara rentan

²⁴⁰ Global Slavery Index, "Global Slavery Index 2016", hlm. 117.

²⁴¹ Global Slavery Index, "Global Slavery Index 2016", hlm. 117.

²⁴² Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 328.

terhadap ajakan untuk ikut bergabung dalam kelompok kejahatan transnasional.²⁴³ Sedangkan, *social network model* melihat adanya keterkaitan antara kelompok kriminal dengan pejabat pemerintah. Sehingga kelompok kejahatan tersebut dapat memaksimalkan peluang yang dimiliki untuk menjalankan aksinya. Selain itu, kelompok kejahatan transnasional dicerminkan sebagai jaringan dengan tingkat fleksibilitas tinggi dan kemampuan untuk melewati batas negara.²⁴⁴

Kejahatan *human trafficking* di India bukanlah hal yang baru terjadi. Walaupun pemerintah telah berupaya untuk mengatasi *human trafficking* namun, kejahatan ini masih berkembang di India. Kemiskinan menjadi akar dari mudahnya kejahatan *human trafficking* terus meluas di India. Sehingga tak jarang yang menjadi *traffickers* justru berasal dari anggota keluarga atau kerabat korban. Selain karena desakan ekonomi, para *traffickers* yang memiliki keterikatan secara keluarga memberikan kemudahan bagi mereka untuk berkomunikasi dan menimbulkan rasa saling percaya. Kepercayaan seperti ini lebih mudah dibangun dengan seseorang dari kelompok etnis, bahasa, ataupun budaya yang sama.²⁴⁵

Jenis *trafficking* seperti *bonded labour* merupakan salah satu contoh *trafficking* yang melibatkan anggota keluarga sebagai *traffickers*nya. Hutang menjadi ikatan yang digunakan oleh majikan untuk mempekerjakan pegawainya dalam rentang waktu lama sampai pegawai tersebut dapat membayar kembali hutangnya. Dengan demikian, pegawai atau pekerja tersebut tidak diberi upah karena ia

²⁴³ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 334.

²⁴⁴ Williams dan Godson, "Anticipating Organized", hlm. 336.

²⁴⁵ Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 95.

bekerja untuk melunasi hutangnya.²⁴⁶ Jika pekerja tidak sanggup membayar hutangnya, maka pekerjaan yang sebelumnya akan diturunkan kepada anak-anaknya. Tidak ada kesempatan bagi anak-anak tersebut untuk melarikan diri karena banyak dari mereka yang lahir dari keluarga miskin dan tidak mengerti jika mereka mengalami perbudakan. Selama bekerja, anak-anak yang menjadi *bonded labour* di industri-industri di India mengalami pelecehan dan paksaan untuk bekerja melebihi jam kerja seharusnya.²⁴⁷

Selain *bonded labour*, ada pula *child marriage* yakni pernikahan anak dibawah umur yang banyak terjadi di wilayah-wilayah miskin di India. Pernikahan anak dibawah umur terjadi bukan hanya karena desakan ekonomi, melainkan juga ada kaitannya dengan tradisi di India yang disebut dengan *Dowry*. Tradisi ini juga berkaitan dengan norma patriarki yang tinggi di India. Pemikiran bahwa perempuan merupakan beban dalam keluarga membuat mereka rentan terhadap *child marriage* karena ketika perempuan menikah, maka tanggung jawab ekonomi tidak akan dibebankan lagi kepada orang tua mereka.²⁴⁸

Meskipun tradisi *dowry* tidak bisa dinilai secara langsung sebagai *human trafficking* namun, para *traffickers* biasanya menggunakan *child marriage* sebagai modus atau peluang untuk menjaring korban. Para *traffickers* akan menawarkan proposal beserta mahar secara langsung kepada korban yang ditargetkan. Bagi keluarga dengan ekonomi rendah, mereka akan menerima tawaran itu namun,

²⁴⁶ Mishra, "Combating Human Trafficking", hlm. 174.

²⁴⁷ Mishra, "Combating Human Trafficking".

²⁴⁸ Nirantar Trust, "Early and Child Marriage in India", diakses dari https://ajws.org/wp-content/uploads/2015/05/EarlyChildMarriageinIndia_LandscapeAnalysis_FULL.pdf pada 10 Juni 2019

mereka tidak tahu jika sebenarnya itu termasuk dalam *trafficking*. Kurangnya pendidikan serta pengetahuan mengenai *trafficking* membuat mereka tidak menyadari jika mereka telah menjual anaknya sendiri.²⁴⁹ Ketika orangtua sudah menerima mahar yang ditawarkan dan memberikan anaknya kepada *traffickers* maka, anak tersebut akan dijual lagi oleh *traffickers* untuk *false marriage* maupun jenis *trafficking* lainnya.²⁵⁰ Di wilayah India Utara, gadis-gadis muda diperdagangkan untuk memenuhi permintaan pengantin karena jumlah anak-anak perempuan hanya sedikit.²⁵¹

Selain perempuan dan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, korban lainnya dari *human trafficking* di India adalah para imigran ataupun pengungsi. Dalam laporan *Trafficking in Person* tahun 2016, akibat gempa yang terjadi di Nepal tahun 2015 banyak masyarakat Nepal datang ke India yang menjadi korban *human trafficking*. Perempuan Nepal yang transit di India menjadi target *human trafficking* dan dikirim menuju Timur Tengah dan Afrika. Sedangkan, laki-laki Nepal banyak yang terlibat *forced labour* di tambang batu bara di India.²⁵²

Masyarakat Nepal banyak yang melarikan diri menuju India untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Kondisi ini digunakan oleh kelompok kejahatan untuk mengumpulkan korban dengan memberikan iming-iming pekerjaan dan uang. Cara paling umum yang digunakan oleh para *traffickers* biasanya menggunakan ancaman atau pemaksaan serta penipuan dengan

²⁴⁹ Trust, "Early and Child Marriage in India".

²⁵⁰ Biswajit Ghosh, "Trafficking in Women and Children in India: Nature, Dimension, and Strategies for Prevention", *The International Journal of Human Rights*, Vol. 13, No. 5, 2009, hlm. 733.

²⁵¹ Ghosh, "Trafficking in Women and Children in India", hlm. 719.

²⁵² Refworld, "2016 Trafficking in Persons Report: India".

menyamar sebagai agensi yang menawarkan pekerjaan Sehingga banyak dari masyarakat Nepal yang akhirnya terjebak dalam *trafficking* karena menerima tawaran *traffickers* terutama anak-anak yang terpisah dari keluarganya pasca gempa. Perwakilan Nepal di UNICEF, Tomoo Hozumi menyatakan jika *traffickers* menjanjikan pendidikan, makanan, dan masa depan lebih baik padahal kenyatannya banyak dari anak-anak yang dijanjikan justru dieksploitasi dan disiksa.²⁵³

Gempa bumi yang terjadi pada April dan Mei tahun 2015 di Nepal mengakibatkan kejahatan *human trafficking* semakin marak melalui perbatasan Nepal-India. Otoritas wilayah Uttar Pradesh menemukan adanya *child trafficking* dari Nepal menuju Mumbai. Terdapat 15 anak-anak yang dijual seharga Rs. 1,500 untuk masing-masing anak. Pemerintah wilayah Uttar Pradesh telah melakukan 50-60 penangkapan terkait *human trafficking*.²⁵⁴ Pasukan penjaga perbatasan India-Nepal *Sashastra Seema Bal* (SSB) berhasil menangkap sekitar 50 anak perempuan dan laki-laki yang diduga menjadi korban *forced labour* dan *sex trafficking*. Pada Juni 2015, pasukan tersebut menangkap 15 tersangka pelaku *human trafficking* yang membuat anak perempuan dan laki-laki dari Nepal

²⁵³ Eleanor Goldberg, "Hundreds of Children in Nepal are at Risk of Trafficking After Earthquake. Here's Who's Helping", diakses dari https://www.huffpost.com/entry/nepal-children-trafficking_n_7637776 pada 10 Juni 2019

²⁵⁴ ABC News, "Nepal Earthquake: More Than 160 Trafficked Nepalis Rescued by India in Aftermath of Quake", diakses dari <https://www.abc.net.au/news/2016-02-15/nepal-earthquakes-cause-spike-in-human-trafficking/7168398> pada 10 Juni 2019

melintasi perbatasan secara ilegal. Diduga anak-anak tersebut dipaksa untuk melintasi perbatasan.²⁵⁵

Selain korban, yang menjadi perhatian dalam *human trafficking* adalah aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Dalam kejahatan *human trafficking*, aktor yang terlibat di dalamnya bisa terdiri lebih dari satu orang. Struktur mengenai *traffickers* dalam *human trafficking* terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, yakni *master trafficker* merupakan kepala yang mengatur kejahatan *human trafficking*. Biasanya yang menjadi kepala atas aktivitas *trafficking* merupakan orang yang paling sulit dicari informasinya karena tidak semua bawahan atau anggotanya mengetahui siapa atasannya.

Kedua, *primary traffickers* yang bertugas untuk mengidentifikasi peluang dengan melihat adanya permintaan misalnya untuk *sex trafficking* kemudian mencari tempat untuk tinggal sementara untuk korban *trafficking*. Ketiga, terdapat *secondary traffickers*, bertugas sebagai pengantar korban menuju ke *brothel-brothel* yang ada di India seperti *red lights* di Mumbai. Selain itu, terdapat orang yang bertugas untuk merekrut korban dengan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap ditinggali oleh masyarakat yang kurang sejahtera yang nantinya informasi yang didapat akan diberikan kepada *master traffickers* terlebih dulu..²⁵⁶

Selain itu, masih terdapat aktor lain yang berperan dalam proses *trafficking* seperti agen-agen dari biro jodoh atau agen penyalur pekerja. Ada pula

²⁵⁵ Murali Khrisnan, "Nepal's Quake Survivors Face Increased Risk of Trafficking", diakses dari <https://www.dw.com/en/nepals-quake-survivors-face-increased-risk-of-trafficking/a-18599390> pada 10 Juni 2019

²⁵⁶ Gilbertson, "Globalization and the Sex Trafficking Industry", hlm. 36.

transporter atau orang yang memindahkan korban yang mana biasanya orang ini akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengirimkan korban lintas batas. Informasi yang dikumpulkan meliputi melakukan pengawasan di perbatasan, mempelajari prosedur imigrasi dan transit, serta melihat bagaimana penegakan hukum dilakukan.²⁵⁷ Melalui informasi yang diperoleh maka, akan memudahkan *traffickers* untuk memindahkan korban karena telah mengetahui resiko yang akan dihadapi.

Traffickers juga tak jarang bekerjasama dengan pejabat publik untuk melancarkan aksinya. *Traffickers* bekerjasama dengan cara melakukan suap kepada pejabat publik yang korup atau mendapat layanan seksual dari korban, sehingga pejabat tersebut memfasilitasi pergerakan korban *trafficking*, melindungi pelaku *trafficking* dan pemilik *brothel* dari penegakan hukum. Seperti yang terjadi di negara bagian Haryana dimana polisi memperkosa beberapa tahanan yang merupakan korban *trafficking* dan menghancurkan bukti jika terlibat dalam proses *trafficking* tersebut.²⁵⁸ Atau pada tahun 2016 diketahui seorang pejabat departemen sumber daya air di Goa dan rekannya di Mumbai ditangkap karena menjalankan prostitusi.²⁵⁹

Keuntungan yang diperoleh *traffickers* beroperasi dalam suatu jaringan memberikan kemudahan mengakses informasi terkait *supply* dan *demand* dalam *human trafficking*. Terlebih jika bekerjasama dengan jaringan lain terutama

²⁵⁷ Najar, "Human Trafficking in India".

²⁵⁸ Refworld, "2013 Trafficking in Person Report: India", diakses dari <https://www.refworld.org/docid/51c2f3b7c.html> pada 10 Juni 2019

²⁵⁹ Refworld, "2016 Trafficking in Persons Report: India".

pejabat pemerintah yang dapat meminimalisasi resiko penangkapan karena *traffickers* tersebut sudah mengetahui celah dalam penegakan hukum dan mendapat perlindungan dari pejabat korup. Adanya kerjasama dengan jaringan lain seperti polisi, pihak migrasi, penjaga perbatasan, maupun pihak lainnya membuat kejahatan *human trafficking* meluas di India.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pemerintah India telah berupaya menangani kejahatan *human trafficking* dengan meratifikasi konvensi internasional dan regional serta membentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *human trafficking*. Namun, upaya tersebut dinilai kurang signifikan untuk mengatasi *human trafficking* yang ada. Berdasarkan laporan TIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, India masih stabil berada di Tier 2 dari tahun 2011. Hal ini karena India masih belum sepenuhnya mematuhi standar minimum TVPA terkait perlindungan terhadap korban *human trafficking*. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan *human trafficking* di India mulai dari politik, ekonomi, hingga faktor sosial.

India sebagai negara sumber juga tujuan dari *human trafficking* membuat kejahatan tersebut sulit untuk diatasi. Adanya *demand* terkait *human trafficking* seperti permintaan layanan seksual di sektor pariwisata maupun *demand* buruh murah di sektor industri memberikan peluang bagi *traffickers* untuk memenuhi permintaan tersebut. Terlebih India banyak mendapat perpindahan penduduk dari negara tetangga seperti Nepal dan Bangladesh. Kondisi perekonomian seperti kemiskinan menjadi akar permasalahan semakin maraknya praktik *human trafficking* di India.

Kondisi negara India yang lemah terutama dalam pengawasan perbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Bangladesh dan Nepal memberikan ruang bagi para *traffickers* untuk melancarkan aksinya. Terlebih lagi dengan adanya korupsi pejabat publik dan kerjasama yang dilakukan dengan kelompok kejahatan transnasional semakin sulit untuk melawan *human trafficking*. Tindakan korupsi oleh pihak berwenang seperti menerima suap, turut terlibat dalam kartel *human trafficking*, hingga tidak melaporkan maupun melakukan investigasi kasus *human trafficking* membuat kejahatan ini semakin berkembang di India. Adanya konflik etnis di India juga dapat memberikan peluang bagi *traffickers* untuk menjangkit korban.

Dari sisi ekonomi, kemiskinan yang menjalar di daerah-daerah marginal di India menjadi alasan utama banyaknya korban yang terlibat dalam *trafficking*. Kurangnya tingkat pendidikan dan sosialisasi mengenai *human trafficking* menjadikan para *traffickers* mudah membujuk korban-korbannya. Hal ini yang mendorong adanya *forced marriage* di beberapa wilayah di India. Selain itu, tingginya *demand* terhadap pekerja murah di industri-industri atau pertanian di India meningkatkan pula *forced labour* yang juga membuat anak-anak menjadi korban. Selain itu, *demand* untuk aktivitas seksual terutama di sektor pariwisata membuat para *traffickers* berupaya untuk memenuhi permintaan tersebut.

Sedangkan, dari sisi sosial, keterlibatan anggota keluarga dengan kelompok kejahatan transnasional seperti *bonded labour* di beberapa wilayah di India membuat aktivitas *human trafficking* sulit untuk diatasi. Kemudian adanya perpindahan penduduk dari Nepal menuju India akibat gempa merupakan peluang

bagi para *traffickers*. Kurangnya kontrol perbatasan dan kondisi masyarakat yang rentan ini digunakan *traffickers* menjerat korban dengan cara dijanjikan mendapat pekerjaan, uang, dan masa depan lebih baik. Selain itu, hubungan antara kelompok kejahatan transnasional dengan pejabat publik korup semakin memudahkan mereka untuk meluaskan kejahatan *human trafficking* di India.

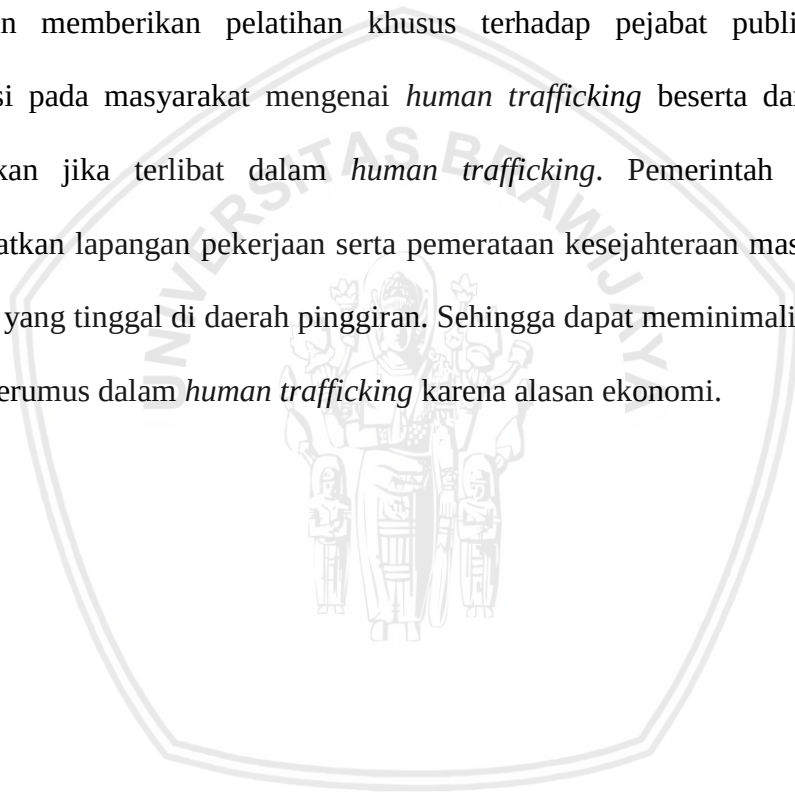
Ketiga aspek diatas berdampak pada adanya *human trafficking* di India karena sebagian besar aspek-aspek tersebut terkait dengan kondisi domestik di India. Lemahnya penegakan hukum, adanya korupsi yang dilakukan pejabat publik melalui bekerjasama dengan pelaku *human trafficking*, kurangnya kontrol perbatasan, tingginya tingkat kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, adanya permintaan *human trafficking* serta pengaruh kondisi sosial di masyarakat membuat penyebaran *human trafficking* di India terus meluas.

6.2. Saran

Penulis menyadari jika dalam penelitian ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Penulis menyarankan untuk kedepannya terdapat lebih banyak penelitian yang menggunakan model of TOC milik Godson dan Williams untuk menganalisis kasus *human trafficking* di negara lain. Hal ini dikarenakan penulis merasa jika model of TOC sering digunakan untuk menganalisis *drug trafficking* dan jarang digunakan untuk melihat kejahatan transnasional lainnya termasuk *human trafficking*. Adanya penelitian serupa dengan penggunaan model yang sama nantinya dapat memberikan gambaran

berbeda serta mampu menambah pengetahuan terkait dengan kejahatan transnasional terorganisir terutama *human trafficking*.

Selain itu, penulis menyarankan agar pemerintah India maupun pemerintah di negara-negara lainnya meningkatkan investigasi, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi pelaku *human trafficking* maupun pejabat publik yang terkait. Kemudian memberikan pelatihan khusus terhadap pejabat publik maupun sosialisasi pada masyarakat mengenai *human trafficking* beserta dampak yang ditimbulkan jika terlibat dalam *human trafficking*. Pemerintah juga perlu meningkatkan lapangan pekerjaan serta pemerataan kesejahteraan masyarakatnya terutama yang tinggal di daerah pinggiran. Sehingga dapat meminimalisasi korban yang terjerumus dalam *human trafficking* karena alasan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albanese, Jay S. *Organized Crime From the Mob to Transnational Organized Crime Seventh Edition*. New York: Anderson Publishing, 2011.
- Aronowitz, Alexis A. *Human Trafficking , Human Misery: The Global Trade in Human Being*. London: Praeger, 2009.
- Belles, Nita. *Defining Sex Trafficking* dalam Lenore Walker, et al., *Handbook of Sex Trafficking: Feminist Transnational Perspectives*. Switzerland: Springer, 2018.
- Lamont, Christopher. *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications, 2015.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Miko, Francis T. *International Human Trafficking* dalam Kimberley L. Thachuk, *Transnational Threats: Smuggling and Trafficking in Arms, Drugs, and Human Life*. London: Praeger Security Internasional, 2007.
- Neumann, Iver B. *Discourse Analysis* dalam Audie Klotz and Deepa Prakash. *Qualitative Methods in International Relation*. New York: Palgrave MacMillan, 2008.
- Picarelli, John T. *Transnational Organized Crime* dalam Paul D. Williams. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge, 2008.
- Shelley, Louise. *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Shelley, Louise. *International Trafficking: An Important Component of*

Transnational Crime dalam Shiro Okubo dan Louise Shelley. *Human Security, Transnational Crime, and Human Trafficking*. New York: Routledge, 2011.

Ward, Richard H. dan Daniel J. Mabrey, *Transnational Organized Crime in Asia and Middle East* dalam Jay S. Albanese dan Philip L. Reichel, *Transnational Organized Crime: An Overview from Six Continents*. California: SAGE Publications, 2013.

Jurnal

Barua, Saurojit. "Human Trafficking in India". *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, Vol. 2, Issue. 3 (2018): 2453.

Bhanu, Dr. Arvind, dan Rajni K. Mishra. "Child Trafficking in India". *International Journal of Law*, Vol. 2, Issue. 1 (2016): 34.

Bharadwaj, Kasturi. "Ethnicity in Assam: Understanding the Complexities of Ethnic Identities and Conflicts". *Indian Journal of Public Administration*, Vol. LXII, No. 3 (2016): 549.

Caballero-Anthony, Mely. "A Hidden Scourge". *Journal of Finance and Development*. Vol. 55, No. 3 (2018):19.

Carolyn, et al. "Sex Trafficking in the Tourism Industry". *Journal of Tourism & Hospitality*, Vol. 4, Issue. 4 (2015): 2.

Chin, Ko-Lin dan Roy Godson. "Organized Crime and the Political-Criminal Nexus in China". *Trends in Organized Crime*, Vol. 9, No. 3 (2006): 21.

Cockayne, James. "Transnational Organized Crime: Multilateral Responses to a Rising Threat". *Coping with Crisis Working Paper Series*. New York: International Peace Academy, 2007.

Eerz,Edna. "Women as Victims and Survivors in the Context of Transnational Human Trafficking for Commercial Sex Exploitation". *International Review of Penal Law Journal*, Vol. 81, No. 3 (2010): 552.

- Forster, Bruce A. "Human Trafficking: A Transnational Organized Criminal Activity". *American International Journal of Contemporary Research*, Vol. 3, No. 1 (2013): 1.
- Friman, Richard. "Just Passing Through: Transit States and The Dynamics of Illicit Transshipment". *Transnational Organized Crime Journal*, Vol.1, No.1 (1995): 65-83.
- Ghosh, Biswajit. "Trafficking in Women and Children in India: Nature, Dimension, and Strategies for Prevention". *The International Journal of Human Rights*, Vol. 13, No. 5 (2009): 733.
- Gilbertson, Mary R. "Globalization and the Sex Trafficking Industry: Examination of Effects on Regional Value Chain Operations" thesis, Saint John's University, 2015.
- Godson, Roy. "Political-Criminal Nexus". *Trends in Transnational Organized Crime*, Vol. 4, Issue 3 (1997): 5.
- Hameed, Sadika, et al. "Human Trafficking in India: Dynamics, Current Efforts, and Intervention Opportunities for the Asia Foundation" PhD diss., University of Stanford, 2010.
- Hart, Sarah M. "Destinations: A Comparison of Sex Trafficking in India and the United States". *University of Colorado Law Review*, Vol. 83 (2012): 1150.
- Huda, S. "Sex Trafficking in South Asia". *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, Vol. 94, Issue 3 (2006): 374-375.
- Klitgaard, Robert. "International Cooperation Against Corruption". *Finance & Development*, Vol. 35, No.1 (1998): 3-7.
- Kumar, Chanchal. "Human Trafficking in the South Asian Region: SAARC's Response and Initiatives". *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1, No. 1, (2015): 16.

- Le, Vy. "Organised Crime Typologies: Structure, Activities and Conditions. *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol.1 (2012): 121.
- Meshelemiah, Jacquelyn, dan Siddhartha Sarkar. "A Comparative Study Of Child Trafficking in India and the United States". *Journal of Trafficking, Organized Crime, and Security*, Vol. 1, No. 2 (2015): 128.
- Mishra, Eira. "Combating Human Trafficking: A Legal Special Reference to India". *Journal of Sociology and Anthropology*, Vol.1, No. 4 (2013): 177.
- Pandey, Madhumita. "Sex Slavery in India: Unpacking Stories of Trafficking Victims". *Sociology Study*, Vol. 6, No. 10 (2016): 634.
- Parvathamma, Dr. G. L. "Child labour in India: A Conceptual and Descriptive Study". *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vol. 4, Issue. 1 (2015): 23.
- Pimentel, Stanley. "The Nexus of Organized Crime and Politics in Mexico: Mexico's Legacy of Corruption". *Trends in Organization Crime*, Vol. 4, No.3 (1999): 14.
- Rahaman, MD. R. "Human Trafficking in South Asia (Special Preferences on Bangladesh, India, and Nepal): A Human Rights Perspective". *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 20, Issues 3 (2015): 2.
- Ray, Sawmya. "Vulnerability and Coercion: A Study of Sex Trafficking in Assam". *Sociological Bulletin*, Vol. 64, No. 3 (2015): 306.
- Roy, Sanjoy, dan Chandan Chaman. "Human Rights and Trafficking in Women and Children in India". *Journal of Historical Archaeology and Anthropological Sciences*, Vol. 1, Issue. 5 (2017).

- Sarker, Prrofulla C., dan Pranab K. Panday. "Trafficking in Women and Children in Bangladesh: A National Issue in Global Perspective". *Asian Journal of Social Policy*, Vol. 2, No. 2 (2006).
- Savona, Ernesto U. "Harmonising Policies for Reducing The Transnational Organised Crime Risk Transcrime". *Working Paper* No. 2 (1995).
- Srivastava, Ravi S. "Bonded Labour in India: Its Incidence and Pattern". *Working Paper* No. 43 (2005): 2.
- Udin, M. Bashir. "Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security". *International Journal of Social Work and Human Service Practice*, Vol. 2, No. 1(2014): 21.
- Williams, Phil dan Roy Godson. "Anticipating Organized and Transnational Crime". *Law & Social Change*, (2002): 315.

Report

- Authority of the Speaker of the House of Commons Canada. "A Global Fight: Supporting Efforts to Address Sex Trafficking in South Asia".
<http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FAAE/Reports/RP9668824/faaerp15/faaerp15-e.pdf> (diakses 26 April 2019).
- Bangladesh Institute of Peace and Security Studies. "Human Trafficking: A Security Concern for Bangladesh".
<https://www.files.ethz.ch/isn/164375/Issue%209.pdf> (diakses 30 April 2019).
- Bureau of International Labor Affairs U.S. "Findings on the Worst Forms of Child Labor".
<https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/reports/child-labor/findings/TDABook.pdf> (diakses 10 Juni 2019).

ECPAT. "Sex Trafficking of Children in India".

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/Factsheet_India.pdf (diakses 10 Juni 2019).

European Court of Auditors. "Special Report: EU Support to Fight

Human Trafficking in South/South East Asia." https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_9/SR_HUMAN_TRAFFICKING_EN.pdf (diakses 10 Februari 2019).

Global Slavery Index. "India".

<https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/india/> (diakses 29 April 2019).

_____. "Regional Findings".

<https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/regional-findings/> (diakses 10 Februari 2019).

Human Rights First. "Human Trafficking by The Number".

<https://www.humanrightsfirst.org/resource/human-trafficking-numbers> (diakses 10 Februari 2019).

ILO. "Statistics on Forced Labour, Modern Slavery and Human

Trafficking". <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/policy-areas/statistics/lang--en/index.htm> (diakses 8 Mei 2019).

_____. "The Demand Side of Human Trafficking in Asia: Empirical

Findings". https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_73_en.pdf (diakses 10 Juni 2019).

_____. "What is Forced Labour, Modern Slavery, and Human

Trafficking". <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm> (diakses 8 Juli 2019).

International Law and Policy Institute. "Child Labour in Indian

Cottonseed Sector".

<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jkwpsdr/article/download/285/160> (diakses 10 Juni 2019).

National Crime Records Bureau. "Crime in India 2015 Statistics".

<http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2015/chapters/Chapter%206A-15.11.16.pdf> (diakses 29 April 2019).

_____. "Crime in India 2016 Statistics".

<http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/NEWPDFs/Crime%20in%20India%20-%202016%20Complete%20PDF%20291117.pdf> (diakses 29 April 2019).

Nirantar Trust. "Early and Child Marriage in India".

https://ajws.org/wp-content/uploads/2015/05/EarlyChildMarriageinIndia_LandscapeAnalysis_FULL.pdf (diakses 10 Juni 2019).

Refworld. "2011 Trafficking in Person Report: India".

<https://www.refworld.org/docid/4e12ee7427.html> (diakses 17 Juni 2019)

_____. "2013 Trafficking in Person Report: India".

<https://www.refworld.org/docid/51c2f3b7c.html> (diakses 17 Juni 2019).

_____. "2014 Trafficking in Person Report: India".

<https://www.refworld.org/docid/53aab9ec14.html> (diakses 23 Mei 2019).

_____. "2015 Trafficking in Person Report: Bangladesh".

<https://www.refworld.org/docid/55b73c1531.html> (diakses 17 Juni 2019).

_____. "2015 Trafficking in Person Report: India".

<https://www.refworld.org/docid/55b73be315.html> (diakses 23 Mei 2019).

_____. "2016 Trafficking in Persons Report: India".

<https://www.refworld.org/docid/577f95f89.html> (diakses 23 Mei 2019).

The Center for Reproductive Rights. "Ending Impunity for Child

Marriage in India: Normative and Implementation Gaps".

<https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/Ending-Impunity-for-Child-Marriage-India-WebUpdate-0218.pdf> (diakses 8 Juli 2019).

Transparency International. "Corruption Perception Index 2013".

<https://www.transparency.org/cpi2013/results> (diakses 23 Mei 2019).

_____. "Corruption Perception Index 2014".

<https://www.transparency.org/cpi2014/results> (diakses 23 Mei 2019).

_____. "Corruption Perception Index 2016".

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (diakses 23 Mei 2019).

UNITAR. "Human Trafficking and the Role of Local Governments".

https://www.unitar.org/dcp/sites/unitar.org.dcp/files/uploads/newcoverhuman_trafficking_final.compressed.compressed.pdf (diakses 23 Mei 2019).

UNODC. "Global Report on Trafficking in Persons".

https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf (diakses 17 Juni 2019).

_____. "Human Trafficking".

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html> (diakses 11 Mei 2019).

_____. "Issue Paper: The Role of Corruption in Trafficking in

Persons". https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2011/Issue_Paper_-_The_Role_of_Corruption_in_Trafficking_in_Persons.pdf (diakses 15 Maret 2019).

_____. "Organized Crime".

https://www.unodc.org/ropan/en/organized_crime.html (diakses 5 Maret 2019).

_____. “The Threat of Transnational Organized Crime”.

<https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf> (diakses 15 Februari 2019).

_____. “Trafficking in Persons and Migrants Smuggling”.

<https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/trafico-de-pessoas/index.html> (diakses 23 Mei 2019).

_____. “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto”

<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf> (diakses 8 Mei 2019).

U.S. Department of States. “2014 Trafficking in Person Report-India”.

<https://www.refworld.org/docid/53aab9ec14.html> (diakses 29 April 2019).

_____. “2017 Trafficking in Person Report India”.

<https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271205.htm> (diakses 29 April 2019).

_____. “Trafficking in Persons Report 2010”.

<https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/142760.htm> (diakses 29 April 2019).

_____. “Trafficking in Person Report June 2013”.

<https://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf> (diakses 10 Februari 2019).

Verite Organization. “Corruption & Labor Trafficking in Global Supply

Chains”. <https://www.verite.org/wp-content/uploads/2016/11/WhitePaperCorruptionLaborTrafficking.pdf> (diakses 15 Maret 2019).

Internet

ABC News. “Nepal Earthquake: More Than 160 Trafficked Nepalis

Rescued by India in Aftermath of Quake”.

<https://www.abc.net.au/news/2016-02-15/nepal-earthquakes-cause-spike-in-human-trafficking/7168398> (diakses 10 Juni 2019).

Asian Human Rights Commission. "India: Police Officers run Human Trafficking Cartel".

<http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-036-2013/> (diakses 23 Mei 2019).

Bhalla, Nita. "India Reports 25 Percent Rise in Human Trafficking Cases in 2015".

<https://in.reuters.com/article/india-trafficking/india-reports-25-percent-rise-in-human-trafficking-cases-in-2015-idINKCN1175OW> (diakses 10 Februari 2019).

Bhattacharyya, Arpita. "Understanding the Historical Conflicts Behind Today's Violence in Assam".

<https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2012/08/29/35050/understanding-the-historical-conflicts-behind-todays-violence-in-assam/> (diakses 23 Mei 2019).

Brewer, Devin. "Globalization and Human Trafficking".

<https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/Globalization.pdf> (diakses 8 Maret 2019).

Finn, Devin. "Bonded Labor in India".

<https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/slavery/india.pdf> (diakses 30 April 2019).

Florino, Joseph. "Human Trafficking in South Asia".

<http://www.southasiaathudson.org/blog/2018/4/3/slavery-in-south-asia> (diakses 30 April 2019).

Goldberg, Eleanor. "Hundreds of Children in Nepal are at Risk of Trafficking After Earthquake. Here's Who's Helping".

https://www.huffpost.com/entry/nepal-children-trafficking_n_7637776 (diakses 10 Juni 2019).

Hindu American Foundation. "The Indian State of Assam: Origins and Causes of Conflict".

<https://www.hafsite.org/media/pr/indian-state-assam-origins-and-causes-conflict> pada (diakses 23 Mei 2019).

Khrisnan, Murali. "Nepal's Quake Survivors Face Increased Risk of Trafficking".

<https://www.dw.com/en/nepals-quake-survivors-face-increased-risk-of-trafficking/a-18599390> (diakses 10 Juni 2019).

Ministry of External Affairs India. "Human Trafficking".

<https://www.mea.gov.in/human-trafficking.htm> (diakses 23 Mei 2019).

Najar, Jaffer L. "Human Trafficking in India".

https://www.researchgate.net/publication/303276513_Human_Trafficking_in_India (diakses 30 April 2019).

Narzary, Raju K. "Impact of Conflict on Children in Assam and

Manipur States of India".

https://www.redhandday.org/fileadmin/user_docs/Study_Impact_of_Conflict_on_Children_in_Assam_and_Manipur_States_of_India_NERSWN_tdh_final_E.pdf (diakses 23 Mei 2019).

Sulistianingsih, Lies. "An Overview: Transnational Crime Issues in

International Criminal Law Associated With MLA".

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/258-an-overview-transnational-crime-issues-in-international-criminal-law-associated-with-mla-regim.html> (diakses 5 Maret 2019).

Thorson, Jane E. "Forgotten No More Male Child Trafficking in

Afghanistan". <https://hagarinternational.org/wp-content/uploads/2018/04/Hagar-Research-Forgotten-No-More-Male-Child-Trafficking-in-Afghanistan.pdf>

(diakses 29 April 2019).

Tumlin, Karen C. "Trafficking in Children in Asia; A Regional

Overview". http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_7_en.pdf (diakses 29 April 2019).

Tutton, Mark. "What is Modern Slavery".

<https://edition.cnn.com/2019/03/13/world/what-is-modern-slavery/index.html> (diakses 8 Juli 2019).

Vaz, Armstrong. "India: Tourism Fuels Trafficking of Humans".

<http://www.digitaljournal.com/article/263354> (diakses 10 Juni 2019).

Wall Street Journal. "India Worst Slave Country, Says Global Slavery

Index". <https://blogs.wsj.com/indiarealtime/2014/11/20/indonesia-8th-worst-slave-country-says-report/> (diakses 29 April 2019).

Warhust, Alyson, et al. "Trafficking: A Global Phenomenon

with an Exploration of India Through Maps".

https://portal.maplecroft.com/docs/hr_2011_q3_in_trafficking_report/ (diakses 10 Juni 2019).

Williams, Phil. "Crime, Illicit Market, and Money Laundering".

https://www.researchgate.net/publication/237597217_Crime_Illicit_Markets_and_Money_Laundering (diakses 16 Maret 2019).

